



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201900218, 4 Januari 2019

Pencipta

Nama : **DR. AMIR HALID, S.E., M.Si**
Alamat : JL. TAMAN SURYA , RT/RW. 0003/001, KEL. DEMBE JAYA,
KEC. KOTA UTARA, KOTA GORONTALO , GORONTALO,
Gorontalo, 96115
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **DR. AMIR HALID, S.E., M.Si**
Alamat : JL. TAMAN SURYA , RT/RW. 0003/001, KEL. DEMBE JAYA,
KEC. KOTA UTARA, KOTA GORONTALO , GORONTALO,
Gorontalo, 96115

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **MODEL KELEMBAGAAN PEMANFAATAN SUMBER
DAYA TAMBANG**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 12 Februari 2014, di GORONTALO

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000130955

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Model Kelembagaan

Pemanfaatan Sumber Daya Tambang

Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang mempunyai potensi sumberdaya mineral yang melimpah. Potensi sumberdaya alam tersebut harus dapat meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya untuk mencegah pengelolaan ilegal yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu kerjasama dan partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk pemanfaatan sumberdaya tambang melalui kepedulian perusahaan melalui kegiatan CSR. Bentuk kelembagaan CSR yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat akan mendukung keberhasilan pengelolaan tambang.

ISBN 978-602-7062-62-9



ideas
PUBLISHING

Jalan Galena No. 24
Kota Gorontalo
Telp./Fax: 0435830478
e-mail: info@ideaspublishing.com

ideas
PUBLISHING

Amir Halid

Model Kelembagaan

Pemanfaatan Sumber Daya Tambang



Model Kelembagaan Pemanfaatan Sumber Daya Tambang

Amir Halid

ideas
PUBLISHING

Amir Halid

Model Kelembagaan Pemanfaatan
**Sumber Daya
Tambang**



IP.84.03.2014
Model Kelembagaan Pemamfatan
Sumber Daya Tambang
Amir Halid

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Oleh Ideas Publishing, Maret 2014

Alamat:
Jl. Gelatik No. 24 Kota Gorontalo
Telp/Fax. 0435 830476
e-mail: infoideaspublishing@gmail.com
Anggota Ikapi, Februari 2014
No . 001 / Gorontalo / 2014

Penata Letak & Ilustrasi dan Sampul:
Tim Kreatif Ideas

ISBN : 978-602-9262-62-9

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau mempebanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Sujud syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, ketabahan, kemudahan, dan keselamatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini. Demikian pula dalam penulisan buku yang sangat sederhana ini, penulis mendapatkan banyak tantangan namun dengan semangat dan dukungan dari berbagai pihak serta kesabaran buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang mempunyai potensi sumberdaya mineral yang melimpah. Potensi sumberdaya alam tersebut harus dapat meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya untuk mencegah pengelolaan ilegal yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu kerjasama dan partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk pemanfaatan sumberdaya tambang melalui keperdulian perusahaan melalui kegiatan CSR. Bentuk kelembagaan CSR yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat akan mendukung keberhasilan pengelolaan tambang.

Sebagai hasil dari interpretasi penelitian, masyarakat di kawasan pertambangan, aspek pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat nampak masih rendah, dengan kondisi merata diseluruh sampel kecamatan, Meskipun di Kecamatan Marisa lebih baik bila dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Pohuwato dan dibidang

ekonomi terdapat beberapa Kecamatan yang telah mengalami peningkatan yan kesejahteraanya, antara lain Kecamatan Randangan dimana sebagian wilayah merupakan bagian dari program transmigrasi Pemerintah yang dimulai sejak tahun 19980an. Hampir semua masyarakat yang mengikuti program ini dari pulau Jawa dan Bali telah berhasil meningkatkan perekonomiannya karena tekun menggeluti profesinya sebagai petanidan bidang jasa lainnya. Ketimpangan pendapatan terdapat di Kecamatan Marisa dan Kecamatan Buntulia, namun di Kecamatan Dengilo, Kecamatan Patilanggio serta Kecamatan Taluditi cukup merata meskipun masih ada juga yang masuk kategori keluarga prasejahtera 1 dan 2.

Ucapan terima kasih yang mendalam, penulis haturkan kepada Ideas Publishing baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah menerbitkan buku ini, semoga amal bhakti kita semua akan diridhoi, diberkahi, dan dirahmati Allah SWT.

Gorontalo, Maret 2014

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii

Bagian 1

Pendekatan Ekonomi

Kelembagaan Pertambangan	1
--------------------------------	---

Bagian 2

Pendekatan Teknis

Kelembagaan Ekonomi Pertambangan	13
A. Gambaran Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pertambangan	13
B. Metode Analisis	24

Bagian 3

Pemetaan Aspek Sosial Dan

Ekonomi Daerah Pohuwato.....	39
A. Keadaan Geografis Wilayah	39
B. Kondisi Pemerintahan Kabupaten Pohuwato	41
C. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	42
D. Aspek Pendidikan	47
E. Aspek Kesehatan	51
F. Aspek Penggunaan Lahan	52
G. Aspek Tenaga Kerja	61
H. Industri dan Investasi	63
I. Transportasi Dan Komunikasi	66
J. Produk Domestik Regional Bruto	68

Bagian 4

Komponen Sosial Ekonomi Kelembagaan73

A. Kondisi Sosial Ekonomi Kelembagaan73

B. Hirarki Wilayah dan Pemetaan Infrastruktur 218

Bagian 5

Model Kelembagaan

A. Pemanfaatan Sumber Daya Tambang 229

B. Hirarki Pilihan Format

Kelembagaan Tambang 229

C. Kawasan Sensitif Sosial Ekonomi 258

Daftar Pustaka..... 269

PENDEKATAN EKONOMI KELEMBAGAAN PERTAMBANGAN

Sumberdaya alam dan lingkungan memiliki peran ekonomi dan penting dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadi modal dasar ekonomi Indonesia di masa depan. Penggunaan sumberdaya alam mendukung ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya dapat pula menimbulkan dampak pencemaran lingkungan dan mengganggu ekosistem sumberdaya alam yang saling memiliki keterkaitan.

Gangguan terhadap kualitas lingkungan berpotensi menurunkan pasokan sumberdaya alam dan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Untuk selalu mengendalikan penggunaan sumberdaya alam dengan sasaran *sustainability*, peran para ahli ekonomi sumberdaya alam sangat penting dengan selalu melaksanakan akunting dan valuasi sumberdaya alam. Peran aktor lain yang tidak kalah penting adalah para pemain langsung yaitu korporasi dalam penggunaan sumberdaya alam. Peran korporasi yang langsung melaksanakan penggunaan sumberdaya alam harus peka akan isu korelasi penggunaan sumberdaya alam dengan dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu,

korporasi yang melaksanakan aktivitas pertambangan dan memberikan dampak terhadap lingkungan harus selalu berusaha memelihara daya dukung lingkungan.

Salah satu korporasi yang dalam pelaksanaan bisnisnya menggunakan sumberdaya alam dan dihadapkan pada lingkungan hidup adalah korporasi di bidang mineral. Mineral biasanya tertimbun dalam tanah sehingga dalam pelaksanaan ekstraksi akan terjadi perubahan tutupan lahan. Pembukaan lahan adalah tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan. Pasca ekstraksi, lingkungan hidup pasti berubah dan terkena dampak. Upaya pengembalian lingkungan pada keadaan sebelumnya, atau lebih dari sebelumnya, adalah kegiatan yang harus dilaksanakan dan biasanya membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Citra perusahaan tambang dan migas kerap dikaitkan dengan citra buruk dampak lingkungan yang ditimbulkan (*environmental depletion*), pelanggaran hak asasi manusia dan keadilan sosial (*social justice*), ketimpangan dan kemiskinan (*welfare and equality*), serta masalah tenaga kerja (*labor exploitation*) (Prayogo, 2008). Singkatnya industri ini seakan menampakkan dua wajah, satu wajah menampakkan kemakmuran dan pemenuhan akan kebutuhan energi dan mineral untuk masyarakat, wajah lain menampakkan citra buruk oleh dampak yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, korporasi

harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya, sekaligus berkepentingan memperbaiki citra buruk itu.

Berdirinya industri pertambangan atau kegiatan lain yang memanfaatkan sumberdaya alam akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) atau pendapatan negara. Namun, perlu disadari secara realita ternyata daerah yang berada di lokasi pertambangan, rata-rata kehidupan ekonomi penduduknya berbanding terbalik dengan keuntungan yang diperoleh oleh negara maupun oleh badan usaha tersebut. Dengan kata lain, keberadaan badan usaha dalam pemanfaatan sumber daya alam secara otomatis tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Seharusnya, dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangan pula faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan harus meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan, situasi ini disebut *triple bottom line* (Lesmana, 2011). Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dibutuhkan adanya kerjasama antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Sinergi diantara ketiganya, akan dapat menciptakan pertumbuhan

ekonomi karena adanya investasi di bidang pertambangan dengan tetap menjaga pelestarian lingkungan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sinergi dari ketiga komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber: Pribadi, 2007.

Gambar 1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pelaksanaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, perusahaan atau korporasi dituntut untuk menerapkan *good corporate governance*. Melalui pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan diharapkan mampu berperan dalam pembangunan dengan cara meningkatkan kinerjanya agar tetap dapat bertahan dan bahkan berkembang menjadi perusahaan yang mampu bersaing namun, sekaligus pula mampu memenuhi berbagai tuntutan dari para *stakeholders*-nya.

Upaya tersebut secara umum dapat disebut sebagai *corporate social responsibility* atau *corporate citizenship* dan dimaksudkan untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau

berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha. *Corporate social responsibility* (CSR) dalam prinsip *good corporate governance* (GCG) ibarat dua sisi mata uang. Keduanya sama penting dan tidak terpisahkan. Ada empat prinsip GCG yaitu prinsip *responsibility*, *fairness*, *transparency*, dan *accountability* (Budimanta, 2011).

Ada perbedaan yang cukup mendasar antara prinsip *responsibility* dan tiga prinsip GCG lainnya. Tiga prinsip GCG pertama lebih memberikan penekanan terhadap kepentingan pemegang saham perusahaan (*shareholders*) sehingga ketiga prinsip tersebut lebih mencerminkan *shareholders-driven concept*. Contohnya, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas (*fairness*), penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu (*transparency*), dan fungsi dan kewenangan RUPS, komisaris, dan direksi (*accountability*).

Dalam prinsip *responsibility*, penekanan yang signifikan diberikan pada kepentingan *stakeholders* perusahaan. Di sini perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan *stakeholders* perusahaan, menciptakan nilai tambah (*value added*) dari produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya. Karena itu, prinsip *responsibility* di

sini lebih mencerminkan *stakeholders-driven concept* (Budimanta, 2011).

Stakeholders perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah karyawan, pelanggan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan lingkungan sekitar, serta pemerintah selaku regulator. Perbedaan bisnis perusahaan akan menjadikan perusahaan memiliki prioritas *stakeholders* yang berbeda. Sebagai contoh, masyarakat dan lingkungan sekitar adalah *stakeholders* dalam skala prioritas pertama bagi perusahaan pertambangan seperti PT Gorontalo Sejahtera Mining. Sementara itu, konsumen adalah *stakeholders* dalam skala prioritas pertama bagi perusahaan produk konsumen seperti Unilever. Dari penjelasan tersebut, terutama "menciptakan nilai tambah pada produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan," prinsip *responsibility* GCG menghasilkan gagasan *corporate social responsibility* (CSR) atau "peran serta perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya"

Dalam gagasan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines*. Di sini *bottom lines* lainnya, selain finansial adalah sosial dan lingkungan. Kondisi keuangan saja tidak

cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup.

Pada saat ini telah banyak perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan besar yang telah melakukan berbagai bentuk kegiatan CSR, apakah itu dalam bentuk *community development*, *charity*, atau kegiatan-kegiatan *philanthropy*. Namun demikian, pada umumnya berbagai kegiatan tersebut masih merupakan kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat ataupun lingkungan yang berada tidak jauh dari lokasi tempat dunia usaha melakukan kegiatannya. Dan sering kali kegiatannya belum dikaitkan dengan tiga elemen yang menjadi kunci dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Meskipun demikian, hal ini menjadi langkah awal positif yang perlu dikembangkan dan diperluas hingga benar-benar dapat dijadikan kegiatan *corporate social responsibility* yang benar-benar *sustainable*.

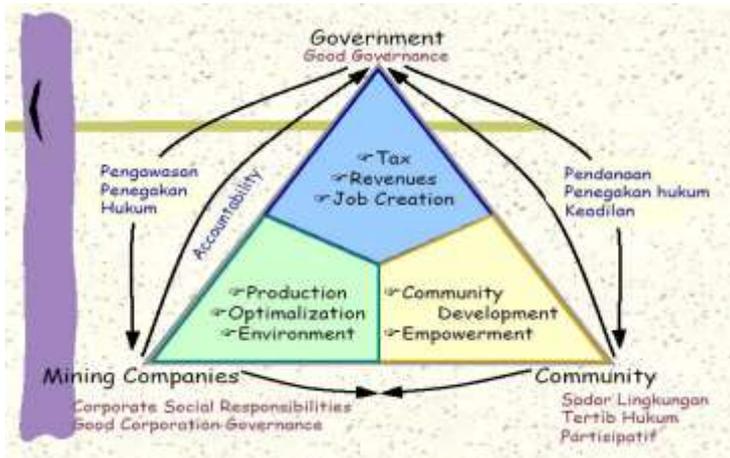
Secara internasional, CSR dipahami sebagai komitmen yang menerus dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berperan serta dalam pembangunan ekonomi, seiring dengan perbaikan kualitas hidup para karyawan dan keluarganya,

komunitas setempat, dan masyarakat secara luas (*World Business Council for Sustainable Development*, dalam Sudradjat, 2010). Di Indonesia, kewajiban perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tertuang dalam UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut CSR diterjemahkan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yang didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Secara lebih spesifik, kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, khususnya pada perusahaan sub sektor pertambangan umum tertuang pada UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 108 dan 109, yang mewajibkan pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pembahasan detail dan teknis dari pelaksanaan *community development* termaktub pada PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 106 s.d 109.

Agar pelaksanaan *community development* yang dilakukan oleh perusahaan dapat tepat pada sasaran maka diperlukan adanya pembinaan dan

pengawasan dari pemerintah pusat maupun daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan PP No.55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal Pasal 13 ayat 2, Pasal 16 huruf k&m, Pasal 31 dan 32 dijelaskan tentang perlunya pengawasan dan pembinaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Adapun mekanisme pengawasannya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Pribadi, 2007.

Gambar 2. Mekanisme Pengawasan Kegiatan *Community Development* Perusahaan Pertambangan

Ada empat sasaran pokok program *community development* pada perusahaan pertambangan. *Pertama*, Ekonomi. Prioritas sektor ekonomi ditunjukkan untuk peningkatan ekonomi mikro melalui usaha mandiri (*home industry*) dan peningkatan belanja lokal. Sektor ekonomi ini sangat penting dan mendasar untuk mencapai tujuan bersama di dalam satu kerangka pembangunan berkelanjutan. *Kedua*, Pendidikan. Prioritas yang diberikan di sektor pendidikan ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui bantuan-bantuan sarana pendidikan dan pemberian beasiswa bagi masyarakat yang kurang mampu. *Ketiga*, Infrastruktur. Sektor ini dimasukkan dalam sasaran pokok program karena salah satu kesuksesan peningkatan ekonomi adalah ketersediaan infrastruktur yang ada. Hal konkrit yang dilakukan adalah pembangunan fasilitas umum/sosial yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. *Keempat*, Kesehatan. Program yang diberikan, antara lain pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi warga yang tidak mampu serta perbaikan sarana kesehatan yang sudah ada.

Meskipun secara konseptual program *community development* mempunyai tujuan dan program yang jelas, Namun dalam kenyataannya pelaksanaan program tersebut tidak selalu memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Maraknya demo dan penolakan terhadap pengelolaan usaha pertambangan di berbagai

wilayah menunjukkan bahwa program *community development* yang dijalankan oleh perusahaan pertambangan Belum mencapai sasaran sebagaimana yang diinginkan. Kondisi ini bisa terjadi karena pelaksanaan *community development* yang dijalankan oleh perusahaan pertambangan kurang memperhatikan faktor kebutuhan dari masyarakat sekitar yang menjadi sasaran program.

Tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam pencapaian kegiatan *community development* disebabkan karena beberapa hal; (1) mayoritas perusahaan tambang belum memiliki peta pemangku kepentingan, sehingga inisiatif CSR kerap salah sasaran atau menyasar sebagian saja dari seluruh pemangku kepentingan, (2) dampak lingkungan dan kesehatan sebagian perusahaan tambang belum dikelola dengan memadai, dan (3) program *community development* sebagian perusahaan tambang belum didasarkan pada *community needs assessment*, sehingga banyak yang belum menjawab kebutuhan masyarakat.

Mengacu pada berbagai kekurangan di atas, maka penguasaan data dasar sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perusahaan pertambangan menjadi sangat penting untuk dimiliki agar pencapaian tujuan dari kegiatan *community development* maupun kegiatan CSR yang lainnya dapat tepat sasaran. Atas dasar hal tersebut, maka studi tentang Base Line Survei Sosial Ekonomi Dalam Rangka Penyusunan Program

Corporate Social Responsibility (CSR) P.T. Gorontalo Sejahtera Mining, menjadi penting untuk dilakukan agar pelaksanaan CSR di perusahaan tersebut menjadi lebih bermanfaat bagi *stakeholders*, khususnya masyarakat sekitar.

Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang mempunyai potensi sumberdaya mineral yang melimpah. Potensi sumberdaya alam tersebut harus dapat meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat sekitarnya untuk mencegah pengelolaan ilegal yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu kerjasama dan partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk pemanfaatan sumberdaya tambang melalui keperdulian perusahaan melalui kegiatan CSR. Bentuk kelembagaan CSR yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat akan mendukung keberhasilan pengelolaan tambang.

PENDEKATAN TEKNIS KELEMBAGAAN EKONOMI PERTAMBANGAN

A. Gambaran Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pertambangan

Base line survey mengenai kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar lokasi perusahaan pertambangan PT. Gorontalo Sejahtera Mining, mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Pohuwato. Studi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran existing kondisi berbagai variabel sosial-ekonomi-budaya masyarakat di masing-masing wilayah sampel yang berada di sekitar lokasi pertambangan P.T. Gorontalo Sejahtera Mining, Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo yang sekaligus dapat dijadikan informasi awal dalam menyusun berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Secara terperinci berbagai kondisi sosial-ekonomi-budaya yang akan diidentifikasi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi **kondisi demografi** masyarakat diwilayah sampel seperti jumlah anggota keluarga, pekerjaan utama kepala keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pengangguran dan berbagai variabel demografi lainnya.

- b. Mengidentifikasi **profil ekonomi masyarakat** seperti kepemilikan dan penguasaan sumberdaya produksi, profil usaha produktif (usaha tani, usaha nelayan dan usaha produktif lainnya); keuntungan usaha rumah tangga, tabungan dan pengeluaran rumah tangga serta berbagai variabel ekonomi rumah tangga lainnya.
- c. Mengidentifikasi **profil pendidikan dan kesehatan** masyarakat pada tingkat wilayah maupun pada tingkat rumah tangga. Profil pendidikan pada tingkat rumah tangga mencakup: status pendidikan anggota rumah tangga, tingkat putus sekolah, jumlah anggota keluarga yang menganggur, aksesibilitas anggota rumah tangga terhadap pendidikan (jarak, biaya dll). Profil kesehatan rumah tangga mencakup jenis-jenis penyakit dan prevalensi menurut jenis penyakit yang di derita anggota rumah tangga, cara pengobatan dan aksesibilitas anggota rumah tangga terhadap sarana kesehatan.
- d. **Profil sosial budaya masyarakat** di lokasi sampel, mencakup nilai, norma, adat istiadat, serta tradisi masyarakat di setiap wilayah sampel,
- e. Identifikasi **jenis, peran dan fungsi kelembagaan** yang ada di masing-masing lokasi sampel. Kelembagaan mencakup

- kelembagaan produksi, kelembagaan ekonomi serta kelembagaan sosial budaya dan
- f. mengidentifikasi **potensi konflik** penggunaan sumberdaya pertambangan dan cara penanggulangannya.

1. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan berdasarkan sumbernya terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi yang relevan seperti Kantor Desa, Kantor Kecamatan, dan berbagai lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah lainnya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode yakni metode survey, metode observasi dan metode FGD (*Fokus Group Discussion*). Metode survey dimaksudkan dengan melakukan wawancara langsung dengan para responden terpilih. Dalam wawancara tersebut para peneliti dan "*interviewer*" menggunakan kuesioner yang telah disediakan sebelumnya.

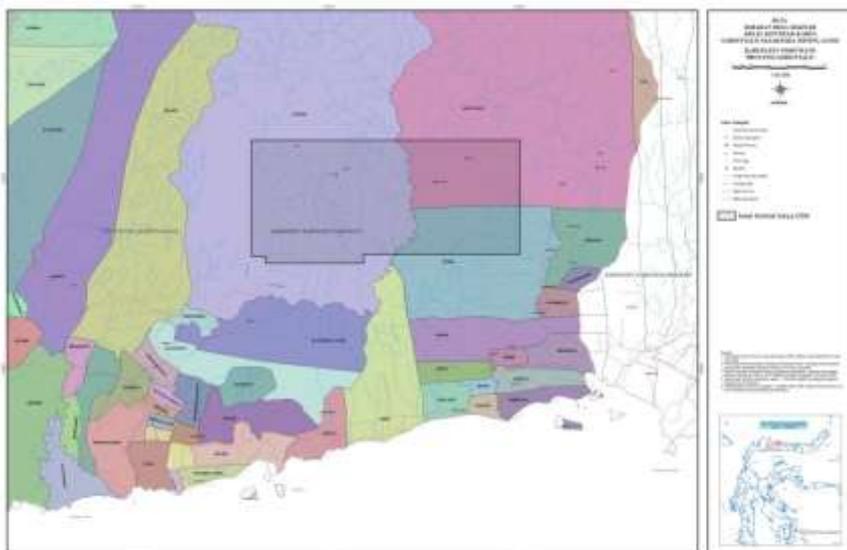
Responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah unit rumah tangga dan unit lembaga produksi, lembaga ekonomi-sosial-budaya yang ada pada setiap wilayah sampel. Selanjutnya metode observasi dimaksudkan untuk mengamati secara langsung berbagai fenomena sosial-ekonomi-budaya, kondisi sarana dan prasarana sosial-ekonomi-budaya seperti sarana perekonomian, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana

peribadatan dan lainnya. Sedangkan kegiatan FGD terutama dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai berbagai fenomena sosial-ekonomi-budaya masyarakat dan kelembagaan lokal di masing-masing wilayah sampel, termasuk menggali informasi mengenai potensi yang dapat dikembangkan serta informasi berbagai bentuk kelembagaan yang dapat difungsikan dalam rangka penyusunan berbagai program CSR di sekitar lokasi perusahaan pertambangan P.T. Gorontalo Sejahtera Mining. FGD akan dilakukan pada setiap desa sampel dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

2. Sample dan Pemilihan Responden

Cakupan wilayah kegiatan *base line survey* ini mencakup seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato, namun untuk keperluan survey, lokasi pelaksanaan survey di akan dipusatkan pada lima kecamatan sampel yakni masing-masing: Kecamatan Marisa, Kecamatan Paguat, Kecamatan Patilamnggio, Kecamatan Taluditi, Kecamatan Randangan. Wilayah kecamatan yang dipilih sebagai lokasi survey di tentukan secara *purposive*, dengan beberapa pertimbangan seperti kedekatan wilayah kecamatan dengan lokasi pertambangan PT. Gorontalo Sejahtera Mining serta pertimbangan keragaman karakteristik wilayah. Dari 5 (lima) kecamatan sampel yang dipilih, selanjutnya akan dipilih masing-masing 3 (tiga) desa/kelurahan

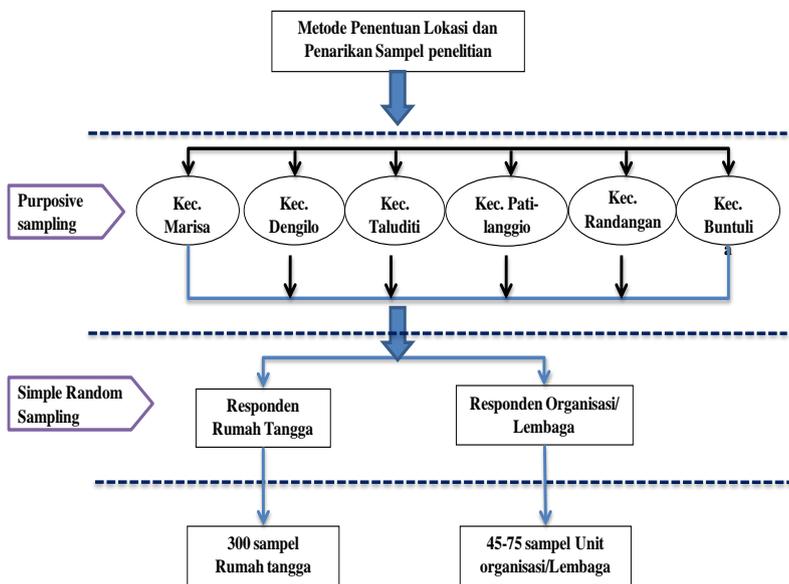
secara *purposive* dengan mempertimbangkan keragaman wilayah dan aktivitas masyarakat, seperti wilayah pantai, wilayah dataran rendah dan daerah pegunungan. Lokasi penarikan sampel dapat dilihat pada peta administasi sebagai berikut.



Gambar 3. Peta Lokasi Sampel Penelitian

Unit responden yang akan diwawancarai dalam penelitian adalah rumah tangga dan berbagai unit lembaga sosial-ekonomi-budaya masyarakat. Metode pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda pada dua kelompok responden (kelompok rumah tangga dan kelompok lembaga). Untuk responden rumah

tangga, metode yang digunakan adalah metode *simple random sampling*, sedangkan unit lembaga digunakan metode *purposive*. Jumlah sampel rumah tangga yang akan diambil sebanyak 300 responden yang terdiri 20 responden setiap desa sampel. Sedangkan unit lembaga yang wawancarai disesuaikan dengan jumlah unit lembaga yang ada di masing-masing desa, diperkirakan jumlah unit lembaga yang diwawancarai sekitar 45-75 lembaga untuk keseluruhan wilayah sampel. Secara skematik, metode penentuan lokasi sampel dan pemilihan responden di tunjukkan pada skema berikut.



Gambar 4. Prosedur Penarikan Sampel

3. Jenis Data yang Dikumpulkan

Jenis data yang akan dikumpulkan dari segi sumbernya terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi yang relevan seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, Kantor Desa, Kantor Kecamatan, unit-unit usaha, Dinas Koperindag dan Invesda, Bappeda, Dinas Pertambangan dan berbagai lembaga non pemerintah lainnya. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur terhadap rumah tangga dan berbagai unit lembaga di masing-masing desa sampel. Gambaran berbagai variabel data yang dirinci menurut sumber dan cara pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1. Kebutuhan Data *Baseline Survey* Sosial-Ekonomi-Budaya Masyarakat Sekitar Lokasi Pertambangan P.T. Gorontalo Sejahtera Mining

No	Tujuan	Variabel	Satuan	Sumber	Jenis data
1	Profil Sosial Budaya dan Demografi wilayah sampel	1. Jumlah Penduduk (Laki-laki dan Perempuan)	Jiwa	BPS Kab. Pohuwato	Sekunder
		2. Tingkat kepadatan penduduk	Jiwa	BPS Kab. Pohuwato	Sekunder
		3. Jumlah penduduk menurut Kelompok umur	Jiwa	BPS Kabupaten Pohuwato	Sekunder
		4. Penduduk menurut jenis pekerjaan	Jiwa	BPS Kab. Pohuwato	Sekunder
		5. Penduduk menurut tingkat pendidikan	Jiwa	BPS Kabupaten Pohuwato	Sekunder
		6. Penduduk menurut suku dan agama	Jiwa	BPS Kab. Pohuwato	Sekunder
		7. Jumlah rumah tangga	Jiwa	BPS Kab. Pohuwato	Sekunder

No	Tujuan	Variabel	Satuan	Sumber	Jenis data
		8. Rata-rata anggota rumah tangga	Jiwa	BPS Kab. Pohuwato	Sekunder
		9. Jumlah organisasi sosial (Kel. Tani, Nelayan, karang taruna, Arisan, wanita tani dll)	Unit	Kantor Desa/ Instansi terkait	Sekunder
		10. Jumlah sarana sekolah menurut jenjang pendidikan	Unit	BPS Kabupaten Pohuwato	Sekunder
		11. Jumlah sarana ibadah	Unit	Kantor Desa/ Instansi terkait	Sekunder
		12. Jumlah sarana kesehatan	Unit	BPS Kab. Pohuwato	Sekunder
		13. Jumlah sarana ekonomi (pasar, koperasi, lembaga keuangan, dll)	Unit	Kantor Desa/ Instansi terkait	Sekunder
		14. Tingkat partisipasi sekolah anggota rumah tangga	%	Rumah Tangga	Primer
		15. Tingkat pendapatan rumah tangga menurut sumber pendapatan	Rp	Rumah Tangga	Primer
		16. Rata-rata pengeluaran rumah tangga	Rp	Rumah Tangga	Primer
		17. Angka harapan hidup (tingkat kematian bayi dan rata-rata umur meninggal)	Jumlah dan Thn	Rumah Tangga	Sekunder
		18. Angka melek huruf dan rata-rata lama pendidikan formal anggota keluarga	Jumlah & Thn	Rumah Tangga	Primer
		19. Perumahan			Primer
		20. Sumber air bersih		Rumah Tangga	Primer
		21. Kesehatan		Rumah Tangga	Primer
		22. penerangan		Rumah Tangga	Wawancara
2	Mengidentifikasi profil aktivitas ekonomi rumah	1. Jumlah rumah tangga menurut aktivitas ekonomi utama (RT pertanian, RT nelayan dll)	Jiwa	Kantor Desa /instansi terkait	Sekunder

No	Tujuan	Variabel	Satuan	Sumber	Jenis data
	tangga di lokasi sampel	2. Penguasaan sumberdaya (lahan Usahatani, tambak, alat tangkap dan lainnya	Unit	Rumah Tangga	Sekunder

Lanjutan tabel 1

No	Tujuan	Variabel	Satuan	Sumber	Jenis data
		3. Karakteristik usaha produktif			
		* luas/skala usaha produktif	Ha/Unit	Rumah Tangga	Wawan-cara
		* biaya-biaya usaha produktif	Rp	Rumah Tangga	Wawan-cara
		* Tingkat produksi usaha produktif	Kg	Rumah Tangga	Wawan-cara
		* Produktivitas usaha produktif	Kg/Ha	Rumah Tangga	Wawan-cara
		* Proporsi hasil usaha yang dijual	%	Rumah Tangga	Wawan-cara
		* Jenis perlakuan dan biaya pasca panen usaha produktif	Rp	Rumah Tangga	Wawan-cara
		* Tempat penjualan hasil dan harga penjualan		Rumah Tangga	Wawan-cara
		* Pendapatan usaha produktif	Rp	Rumah Tangga	Wawan-cara
3	Megide n-tifikasi Profil pendidikan-an dan kesehatan anggota rumah tangga di lokasi sampel	1. Profil pendidikan anggota RT		RT, Tokoh masy	Wawancara, FGD
		* Status dan tingkat putus sekolah anggota RT	Tahun dan jiwa	RT, Tokoh masy	Wawan-cara, FGD
		* aksesibilitas pendidikan	jarak	RT, Tokoh masy	Wawan-cara, FGD
		2. Profil Kesehatan anggota RT		RT, Tokoh masy	Wawan-cara, FGD
		* Jenis penyakit dan prevalensinya serta cara pengobatan	%	RT, Tokoh masy	Wawan-cara, FGD
		* aksesibilitas sarana kesehatan	Jarak	RT, Tokoh masy	Wawan-cara, FGD

Lanjutan tabel 1

No	Tujuan	Variabel	Satuan	Sumber	Jenis data
4	Megidentifikasi profil sosial budaya serta jumlah dan jenis kelembagaan masyarakat	1. Jumlah dan jenis organisasi sosial masyarakat (Lembaga formal dan non formal)	Unit	Instansi terkait, Tokoh masy.	Sekunderw awan-cara
		2. Tipe-tipe organisasi sosial masyarakat (sharing TK, mengumpulkan SD, manajemen asset, dll)	Jenis tipe	RT, Tokoh masy	Wawancara, FGD
		3. Karakteristik organisasi sosial masyarakat berdasarkan sejarah dan tujuan pembentukan		RT, Tokoh masy	Wawancara, FGD
		4. Karakteristik organisasi sosial masyarakat berdasarkan keanggotaan (jumlah anggota menurut jenis kelamin)	Jiwa	RT, Tokoh masy	Wawancara, FGD
		5. Tingkat pengaruh organisasi sosial terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya masyarakat dan pelestarian lingkungan	Rendah ,sedang tinggi	RT, Tokoh masy	Wawancara, FGD
		6. Tata nilai dan hukum adat yang masih dipatuhi oleh masyarakat setempat		RT, Tokoh masy	Wawancara, FGD
		7. tradisi-tradisi lokal pada masyarakat		RT, Tokoh masy	Wawancara, FGD
		8. Perilaku masyarakat (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) terhadap pelestarian SD		RT, Tokoh masy	Wawancara, FGD
		9. Kearifan-kearifan lokal masyarakat, yang berkaitan kegiatan produksi dan pelestarian sumberdaya		RT, Tokoh masy	Wawancara, FGD

Lanjutan tabel 1

No	Tujuan	Variabel	Satuan	Sumber	Jenis data
5	Mengidentifikasi potensi konflik yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya pertambangan	1. Para pihak (stakeholder) yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pertambangan		RT, Pengusaha, Tokoh masy.	Wawancara, FGD
		2. Bentuk kepentingan dan peran masing-masing stakeholder		RT, Pengusaha, Tokoh masy.	Wawancara, FGD
		3. Bentuk legalitas penguasaan/pemanfaatan sumberdaya pertambangan (izin formal, hukum adat, kesepakatan bersama, dll)		RT, Pengusaha, Tokoh masy.	Wawancara, FGD
		4. Bentuk konflik-konflik antar stakeholder yang terkait pemanfaatan sumberdaya pertambangan		RT, Pengusaha, Tokoh masy.	Wawancara, FGD
		* Konflik antar masyarakat		RT, Pengusaha, Tokoh masy.	Wawancara, FGD
		* Konflik antara masyarakat dengan pengusaha		RT, Pengusaha, Tokoh masy.	Wawancara, FGD
		* konflik antara masyarakat dengan pemerintah		RT, Pengusaha, Tokoh masy.	Wawancara, FGD
		* konflik antara pengusaha dengan pemerintah		RT, Pengusaha, Tokoh masy.	Wawancara, FGD
		* konflik antara pengusaha dengan pemerintah		RT, Pengusaha, Tokoh masy.	Wawancara, FGD
		5. Bentuk dan Mekanisme penyelesaian konflik		RT, Pengusaha, Tokoh masy.	Wawancara, FGD

Lanjutan tabel 1

No	Tujuan	Variabel	Satuan	Sumber	Jenis data
6	Meng-analisis Tingkat pendapatan masya-rakat di masing-masing lokasi sampel	1. Sumber-sumber pendapatan menurut jenis usaha produktif rumah tangga	Rp	Rumah tangga	Wawan-cara
		2. Tingkat pendapatan berdasarkan tingkat pengeluaran	Rp	Rumah tangga	Wawan-cara
		* Pengeluaran untuk pangan	Rp	Rumah tangga	Wawan-cara
		* Pengeluaran non pangan	Rp	Rumah tangga	Wawan-cara
		* Tabungan	Rp	Rumah tangga	Wawan-cara

B. Metode Analisis

Berbagai data yang akan diukur dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif deskriptif yakni mengukur nilai rata-rata, nilai interval dan nilai ragam, serta nilai distribusi persentase frekuensi kumulatif berbagai variabel yang dianalisis. Selanjutnya untuk penyajiannya, hasil analisis tersebut akan disajikan dalam bentuk tabulasi silang dan gambar atau grafik sederhana.

1. Analisis Deskriptif

Kegiatan survei sosial ekonomi masyarakat sekitar perusahaan pertambangan P.T. Gorontalo Sejahtera Mining dilakukan menggunakan analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran secara faktual dan sistematis mengenai tinjauan historis, yuridis dan *land tenure*. Tinjauan historis kawasan terkait tentang tahapan-tahapan

pemanfaatan dan perubahan kawasan. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan aspek sosial budaya, ekonomi, hukum dan kelembagaan.

Tinjauan yuridis terkait dengan status hukum kawasan dan kronologis perubahannya. Tinjauan *land tenure* yang bertujuan untuk menelusuri klaim lahan dari para aktor yang kurang jelas pada aspek historis, yuridis, ekologis dan sosial ekonomi serta legalitas dari arah kebijakan perubahan status kawasan di wilayah tumpang tindih, memiliki interpretasi berbeda dari para pihak (Suyanto *et al*, 2010).

2. Analisis Skalogram dan Pemetaan Infrastruktur

Pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar perusahaan pertambangan P.T. Gorontalo Sejahtera Mining beserta infrastruktur pendukungnya dilakukan menggunakan pendekatan skalogram. Metode ini digunakan untuk menentukan hirarki wilayah. Dalam metode skalogram, seluruh fasilitas umum yang dimiliki oleh setiap unit wilayah didata dan disusun dalam satu tabel. Metode skalogram ini bisa digunakan dengan menuliskan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh setiap wilayah, atau menuliskan ada/tidaknya fasilitas tersebut di suatu wilayah tanpa memperhatikan jumlah/kuantitasnya.

Selain itu, melalui metode ini juga akan diidentifikasi jenis, jumlah dan karakteristik infrastruktur yang diperlukan sebagai SOC (*social overhead capital*) yang akan mendukung kegiatan CSR. *Social overhead capital* (SOC) biasanya didefinisikan sebagai dukungan kepada ekonomi yang terdiri dari *basic services*, sehingga tanpa dukungan tersebut aktivitas primer, sekunder, dan tertier dari kegiatan produktif tidak dapat berfungsi. Dalam arti luas, SOC meliputi semua jasa-jasa publik mulai dari segi hukum dan pengaturan, melalui pendidikan dan kesehatan masyarakat sampai kepada transportasi, komunikasi, energi dan supply air bersih, maupun kapital pendukung pertanian seperti irigasi, transportasi, komunikasi, energi dan air bersih serta sistem drainase yang diperlukan. Infrastruktur dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang akan dikaji mencakup tiga kelompok prasarana utama yaitu :

- ***Hardware Infrastructure***, meliputi :
Jaringan jalan, listrik, gas, air bersih, telekomunikasi, dan sebagainya.
- ***Software Infrastructure***, meliputi :
Kualitas sumberdaya manusia (SDM), sikap kewirausahaan, manajemen, kemampuan menghimpun informasi pasar dan pemasaran, dan konsultasi.
- ***Institutional Infrastructure***, meliputi :

Pendidikan dan latihan, promosi, perdagangan, penelitian, asosiasi produsen, pedagang dan eksportir, dan sebagainya.

Tahapan dalam penyusunan skalogram dengan indeks sentralitas adalah:

- a) Pekerjaan pertama yang dilakukan sama dengan yang dilakukan pada Penyusunan Skalogram 1 (poin 1 dan 2). Jika dari hasil pengurutan dengan metode skalogram 1 sudah diperoleh, maka pekerjaan selanjutnya adalah dengan melakukan penggantian seluruh nilai fasilitas dengan nilai 1 jika ada fasilitas tersebut di suatu wilayah atau 0 jika tidak ada fasilitas yang dimaksud di suatu wilayah.
- b) Disamping data fasilitas umum, maka data yang perlu ditabelkan adalah data populasi. Hasil pengurutan dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Tabel Skalogram dengan Indeks Sentralitas

No	Sub Wilayah	Populasi	Fasilitas					
			1	2	3	4	5	6
1	A	A	1	1	1	1	1	1
2	B	B	1	1	1	1	1	1
3	C	C	1	1	1	1	1	0
4	D	D	1	1	1	1	0	0
5	E	E	1	1	1	0	0	0
6	F	F	1	0	0	0	0	0
7	G	G	0	0	0	0	0	0

- c) Setelah diperoleh hasil penyusunan skalogram (1) point 1 dan (2), dihitung nilai standar deviasi keseluruhan jumlah penduduk yang ada di total

wilayah. Nilai ini akan digunakan untuk menghitung nilai sentralitas dan mengelompokkan unit wilayah dalam kelas-kelas yang dibutuhkan. Kita asumsikan bahwa kelompok yang diperoleh berjumlah 3, yaitu Kelompok I dengan tingkat perkembangan tinggi, Kelompok II dengan tingkat perkembangan sedang dan Kelompok III dengan tingkat perkembangan rendah. Selanjutnya ditetapkan suatu konsensus misalnya jika nilai rataan kepadatan penduduk adalah lebih besar atau sama dengan ($2 \times$ standar deviasi + nilai rata-rata) maka dikategorikan tingkat perkembangan tinggi, jika tingkat kepadatan penduduk antara nilai rata-rata sampai ($2 \times$ standar deviasi + nilai rata-rata) maka termasuk tingkat pertumbuhan sedang dan jika nilai kepadatan penduduk kurang dari nilai rata-rata maka termasuk dalam nilai pertumbuhan rendah. Secara matematis kelompok tersebut adalah :

$\bar{X} + 2 Stdev \leq Kel.I$ untuk **Kelompok I** (Tingkat Perkembangan Tinggi)

$\bar{X} + 2 St-dev > \text{Kelompok II} \geq \bar{X}$ (Tingkat Perk. Sedang)

Kelompok III < \bar{X} untuk **Kelompok III** (Tingkat Perkembangan Rendah)

3. Analisis AHP (*Analytic Hierarchy Process*). **Kelembagaan**

Tujuan analisis kelembagaan adalah mengkaji format kelembagaan yang tepat dalam melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi masyarakat sekitar perusahaan. Langkah awal yang dilakukan adalah mengkaji tiga unsur pembentuk kelembagaan yaitu batas yuridiksi, hak kepemilikan dan aturan representasi. Batas yuridiksi dalam pengelolaan tambang berarti suatu batasan untuk menentukan siapa saja yang berhak ikut terlibat dalam pengelolaan pada satu lokasi. Batas yuridiksi dapat diamati terkait karena sarana dan prasarana yang dibangun sebagai pendukung yang terkait dengan pertambangan. Masalah yuridiksi juga menyangkut aspek legal yaitu pengakuan kelembagaan secara hukum oleh pemerintah.

Hak kepemilikan pada kelembagaan tambang dapat dilihat dari hak yang diterima para pihak berdasarkan menurut konsensus yang telah

disepakati. Aturan representasi dalam pengelolaan tambang dapat ditemui pada berbagai tingkat struktur kelembagaan dengan tujuan agar pengelolaan tambang berjalan efisien. Aturan representasi bermanfaat dalam mengatur permasalahan dan proses pengambilan keputusan. Unsur-unsur dalam kelembagaan akan disusun melalui diagram pemetaan kelembagaan pengelolaan tambang yang akan dikaitkan dengan analisis fakta dan sintesa resolusi konflik.

Selanjutnya prioritas format kelembagaan yang tepat untuk melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilakukan menggunakan AHP (*Analytic Hierarchy Process*). AHP merupakan salah satu metode yang membantu dalam masalah pengambilan keputusan. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan yang memerlukan multikriteria (terdapat banyak kriteria dan alternatif). AHP merupakan prosedur yang didesain untuk menangkap persepsi yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang dirancang pada skala preferensi di antara berbagai alternatif. Dalam teknik analisis AHP komponen-komponen utama penelitian dibuat urutan secara hierarki lalu diberi nilai (*Scoring*) dalam angka kepada setiap bagian yang menunjukkan penilaian subyektif. Tahap selanjutnya penilaian tersebut kemudian disintesisasikan (dengan

eigen factor) guna menentukan variabel mana yang mempunyai prioritas tertinggi.

Tujuan utama yang hendak dicapai adalah prioritas format kelembagaan untuk kegiatan pertambangan dengan indikator sosial, ekonomi dan kelembagaan. Prosedur aplikasi AHP secara umum :

- a. Membuat matriks perbandingan preferensi berpasangan setiap alternatif keputusan untuk setiap kriteria yang menjadi pertimbangan pada saat membuat keputusan.
- b. Melakukan sintesis :
 - 1) Jumlahkan nilai pada setiap kolom matriks tersebut .
 - 2) Normalisasikan nilai pada setiap kolom dengan membagi skor dengan jumlah kolom. Hasilnya adalah matriks yang dinormalisasi.
 - 3) Rata-ratakan nilai setiap baris matriks normal ini untuk menghasilkan vektor preferensi.
 - 4) Kombinasikan vektor preferensi ini untuk setiap kriteria ke dalam matriks preferensi yang menjelaskan preferensi setiap alternatif pilihan terhadap setiap kriteria yang dipertimbangkan.
- c. Buat sebuah matriks perbandingan berpasangan antar kriteria.

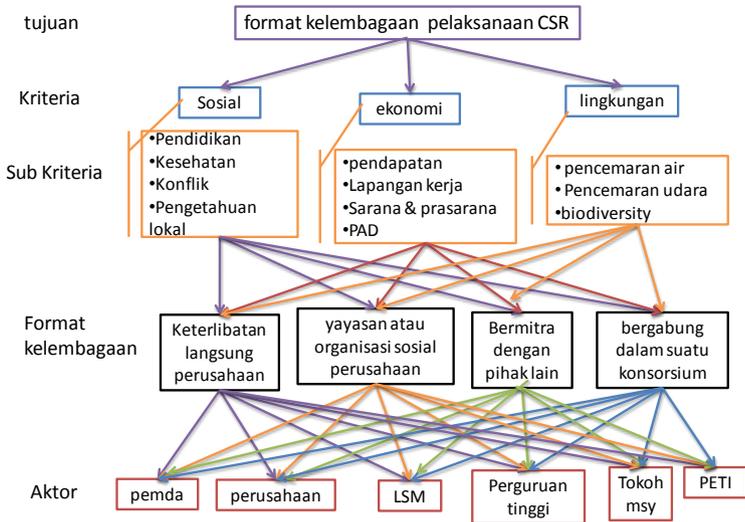
- d. Normalisasikan matriks tersebut dengan membagikan jumlah kolom kepada nilai-nilai kolomnya.
- e. Buat vektor preferensi dengan merata-rata baris dari matriks normal.
- f. Hitung total skor setiap keputusan alternatif dengan mengkalikan vektor preferensi kriteria tersebut dengan matriks kriteria yang dihasilkan pada langkah 2.d.
- g. Buat rank setiap keputusan alternatif berdasar skor yang dihasilkan pada langkah 6.

Responden diharapkan akan memberikan nilai dalam angka yang terbatas untuk memberi tingkat urutan (skala) prioritas. Skala yang digunakan tergantung dari pandangan responden. Dalam menentukan skala (tingkat urutan) atas persepsi digunakan metode skala Saaty (1990) seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Sistem Urutan (Ranking) *Saaty*

Tingkat Kepentingan	Keterangan	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya.	Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen dibanding dengan elemen lainnya.
5	Elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lain.	Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen dibanding elemen lainnya.
7	Elemen yang satu jelas lebih penting daripada elemen yang lain.	Satu elemen dengan kuat didukung dan dominan terlihat dalam praktek.
9	Elemen yang satu mutlak lebih penting daripada elemen yang lain.	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan.
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan	
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i.	

Untuk menilai tingkat konsistensi, dapat diketahui dari indeks konsistensi yang diperoleh dari nilai matriks yang dikalikan dengan faktor pembobot (*eigen vector*) untuk menentukan ratio konsistensi. Dari RC ini dinilai dengan membagi nilai IK dengan (banyaknya sampel dalam jumlah terbatas dikurangi dengan nilai standar dari nilai IK). Bagan hirarki yang akan dikembangkan dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 5. Bagan Hirarki Pilihan Format Kelembagaan CSR Pertambangan

4. Analisis Sensitivitas Sosial Ekonomi Kawasan Pertambangan

Analisis ini bertujuan untuk peningkatan keberlanjutan sosial dalam kegiatan pertambangan agar memiliki implikasi . merupakan salah satu alat perencanaan untuk meminimalisasi dampak- sosial yang negatif dalam kegiatan pertambangan. Prosedur penentuan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) berdasarkan revisi Toolkit HCVF Indonesia yang pertama (versi 2003). NKT5 (sosial ekonomi) dan NKT6 (budaya) bertujuan untuk mengakui dan memberikan ruang kepada masyarakat lokal dalam rangka menjalankan pola hidup tradisionalnya

yang tergantung pada hutan atau ekosistem lainnya. Kawasan yang dimaksudkan dalam kedua NKT tersebut terbatas pada klaim *hak milik* terhadap atas suatu wilayah, namun bisa lebih luas lagi, pada *hak guna* masyarakat terhadap wilayah tertentu. Penilaian dan pendokumentasian hak-hak masyarakat ini didasarkan pada konsultasi langsung bersama masyarakat. NKT 5 merupakan kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal. Sedangkan NKT 6 merupakan kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal.

Proses penilaian NKT pada suatu kawasan dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak pada setiap tahapannya, termasuk pemerintah, unit pengelola (perusahaan dan/atau komunitas lokal), masyarakat/komunitas lokal, tim penilai, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi non-pemerintah (Ornop), serta universitas/lembaga penelitian. Keterlibatan pihak tersebut bersifat wajib dan masing-masing mempunyai peran dan tanggung-jawab seperti uraian berikut .

a. Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting terkait dengan aspek legalitas (aturan, hukum dan kebijakan), baik sebagai dasar dalam melakukan penilaian, maupun dalam hal pengakomodasian dan pengakuan hasil. Instansi pemerintah juga berperan penting

dalam penyediaan data dan informasi yang diperlukan, terutama pada tahap persiapan studi yakni pada pengumpulan data sekunder yang terkait dengan aspek sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

b. Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal, adalah masyarakat baik yang tinggal didalam dan disekitar kawasan pertambangan maupun di kawasan yang mungkin terkena dampak dari kegiatan-kegiatan pengelolaan tambang di kawasan tersebut, terlibat secara aktif dalam berbagai tahapan, terutama dalam pengumpulan data primer. Sebagian dari data primer (aspek sosial ekonomi dan budaya) di lapangan didapatkan dari wawancara dan diskusi kelompok dengan masyarakat, terutama dengan tokoh-tokoh kunci yang meliputi aparat pemerintah desa (kepala desa dan staf desa), tokoh agama (ulama, guru ngaji, pendeta dll), petugas kesehatan desa, dan wakil masyarakat (sampel) berdasarkan suku ataupun masyarakat secara umum yang ditetapkan sesuai dengan metode yang telah ditetapkan sebelumnya. Masyarakat juga berperan penting dan perlu terlibat dalam presentasi hasil dan rekomendasi pengelolaan yang disarankan untuk memeriksa kebenarannya. Selain itu hasil studi juga perlu diterima dan diakomodasi oleh masyarakat lokal.

- c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non-Pemerintah (Ornop atau NGO) Keterlibatan LSM dan/atau Ornop berfungsi sebagai pendamping dan pengawas jalannya kegiatan. Mereka berperan sebagai sumber data dan informasi terkait kegiatan penambangan tradisional, apabila diperlukan memberikan masukan-masukan dalam presentasi dan diskusi-diskusi.

Tabel 4. Peran dan Keterlibatan Stakeholder

No.	Pihak yang terkait	Terlibat pada tahap	Fungsi
1.	Instansi Pemerintah		1. Penyedia/ sumber data dan Informasi:
	1) Bappeda Kabupaten Pohuwato	1. Pengumpulan data sekunder dan primer	a. Peta administrasi dan sosekbud
	2) Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi		b. Peta RTRWK/TGHK
	3) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	2. Pemaparan hasil kepada publik	c. Data sosekbud
	4) BLH Kabupaten		d. Data statistik kependudukan
	5) BPN Kabupaten		e. Kebijakan Pemerintah
	6) DPRD Kabupaten		f. Monografi kecamatan dan desa
	7) BPS		g. Peta tutupan lahan
	8) Kantor Camat		2. Memberikan masukan terhadap laporan hasil
	9) Kantor Desa		
2.	Masyarakat	1) Pengumpulan data lapangan	1) Sebagai sumber informasi
		2) Pemaparan hasil kepada publik	2) Memberikan masukan terhadap laporan hasil
3.	Organisasi Swadaya Masyarakat / Organisasi Non-Pemerintah	1) Pengumpulan data sekunder	1) Sebagai sumber data dan Informasi
		2) Pemaparan hasil kepada publik	2) Memberikan masukan terhadap laporan hasil

Analisis Pemetaan Awal terhadap aspek sosial, ekonomi dan budaya dilakukan melalui kajian terhadap laporan tentang adat-istiadat, demografi desa, data statistik, peta bahasa dan peta administrasi. Dari hasil analisis terhadap data dan peta tersebut dapat dihasilkan suatu gambaran umum tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat yang ada di dalam atau sekitar wilayah yang akan dinilai.

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan melakukan pengamatan langsung di lokasi-lokasi terpilih. Daftar pertanyaan terstruktur digunakan sebagai panduan bagi pewawancara. Informasi yang dikumpulkan dari proses wawancara meliputi cara pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari, adat istiadat dan budaya masyarakat, hubungan masyarakat dengan hutan, dan hubungan masyarakat dengan perusahaan. Setelah data dan informasi tersebut terkumpul lalu dilakukan analisis tentang tingkat ketergantungan masyarakat pada kawasan dan bagaimana pengaruh kawasan terhadap kehidupan sehari-hari dan identitas budaya mereka.

PEMETAAN ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI DAERAH POHUWATO

Gambaran umum wilayah selain mendeskripsikan aspek wilayah kabupaten Pohuwato akan terkait juga informasi data kependudukan, perkembangan dan kepadatan penduduk. Aspek penggunaan lahan, kondisi biofisik dan infrastruktur pendukung akan dibahas untuk mengetahui sektor yang mampu mendukung pengelolaan tambang. Aspek sosial turut mendukung keberadaan biofisik yaitu tentang pendidikan, kesehatan dan agama. Aspek ekonomi yang dibahas adalah pertumbuhan dan indikator ekonomi. Komponen keuangan daerah disajikan juga untuk melihat sejauh mana penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta realisasinya.

A. Keadaan Geografis Wilayah

Kabupaten Pohuwato terletak antara 00.22 - 00.57 Lintang Utara dan 1210.23 - 1220.19 Bujur Timur. Secara geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah) dan Kecamatan Sumalata (Kabupaten Gorontalo Utara) di sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan

dengan Kecamatan Mananggu (Kabupaten Boalemo), di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong (Sulawesi Tengah) dan Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah). Luas wilayah Kabupaten Pohuwato adalah 4.244,31 km² atau 36,77 % dari total luas Provinsi Gorontalo. Pohuwato adalah kabupaten terluas dan mempunyai pulau terbanyak di Provinsi Gorontalo, yaitu 35.86% dari luas total Provinsi Gorontalo.

Curah hujan pada suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus angin. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Catatan curah hujan tahun 2010 berkisar antara 38 mm sampai 378 mm. Keadaan angin pada tahun 2010, yang dipantau stasiun pengamat umumnya hampir merata setiap bulannya, yaitu pada kisaran antara 1-3 meter/detik. Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2010 suhu udara rata-rata pada siang hari berkisar antara 30,6 °C sampai 32,9 °C, sedangkan pada malam hari berkisar antara 23,0 °C sampai 24,9 °C. Kelembaban udara di Kabupaten Pohuwato relatif tinggi. Pada tahun 2010, kelembaban relatif berkisar antara 72 persen (Februari) sampai dengan 89 persen (Maret).

B. Kondisi Pemerintahan Kabupaten Pohuwato

Sejak berdiri pada 25 Februari 2003, Kabupaten Pohuwato telah mengalami 8 pemekaran kecamatan menjadi sebanyak 13 kecamatan dari sebelumnya hanya lima kecamatan. Tercatat delapan penambahan kecamatan yaitu Kecamatan Popayato Timur dan Popayato Barat pemekaran dari Kecamatan Popayato, Kecamatan Wanggarasi dari Kecamatan Lemito, Kecamatan Taluditi dari Kecamatan Randangan, Kecamatan Patilanggio, Duhiadaa dan Buntulia dari Kecamatan Marisa serta Kecamatan Dengilo dari Kecamatan Paguat. Pada awal berdirinya kabupaten ini terdiri dari 73 desa/kelurahan dan 2 UPT, sedangkan saat ini telah berkembang menjadi 103 desa/kelurahan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil daerah di Pohuwato pada tahun 2005 sejumlah 1.429 orang dengan 62 persen diantaranya adalah pegawai perempuan. Pada tahun 2010 jumlah pegawai daerah menjadi 4.006 orang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk instansi vertikal pada tahun 2006 sejumlah 433 orang dan empat tahun kemudian meningkat menjadi 605 orang. Pada pemilu 2009, Partai Golkar menjadi pemenang pemilu di Pohuwato dengan meraih 33,77 persen suara atau sebanyak 21.569 suara dan menempatkan 9 anggotanya duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Pohuwato. Urutan kedua adalah Partai Hati Nurani Rakyat dengan perolehan 5.161 suara atau 8,08 persen, dan urutan ketiga adalah Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan 4.619 suara atau 7,23 persen.

Sebanyak 24 persen anggota DPRD Kab. Pohuwato periode 2009-2014 adalah perempuan. Dengan jumlah ini, syarat keterwakilan perempuan menurut UU No. 10 Tahun 2008 belum terpenuhi. Pembiayaan pembangunan pemerintah daerah Pohuwato pada tahun 2005 sebesar 115 milyar rupiah dan berangsur-angsur meningkat hingga mencapai lebih dari 3 kali lipat atau sebesar 376,7 milyar pada tahun 2010. Komponen terbesar dari realisasi pendapatan daerah pada APBD Pohuwato 2010 bersumber dari Dana Alokasi Umum sebesar 69,3 persen dan Dana Alokasi Khusus sebesar 8,8 persen. Sumbangan PAD terhadap penerimaan daerah masih kecil yaitu hanya 2,9 persen.

C. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

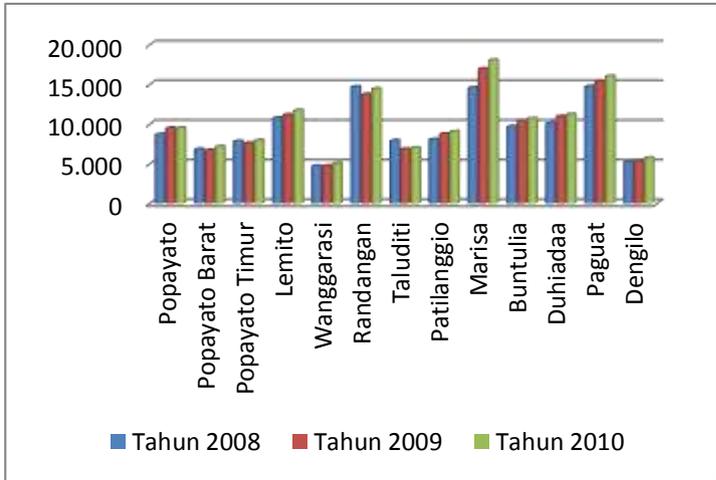
Jumlah penduduk Pohuwato pada tahun 2010 adalah 133.619 jiwa. Penduduk dapat berperan sebagai pelaku dan juga sebagai sasaran dalam proses perencanaan pembangunan oleh karena itu potensi kependudukan tidak bisa diabaikan. Sejak tahun 2005, Kecamatan Marisa memiliki jumlah penduduk terbesar dibanding kecamatan lain, walaupun data dari BPS kabupaten Pohuwato menjelaskan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk sejak tahun 2008, hal tersebut terkait dengan adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Pohuwato.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Kabupaten Pohuwato Berdasarkan Kecamatan tahun 2005 – 2010

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Popayato	21.117	21.998	22.086	8.706	9.485	9.499
2	Barat	-	-	-	6.806	6.682	7.173
3	Timur	-	-	-	7.830	7.586	7.955
4	Lemito	13.809	14.401	14.317	10.755	11.164	11.725
5	Wanggarasi	-	-	-	4.694	4.720	5.027
6	Randangan	12.237	13.071	13.451	14.698	13.752	14.462
7	Taluditi	5.627	6.321	6.813	7.917	6.836	6.985
8	Patilanggio	7.330	8.031	7.636	8.058	8.736	9.043
9	Marisa	30.141	31.816	32.210	14.567	16.962	18.064
10	Buntulia	-	-	-	9.672	10.424	10.688
11	Duhiadaa	-	-	-	10.085	10.960	11.240
12	Paguat	18.283	19.012	19.247	14.750	15.389	16.034
13	Dengilo	-	-	-	5.188	5.353	5.724
Jumlah		108.544	114.650	115.760	123.726	128.049	133.619

Sumber : Pohuwato Dalam Angka tahun 2011

Grafik berikut menjelaskan perkembangan jumlah penduduk pemekaran beberapa kecamatan. Nampak bahwa kecamatan Marisa masih merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling banyak.



Gambar 6. Perkembangan Jumlah Penduduk setelah Pemekaran di Kabupaten Pohuwato

Persebaran dan Kepadatan Penduduk. kepadatan penduduk Pohuwato pada tahun 2010 sebesar 31 jiwa per km² terus mengalami peningkatan dalam kurun 5 tahun terakhir.. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Duhiadaa, yaitu 284 jiwa per km², sedangkan yang terendah adalah Popayato Timur yaitu 11 jiwa per km². Kepadatan penduduk terus meningkat seiring adanya pertumbuhan penduduk sekaligus menjadi penentuan peningkatan permintaan dan penawaran barang dan jasa atau dalam istilah pemasaran sebagai konsumen.

Tabel 6. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan tahun 2005 - 2010

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan
1	Popayato	91,04	9.499	104
2	Popayato Barat	578,98	7.173	12
3	Popayato Timur	722,88	7.955	11
4	Lemito	450,51	11.725	26
5	Wanggarasi	188,08	5.027	27
6	Randangan	85,66	14.462	169
7	Taluditi	449,82	6.985	16
8	Patilanggio	298,82	9.043	30
9	Marisa	159,97	18.064	113
10	Buntulia	375,70	10.688	28
11	Duhiadaa	39,53	11.240	284
12	Paguat	560,93	16.034	29
13	Dengilo	242,39	5.724	24
	2010	4.244,31	133.619	31
	2009	4.224,31	128.049	30
	2008	4.224,31	123.726	29
	2007	4.224,31	115.760	27
	2006	4.224,31	114.650	27
	2005	4.224,31	108.544	26
	2004	4.224,31	106.865	25
	2003	4.224,31	105.593	25

Pada tahun 2010 jumlah penduduk terdiri dari penduduk laki-laki 68.242 dan penduduk perempuan 65.377. Rasio jenis kelamin penduduk Pohnuwo pada adalah 104 Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki di Pohnuwo lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Seks ratio memberikan informasi tentang potensi kependudukan dan tenaga kerja di Kabupaten Pohnuwo terkait potensi pengelolaan sumberdaya alam.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Seks Ratio Berdasar Kecamatan tahun 2003 - 2010

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Seks Ratio
1	Popayato	4.728	4.771	99
2	Popayato Barat	3.686	3.487	106
3	Popayato Timur	4.017	3.938	102
4	Lemito	6.014	5.711	105
5	Wanggarasi	2.621	2.406	109
6	Randangan	7.532	6.930	109
7	Taluditi	3.775	3.210	118
8	Patilanggio	4.733	4.310	110
9	Marisa	9.090	8.974	101
10	Buntulia	5.404	5.284	102
11	Duhiadaa	5.631	5.609	100
12	Paguat	8.093	7.941	102
13	Dengilo	2.918	2.806	104
	2010	68.242	65.377	104
	2009	65.362	62.687	104
	2008	63.548	60.688	105
	2007	58.909	56.250	105
	2006	57.721	56.929	101
	2005	54.536	54.008	101
	2004	54.419	52.446	104
	2003	53.841	51.752	104

Sumber : Pohuwato Dalam Angka tahun 2011

Klasifikasi penduduk berdasarkan struktur umur sangat membantu pemerintah dan dunia usaha untuk menyusun program dan strategi terkait dengan kesiapan umur produktif dan siap bekerja pada suatu wilayah. Penggambaran penduduk menurut struktur umur juga berguna untuk mengetahui jumlah penduduk produktif dan penduduk non produktif. Hal ini akan berpengaruh pada angkatan kerja di suatu wilayah serta tingkat ketergantungan penduduk non produktif pada penduduk produktif.

Penggambaran penduduk menurut struktur umur juga diperlukan untuk perhitungan penyediaan fasilitas sosial dan ekonomi. Tabel berikutnya menjelaskan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur yang menjabarkan.

Tabel 8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pohuwato

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	9.162	8.621	17.783
5-9	7.542	7.521	15.063
10-14	6.660	6.509	13.169
15-19	6.484	6.113	12.597
20-24	5.720	5.942	11.662
25-29	6.435	6.351	12.786
30-34	5.889	6.005	111.894
35-39	5.759	5.113	10.872
40-44	4.183	3.912	8.095
45-49	3.428	2.903	6.331
50-54	2.296	2.251	4.547
55-59	1.877	1.448	3.325
60-64	1.183	1.127	2.310
65+	1.624	1.561	3.185

Sumber : Pohuwato Dalam Angka tahun 2011

D. Aspek Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan yaitu dengan mencanangkan berbagai program seperti program wajib belajar, gerakan nasional orang tua asuh (GNOTA), Bantuan operasional sekolah (BOS) dan

lain-lain. Dengan program ini diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang siap bersaing dalam era globalisasi mendatang. Tabel 8 berikut menjelaskan jumlah sekolah, murid dan guru pada pendidikan dasar 9 tahun dan SLTA. Nampak bahwa tiap kenaikan jenjang pendidikan, jumlah murid berkurang hampir separuhnya terutama dari jenjang SD ke SLTP. Namun murid SD selalu mengalami peningkatan tiap tahun.

Tabel 9. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid Guru Sekolah Dasar/Ibtidaiyah Menurut Kecamatan tahun 2005 sampai 2010

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
1	Popayato	10	1.420	83	17
2	Popayato Barat	7	1.153	58	20
3	Popayato Timur	9	1.124	82	14
4	Lemito	10	1.744	76	23
5	Wanggarasi	8	781	79	10
6	Marisa	11	2.504	216	12
7	Patilanggio	6	1.473	75	20
8	Buntulia	10	1.453	90	16
9	Duhiadaa	8	1.783	99	18
10	Randangan	13	2153	122	18
11	Taluditi	8	825	79	10
12	Paguat	16	2.156	229	9
13	Dengilo	6	917	61	15
	2010/2011	122	19.486	1.349	14
	2009/2010	117	18.455	1.108	17
	2008/2009	119	18.317	1.840	10
	2007/2008	112	17.890	678	26
	2006/2007	105	17.180	689	25
	2005/2006	103	16.403	465	35

Sumber : Pohuwato Dalam Angka tahun 2011

Kecenderungan yang sama juga nampak pada jumlah murid SLTP/Tsanawiyah yang cenderung mengalami peningkatan tiap tahun. Fasilitas pendidikan pun seperti sekolah dan guru mengalami peningkatan sampai hampir 50% dalam 5 tahun terakhir (dari tahun 2005 sampai 2010).

Tabel 10. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid Guru Sekolah Menengah Tingkat Pertama /Tsanawiyah Menurut Kecamatan tahun 2005 sampai 2010.

No.	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
1	Popayato	3	384	18	21
2	Popayato Barat	4	348	16	22
3	Popayato Timur	4	376	21	18
4	Lemito	3	566	28	20
5	Wanggarasi	3	154	17	9
6	Marisa	5	1.115	71	16
7	Patilanggio	4	296	27	11
8	Buntulia	3	429	31	14
9	Duhiadaa	2	438	32	14
10	Randangan	6	908	53	17
11	Taluditi	3	316	29	11
12	Paguat	5	924	69	13
13	Dengilo	2	255	24	11
	2010/2011	47	6.509	436	15
	2009/2010	45	6.531	526	12
	2008/2009	44	6.136	456	13
	2007/2008	42	6.533	497	13
	2006/2007	31	5.076	298	17
	2005/2006	27	4.650	174	27

Sumber : Pohuwato Dalam Angka tahun 2011

Jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan SMU/Aliyah juga mengalami peningkatan dari tahun 2005 sampai 2010 . hal tersebut diimbangi dengan peningkatan fasilitas sekolah dan penambahan jumlah guru pengajar.

Tabel 11. Jumlah Sekolah, Murid, Guru, Rasio Murid Guru Sekolah Menengah Umum/Aliyah/Kejuruan Menurut Kecamatan tahun 2005 sampai 2010

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
1	Popayato	3	844	25	34
2	Popayato Barat	1	41	-	0
3	Popayato Timur	-	-	-	0
4	Lemito	2	401	24	17
5	Wanggarasi	1	25	4	6
6	Marisa	3	1.848	100	18
7	Patilanggio	1	25	3	8
8	Buntulia	2	281	27	10
9	Duhiadaa	1	189	8	24
10	Randangan	3	610	47	13
11	Taluditi	1	177	10	18
12	Paguat	2	593	45	13
13	Dengilo	1	180	11	16
	2010/2011	21	5.214	304	17
	2009/2010	19	4.390	278	16
	2008/2009	14	3.916	267	15
	2007/2008	11	3.525	215	16
	2006/2007	11	2.889	162	18
	2005/2006	11	2.240	85	24

Sumber : Pohuwato Dalam Angka tahun 2011

E. Aspek Kesehatan

Pada tahun 2010, fasilitas kesehatan di Kabupaten Pohuwato terdiri dari satu buah Rumah Sakit, 16 Puskesmas, 28 Puskesmas Pembantu, 11 Puskesmas Keliling, 176 Posyandu dan 29 Polindes. Dilihat dari penyediaan obat-obatan, di Pohuwato pada tahun 2010 terdapat 3 toko obat, dan 7 apotek. Dokter, Bidan dan perawat adalah sumberdaya manusia yang sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan. Dengan bantuan mereka akan sangat menolong dalam penanganan kesehatan masyarakat. Data dari Dinas Kesehatan dan KB Kab. Pohuwato menunjukkan bahwa pada tahun 2010, jumlah dokter, bidan dan perawat masing-masing adalah 13 orang, 78 dan 53 orang.

Tabel 12. Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pohuwato

	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Pusling	Posyandu	Polindes
1	Popayato	0	1	1	1	7	3
2	Barat Popayato	0	1	2	1	11	3
3	Timur	0	1	2	1	7	4
4	Lemito	0	2	2	2	15	4
5	Wanggarsi	0	2	2	0	10	0
6	Marisa	1	1	1	1	10	10
7	Patilanggi	0	1	2	1	13	2
8	Buntulia	0	1	3	0	15	0
9	Duhiadaa	0	1	3	0	15	0
10	Randangan	0	1	3	1	23	0
11	Taluditi	0	2	3	2	10	0
12	Paguat	0	1	2	1	26	2
13	Dengilo	0	1	2	0	14	1
	2010/2011	1	16	28	11	176	29
	2009/2010	1	16	27	7	186	22
	2008/2009	1	10	2	10	188	10
	2007/2008	1	9	24	9	176	-
	2006/2007	1	9	-	9	158	34
	2005/2006	0	7	25	7	73	36

Sumber : Pohuwato Dalam Angka tahun 2011

F. Aspek Penggunaan Lahan

Aspek penggunaan lahan di Kabupaten Pohuwato didominasi oleh lahan kering dan hutan (lebih dari 50%). Pada tahun 2010, luas lahan yang sawah Pohuwato mencapai 3.642 hektar, hanya kurang dari 1% dari jumlah lahan secara keseluruhan. Bila dirinci menurut penggunaannya,

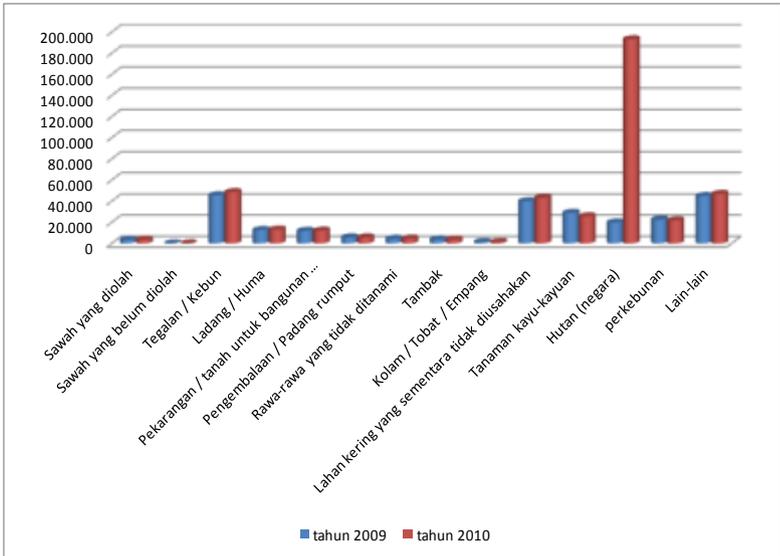
lahan yang paling luas adalah yang digunakan untuk tegal/kebun yaitu sebesar 48.655 hektar. Tabel 12 berikut menjelaskan penggunaan lahan secara umum di Kabupaten Pohuwato.

Tabel 13. Luas Penggunaan Lahan (Hektar) tahun 2009 - 2010

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	
		tahun 2009	tahun 2010
1	Sawah yang diolah	3.404	3.573
2	Sawah yang belum diolah	25	69
3	Tegalan / Kebun	45.548	48.665
4	Ladang / Huma	12.696	13.163
5	Pekarangan / tanah untuk Halaman Sekitar	11.944	12.183
6	Pengembalaan / Padang rumput	5.768	5.793
7	Rawa-rawa yang tidak ditanami	4.443	4.689
8	Tambak	3.890	3.790
9	Kolam / Tobat / Empang	1.460	1.465
10	Lahan kering yang sementara tidak diusahakan	39.943	43.213
11	Tanaman kayu-kayuan	28.959	25.706
12	Hutan (negara)	19.884	193.302
13	Perkebunan	22.709	21.913
14	Lain-lain	44.858	46.917
Jumlah		245.531	424.441

Sumber : Pohuwato Dalam Angka tahun 2011

Gambar 7 berikut menjelaskan perubahan penggunaan lahan yang didominasi untuk hutan negara yang mengalami peningkatan luas sejak 2009.



Gambar 7. Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Pohuwato

Subsektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian. Subsektor ini mencakup tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai. Produksi padi pada tahun 2010 sebesar 32.709 ton. Untuk palawija, produksi jagung di Pohuwato pada tahun 2010 sebesar 338.661 ton.

Tabel 14. Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Pohuwato tahun 2009 dan 2010

No	Komoditi	Produksi (Ton)		Harga (Rp/kg)	
		2009	2010	2009	2010
1	Jagung	310.579	338.661	1.900	2.100
2	Kentang	-	-	-	-
3	Ketela pohon	1.300	841	5.000	5.000
4	Ketela Rambat	858	610	8.000	8.000
5	Padi	29.139	32.709	6.500	7.000
6	Padi Ladang	-	-	-	-

Sumber : Pohuwato Dalam Angka tahun 2011

Sebagian besar lahan di kabupaten Pohuwato adalah lahan kering (bukan sawah), tabel 15 berikut menginformasikan penggunaan lahan bukan sawah.

Tabel 15. Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Kecamatan dan Penggunaannya

No	Kecamatan	Pekarangan	Tegal /Kebun	Ladang /Huma	Pengembangan padang rumput	Rawa tidak ditanami
1	Popayato	819	2.130	954	90	250
2	Popayato Barat	568	1.430	813	325	125
3	Popayato Timur	15	2.613	1.371	4.743	1.536
4	Lemito	448	2.500	1.987	10	5
5	Wanggarasi	219	3.357	150	5	5
6	Marisa	10	1.700	-	-	1
7	Patilanggio	1.353	9.925	682	35	316
8	Buntuli	283	1.891	408	236	63
9	Duhiad	53	595	221	-	72
10	Randan	326	5977	527	35	1811
11	Taluditi	1.263	8.392	1.942	210	210
12	Paguat	285	5.752	2.924	52	45
13	Dengilo	409	2.393	1.184	52	250
Jumlah		6.051	48.655	13.163	5.793	4.689

Dilanjutkan di halaman berikutnya
Lanjutan tabel 15

Kecamatan	tam- bak	Kolam/ Empang	Sementara tdk diusahakan	Hutan Rakyat	Hutan Negara	Perke- bunan	lain-lain	Jumlah
1 Popayato	-	150	848	800	1.500	503	1.060	9.104
2 Popayato Bar.	506	95	12.471	175	22.489	1.175	17.521	57.693
3 Popayato Tim	75	-	4.664	2.025	49.645	1.566	4.035	72.288
4 Lemito	119	-	5.645	8.625	15.994	1.885	3.833	45.051
5 Wanggarasi	294	-	432	110	7.266	1.296	5.663	18.797
6 Marisa	250	-	1.000	-	3.000	1.000	1.605	8.566
7 Patilanggio	625	15	9.385	650	1.497	2.333	2.057	28.883
8 Buntulia	-	3	4.375	10.217	3.892	4.454	11.456	37.278
9 Duhiadaa	50	4	155	-	-	1.087	502	2.820
10 Randangan	1.821	1.143	1349	310	150	1321	1.010	15.780
11 Taluditi	-	-	75	975	28.802	1.230	1.423	44.522
12 Paguat	50	45	1.451	1.069	40.292	2.616	1.512	55.093
13 Dengilo	-	10	1.636	750	14.775	1.447	1.272	23.905
Jumlah	3.790	1.465	43.486	25.706	189.302	21.913	52.949	419.780

Sumber : Pohuwato Dalam Angka tahun 2011

Perkebunan merupakan pilihan untuk memanfaatkan lahan, tabel 16 menjelaskan produksi tanaman perkebunan utama di Kabupaten Pohuwato. Pada tahun 2010, produksi kelapa di Pohuwato sebesar 18.560,54 ton. Produksi kopi 4.23 ton pada tahun 2010.

Tabel 16. Produksi Dan Harga Rata-Rata Produk Tanaman Perkebunan

	Komoditi	Produksi (Ton)		Harga (Rp/kg)	
		2009	2010	2009	2010
1	Kelapa	7.757,73	18.560,54	-	7.500
2	Jambu Mente	28,09	64,41	-	-
3	Kakao	3.478,86	884,24	-	21.000
4	Kopi	3,57	4,23	-	-
5	Kemiri	63,81	44,27	-	-
6	Cengkeh	1,27	3,83	-	-
7	Vanili	-	-	-	-
8	Tembakau	-	-	-	-

Keterangan : harga kelapa dalam bentuk kopra, harga kakao dalam bentuk kakao kering.

Penggunaan lahan yang cukup penting di Kabupaten Pohuwato adalah untuk kehutanan. Menurut kegunaannya, luas hutan di Pohuwato terdiri dari hutan lindung 126.901 hektar, hutan produksi 40.562 hektar, hutan produksi dapat dikonversi 42.852 hektar, hutan produksi terbatas 86.722 hektar, dan cagar alam 39.767 hektar. Penggunaan lahan penggunaan lain (APL) sebesar 61.823 hektar.

Tabel 17. Luas Hutan Menurut Kecamatan dan Kegunaannya di Kabupaten Pohuwato

Kecamatan	APL	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi dpt dikonversi	Hutan Produksi Terbatas	Cagar Alam
Popayato	2.534	17.054	779	917	17.876	14.068
Popayato Barat	2.381	5.505	12.624	1.312	3.649	11.246
Popayato Timur	3	557	0	-	-	-
Lemito	4.641	11.517	13.359	1.776	2.874	-
Wanggarasi	1.885	0	0	159	-	589
Patilangio	3.301	362	391	1.176	127	1.462
Marisa	7.639	11,22	0	318	7.435	7.953
Buntulia	2.943	3.533	1.023	4.422	3.734	-
Duhiadaa	5.904	31.938	1.671	23.447	8.234	-
Randang	4.026	4352	6.688	10,43	3989	-
Taluditi	4	2.016	990	2.208	-	1.618
Paguat	7.867	31.583	576	1.804	26.067	1.317
Dengilo	6.635	18.473	2.461	5.303	12.737	1.514
Kab. Pohuwato	61.823	126.901	40.562	42.852	86.722	39.767

Sumber : Pohuwato Dalam Angka tahun 2011

Selain penggunaan lahan untuk lahan kering dan hutan, terdapat pula potensi perikanan baik perikanan laut maupun darat. Produksi perikanan pada tahun 2010 sebesar 24.616 ton terdiri dari perikanan tangkap 11.771 ton dan perikanan budidaya 12.845 ton. Tabel 18 berikut menjelaskan produksi perikanan menurut kecamatan, dimana

perikanan laut terpusat di kecamatan Marisa dan perikanan budidaya darat di kecamatan Lemito.

Tabel 18. Produksi Perikanan Laut dan Darat Menurut Kecamatan (ton)

No	Kecamatan	Perikanan Laut	Perikanan Darat		Jumlah
			Umum	Budidaya	
1	Popayato	2.031,3	0,0	222,0	2.253,3
2	Popayato Barat	1.372,5	0,0	5.486,5	6.859,0
3	Popayato Timur	358,7	0,0	2,0	360,7
4	Lemito	698,1	0,0	4.210,0	4.908,1
5	Wanggarasi	368,7	0,0	426,4	795,1
6	Marisa	2.380,7	0,0	0,2	2.380,9
7	Patilanggio	194,0	0,0	6,0	200,0
8	Buntulia	-	0,0	3,0	3,0
9	Duhiadaa	618,5	0,0	6,5	625,0
10	Randangan	770,3	0,0	1.053,7	1.824,0
11	Taluditi	-	0,0	11,2	11,2
12	Paguat	2.978,2	0,0	1.397,0	4.375,2
13	Dengilo	-	0,0	20,8	20,8
	2010	11.771,0	0,0	12.845,3	24.616,3
	2009	10.076,0	-	5.553,0	15.629,0
	2008	9.617,0	0,0	4.348,0	13.966,0
	2007	9.469,0	-	4.275,0	12.655,0
	2006	8.032,0	-	723,0	8.755,0
	2005	7.506,0	-	694,0	8.200,0

Sumber : Pohnuato Dalam Angka tahun 2011

Potensi perikanan laut selain digambarkan dengan banyaknya produksi (ton) yang cenderung mengalami peningkatan, namun dari sisi rumah tangga nelayan mengalami fluktuasi. Ada beberapa dugaan penyebabnya yaitu berpindahnya beberapa nelayan ke sistem budidaya udang windu yang ditandai dengan peningkatan produksi hampir 3 kali lipat sejak tahun 2005.

Tabel 19. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Laut dan Darat

No	Kecamatan	Perikanan	Perikanan	Jumlah
		Laut	Darat	
1	Popayato	305	95	400
2	Popayato Barat	204	326	530
3	Popayato Timur	36	80	116
4	Lemito	70	225	295
5	Wanggarasi	80	85	165
6	Marisa	228	39	267
7	Patilanggio	20	31	51
8	Buntulia	-	120	120
9	Duhiadaa	63	152	215
10	Randangan	108	153	261
11	Taluditi	-	20	20
12	Paguat	423	209	632
13	Dengilo	-	130	130
	2010	1.537	1.665	3.202
	2009	1.799	1.270	3.069
	2008	1.785	1.191	2.967
	2007	1.609	971	2.580
	2006	1.607	665	2.272
	2005	1.584	664	2.248

G. Aspek Tenaga Kerja

Pada tahun 2010 Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut aktifitasnya sekitar 61.40 persen penduduk bekerja, dan 2.60 persen diantaranya masih mencari pekerjaan atau menganggur. Partisipasi sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas adalah 5,44 persen.

Tabel 20. Prosentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Kerja Selama Seminggu Yang Lalu

Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu	Persentase
Angkatan Kerja	64,00
Bekerja	61,40
Pengangguran	2,60
Bukan Angkatan Kerja	35,99
Sekolah	5,44
Mengurus Rumah Tangga	24,79
Lainnya	5,76
Jumlah	100,00

Lapangan pekerjaan utama penduduk Pohuwato yang bekerja. Kebanyakan penduduk bekerja di sektor pertanian yaitu 49,60 persen, selebihnya bekerja di Sektor pertambangan 5,94 persen, Industri sejumlah 4,39 persen, Sektor Perdagangan Besar, eceran, Rumah Makan Dan Hotel 14,95 persen dan Sektor Jasa Kemasyarakatan 16,63 persen. 8,20 persen bekerja di sektor lainnya (sektor Listrik air dan gas, sektor konstruksi dan sektor lembaga keuangan).

Tabel 21 Prosentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu		Persentase
No	(1)	(2)
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	49,60
2	Pertambangan dan Penggalian	5,94
3	Industri	4,39
4	Listrik, Gas dan Air Minum	0,13
5	Kontruksi	3,91
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	14,95
7	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	3,69
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,77
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	16,63
Jumlah		100,00

Sumber : Pohuwato Dalam Angka tahun 2011

H. Industri dan Investasi

Kabupaten Pohuwato masih bertumpu pada sektor pertanian sehingga fasilitas pasar dan industri berbasis pertanian masih cukup dominan. Pada tabel 22 menjelaskan banyaknya pasar baik permanen maupun non permanen di kabupaten Pohuwato.

Tabel 22 Banyaknya Pasar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pohuwato

No	Kecamatan <i>Districts</i>	Jenis Pasar		Jumlah Pasar
		Permanen	Non Permanen	
1	Popayato	1	-	1
2	Popayato Barat	1	-	1
3	Popayato Timur	-	2	2
4	Lemito	1	-	1
5	Wanggarasi	1	-	1
6	Marisa	1	-	1
7	Patilanggio	-	1	1
8	Buntulia	-	-	0
9	Duhiadaa	-	1	1
10	Randangan	1	1	2
11	Taluditi	1	1	2
12	Paguat	2	-	2
13	Dengilo	1	-	1
Jumlah		10	6	16

Sumber : Pohuwato Dalam Angka tahun 2011

Pada bidang industri pada tahun 2010 terdapat 178 industri pertanian dan kehutanan, 93 industri logam, mesin, dan kimia, 1562 industri kerajinan rumah tangga, serta 369 aneka industri. Sementara itu di tahun yang sama terdapat investasi asing sebesar Rp 49,77 milyar rupiah. Tabel 23 berikut menjelaskan banyaknya industri kecil dibidang pertanian

Tabel 23. Banyaknya Industri Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Hasil Pertanian Logam, Mesin Kerajinan			Industri Aneka	Jumlah Industri (unit)
		Kehutanan	Kimia	Rumah		
				Tangga		
1	Popayato	9	14	52	19	94
2	Popayato Barat	5	5	35	29	74
3	Popayato Timur	3	8	126	25	162
4	Lemito	15	3	142	29	189
5	Wanggarasi	5	7	18	12	42
6	Marisa	9	10	135	56	210
7	Patilanggio	30	3	147	24	204
8	Buntulia	18	7	105	16	146
9	Duhiadaa	21	9	171	36	237
10	Randangan	24	9	199	37	269
11	Taluditi	15	4	112	33	164
12	Paguat	10	13	269	22	314
13	Dengilo	14	1	51	31	97
Jumlah		178	93	1.562	369	2.202

Sumber : Pohuwato Dalam Angka tahun 2011

Pada tahun 2010, hanya terdapat 4 buah perusahaan besar yang melakukan investasi di Kabupaten Pohuwato yaitu di kecamatan Lemito, Taluditi dan Paguat. sedikitnya peerusahaan besar yang beroperasi membuka peluang investor untuk menanamkan modal. Hal tersebut didukung dengan banyaknya perusahaan menengah dan kecil yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Tabel 24. Banyaknya Perusahaan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Perusahaan Establishments Menengah		Jumlah
		Besar	+ Kecil	
1	Popayato	-	310	310
2	Popayato Barat	-	15	15
3	Popayato Timur	-	959	959
4	Lemito	1	53	54
5	Wanggarasi	-	47	47
6	Marisa	-	100	100
7	Patilanggio	-	186	186
8	Buntulia	-	86	86
9	Duhiadaa	-	12	12
10	Randangan	-	126	126
11	Taluditi	1	17	18
12	Paguat	2	285	287
13	Dengilo	-	15	15
Jumlah		4	2.211	2.215

Sumber : Pohuwato Dalam Angka tahun 2011

I. Transportasi Dan Komunikasi

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Panjang jalan di bawah wewenang Kabupaten Pohuwato pada tahun 2010 mencapai 583.252 meter.

Tabel 25. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kecamatan Dan Jenis Permukaan

Kecamatan	Jenis Permukaan					Jumlah (M)
	ATB/AC-WC	LAPEN	AWCAS/ MACADAM	BETON	TANAH	
	(M)	(M)	(M)	(M)	(M)	
Paguat	23.304	4.940	12.866	831	37.412	80.353
Dengilo	5.222	1.266	15.031	-	1.668	23.187
Marisa	26.056	185	8.630	831	9.497	45.199
Buntulia	7.191	1.100	8.065	-	14.836	31.192
Duhiadaa	15.726	-	3.764	-	18.676	38.166
Patilanggio	3.819	-	9.061	-	4.195	17.075
Randangan	68.488	-	10.757	-	47.908	127.153
Wanggarasi	19.839	-	2.724	1.011	2.147	25.721
Lemito	8.712	-	11.972	575	3.095	24.354
Popayato Timur	11.863	-	7.336	-	16.655	35.854
Popayato	17.760	-	10.688	-	4.229	32.677
Popayato Barat	5.644	-	3.008	5.705	6.346	20.703
Taluditi	27.503	-	25.301	-	28.814	81.618
Jumlah	241.127	7.491	129.203	8.953	195.478	583.252

Sumber : Pohuwato Dalam Angka tahun 2011

Pada tahun 2010 jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat Polres Kabupaten Pohuwato sebanyak 18.345 unit, dimana 17.185 unit diantaranya adalah sepeda motor. Banyaknya kendaraan yang dapat diakses masyarakat mencerminkan semakin mudahnya sarana transportasi di kabupaten Pohuwato

Pos dan Telekomunikasi. Pembangunan pos dan telekomunikasi mencakup jangkauan baik pelayanan maupun peningkatan jasa telekomunikasi dan informasi. Pada tahun 2010, kantor pos di Pohuwato sejumlah 4 unit yang melayani 13 kecamatan, sedangkan untuk jaringan

telekomunikasi, terdapat 362 sambungan telpon pada tahun 2010.

J. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB sebagai salah satu indikator makro ekonomi dihitung untuk melihat gambaran secara umum keadaan ekonomi. PDRB Kabupaten Pohuwato pada tahun 2010 atas dasar harga berlaku sebesar 1 trilyun 206 milyar 33 juta rupiah dan atas harga konstan sebesar 521 milyar 89 juta rupiah.

Tabel 26 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Dirinci Menurut Lapangan Usaha

(juta rupiah)

Lapangan Usaha <i>Industrial Origins</i>	Tahun (Years)		
	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian / Agriculture	204.365	217.520	232.832
1.1. Tanaman bahan makanan / <i>Food crops</i>	101.382	108.876	118.606
1.2. Tanaman Perkebunan / <i>non food crops</i>	39.773	40.304	42.131
1.3. Peternakan / <i>Livestock</i>	19.480	21.169	22.323
1.4. Kehutanan / <i>Forestry</i>	8.466	8.754	8.784
1.5. Perikanan / <i>Fishery</i>	35.266	38.417	409.688
2. Pertambangan / Mining, Quarrying	2.948	3.130	3.229
2.1. Pertambangan non migas / <i>Non oil gas</i>	1.333	1.238	1.263
2.2. Penggalian / <i>Quarrying</i>	1.616	1.892	1.960
3. Industri Pengolahan / Manufacturing	28.992	31.304	3.359
3.1. Industri Migas / <i>Oil and gas</i>	-	-	-
3.2. Industri Non Migas / <i>Non oil and gas</i>	28.992	31.304	33.590
4. Listrik Air / Electricity, Water Supply	4.081	3.958	4.167
4.1. Listrik / <i>Electricity</i>	3.897	3.772	3.976
4.2. Air bersih / <i>Water supply</i>	184	186	191
5. Bangunan / Construction	34.799	38.043	39.855
6. Perdagangan, Hotel & Restoran / Trade	74.590	78.037	83.650
6.1. Perdagangan Besar, Eceran / <i>Wholesale Retail</i>	72.390	75.596	81.024
6.2. Hotel / <i>Hotel</i>	292	314	344
6.3. Restoran / <i>Restaurant</i>	1.909	2.127	2.283
7. Pengangkutan Komunikasi	16.248	16.972	17.853
7.1. Pengangkutan / <i>Transportation</i>	14.405	15.021	15.721
7.1.1. Angkutan Jalan Raya / <i>Road Transport</i>	13.049	13.818	14.489
7.1.2. Angkutan Laut / <i>marine Transport</i>	1.045	868	881
7.1.3. ASDP / <i>ASDP</i>	252	265	279
7.1.4. Penunjang / <i>Services allied to transport</i>	59	70	72
7.2. Komunikasi / <i>Communication</i>	1.843	1.951	2.132
7.2.1. Pos, Telekomunikasi / <i>Post, Communication</i>	1.571	1.671	1.825
7.2.2. Penunjang / <i>Services allied to communication</i>	272	280	306
8. Keuangan / Financial	39.298	41.974	45.860
8.1. Bank / <i>bank</i>	15.893	17.130	19.305
8.2. Lembaga Keuangan Tanpa Bank / <i>Non Bank</i>	5.509	5.677	5.970
8.3. Sewa Bangunan / <i>Building rental</i>	17.467	18.665	20.073
8.4. Jasa Perusahaan / <i>Business services</i>	428	502	512
9. Jasa-jasa / Services	47.238	54.019	60.054
9.1. Pemerintahan Umum / <i>Government Services</i>	39.680	46.120	51.837
9.2. Swasta / <i>Private</i>	7.558	7.899	8.217
9.2.1. Sosial Kemasyarakatan / <i>Social</i>	5.652	5.859	5.988
9.2.2. Hiburan dan Rekreasi / <i>Recreation</i>	301	308	330
9.2.3. Perorangan dan Rumah Tangga / <i>personal</i>	1.606	1.732	1.900
Produk Domestik Regional Bruto	452.559	484.958	521.089
Grass Regional Domestic Product			

Struktur Perekonomian di tandai dengan kontribusi kelompok primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) pada tahun 2010 sebesar 42,96 % lebih rendah jika dibanding dengan kelompok tersier. Seperti diketahui kelompok tersier yang terdiri dari perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa-jasa memberikan sumbangan sebesar 45,82% terhadap PDRB. Sisanya 11,22 % disumbang oleh kelompok sekunder (industri, listrik, gas dan air bersih dan bangunan).

Tabel 27. Distribusi prosentase PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan Usaha

Lapangan Usaha <i>Industrial Origins</i>	Tahun (Years)		
	2008	2009	2010
1. Pertanian / <i>Agriculture</i>	45,16	44,85	44,68
2. Pertambangan / <i>Mining, Quarrying</i>	0,65	0,65	0,62
3. Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	6,41	6,45	6,45
4. Listrik Air / <i>Electricity, Water Supply</i>	0,90	0,82	0,80
5. Bangunan / <i>Construction</i>	7,69	7,84	7,65
6. Perdagangan, Hotel & Restoran / <i>Trade</i>	16,48	16,09	16,05
7. Pengangkutan Komunikasi	3,59	3,50	3,43
8. Keuangan / <i>Financial</i>	8,68	8,66	8,80
9. Jasa-jasa / <i>Services</i>	10,44	11,14	11,52
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Pohuwato Dalam Angka tahun 2011

Laju Pertumbuhan Ekonomi Pohuwato tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 7,45 persen, lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan tahun

2009 yang tumbuh sebesar 7,16 persen. Bahkan pertumbuhan ekonomi tahun 2010 merupakan pertumbuhan tertinggi sejak berdirinya Kabupaten Pohuwato.

Tabel 28. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha <i>Industrial Origins</i>	Tahun (Years)		
	2008	2009	2010
1. Pertanian / <i>Agriculture</i>	5,84	6,44	7,04
2. Pertambangan / <i>Mining, Quarrying</i>	4,31	6,17	3,15
3. Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	14,47	7,97	7,30
4. Listrik Air / <i>Electricity, Water Supply</i>	1,35	3,02	5,28
5. Bangunan / <i>Construction</i>	4,50	9,32	4,76
6. Perdagangan, Hotel & Restoran / <i>Trade</i>	6,06	4,62	7,19
7. Pengangkutan Komunikasi	8,23	4,46	5,19
8. Keuangan / <i>Financial</i>	13,16	6,81	9,26
9. Jasa-jasa / <i>Services</i>	10,90	14,36	11,17
PDRB	7,41	7,16	7,45

Sumber : Pohuwato Dalam Angka tahun 2011

KOMPONEN SOSIAL EKONOMI KELEMBAGAAN

A. Kondisi Sosial Ekonomi Kelembagaan

1. Kondisi Sosial Ekonomi Kelembagaan Kecamatan Taduliti

Kecamatan Taluditi merupakan salah satu dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pohnpei. Kecamatan ini terletak di sebelah utara Kecamatan Randangan. Kecamatan dengan luas wilayah 159,97 km² ini berbatasan dengan Kabupaten Toli-Toli (Sulawesi Tengah) di sebelah utara, Kecamatan Marisa dan Kecamatan Patilanggio di sebelah timur, Kecamatan Randangan di sebelah selatan serta Kecamatan Lemito di sebelah barat. Kecamatan Taluditi terdiri dari 7 Desa yaitu Malango, Pancakarsa I, Pancakarsa II, Kalimas, Mekarti Jaya, Puncak Jaya, dan Tirta Asri dengan ibukota kecamatan terletak di Pancakarsa II. Desa Puncak Jaya merupakan desa terjauh yang berjarak 13 km dari ibukota kecamatan.

Keragaman suku, adat dan agama merupakan cermin dari eksistensi wilayah ini, hal ini nampak pada pemberian nama-nama dusun dan desa yang sebagian diadopsi dari bahasa Jawa karena sebagian besar penduduk di wilayah ini berasal dari Jawa

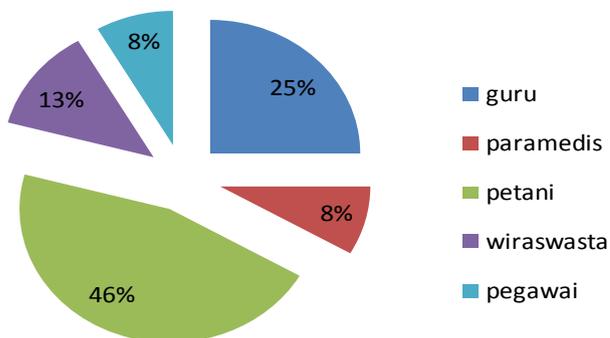
yang mengikuti program transmigrasi. Kepadatan penduduk di Kecamatan Taluditi antara 24 jiwa/km² di kecamatan Makarti sampai 140 jiwa/km² di desa Malango mencerminkan pesatnya permintaan barang dan jasa yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi ekonomi. Rata-rata jumlah anggota keluarga berkisar antara 3 sampai 4 anggota keluarga. Mengindikasikan bahwa program keluarga berencana telah berhasil di kecamatan Taluditi.

Wilayah Kecamatan Taluditi sebagian besar merupakan lereng bukit dan dataran dimana pemukiman penduduk terkonsentrasi di sebelah utara sedang jalan satu-satunya masuk dari arah selatan hampir tidak dijumpai pemukiman penduduk serta masih di dominasi oleh hutan dan semak belukar, sehingga konsentrasi penduduk seperti berada pada satu *enclove*, mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah petani. Tanaman pangan jagung menjadi komoditas unggulan di kecamatan Taluditi, dengan luas panen terluas sekitar 8.700 an hektar disusul dengan tanaman kakao dengan luas sekitar 4.700 ha yang ditanam di kebun-kebun petani maupun di pekarangan rumah (Kecamatan Taluditi Dalam Angka.2011) juga di sepanjang delta sungai Randangan yang hulunya berada di Kecamatan Taluditi.

Profil rumah tangga responden yang sebagian besar pendatang termasuk transmigrasi pada umumnya berprofesi sebagai guru (tenaga pendidik) dan tenaga medis (perawat, bidan) walaupun pekerjaan sampingan tetap bertani. Penduduk lokal umumnya berprofesi dibidang pertanian (petani, perternak dll). Budaya bertani di wilayah ini di dominasi oleh budaya Jawa yang telah berakulturasi dengan budaya lokal seperti bercocok tanam dan panen raya yang terkadang jadi ajang hiburan rakyat. Dan dijadikan media untuk saling mempererat hubungan antar sesama warga yang begitu majemuk. Dijumpai bahwa sebagian tenaga guru di wilayah ini berasal dari berasal dari Jawa (umumnya Jawa Timur dan Bali) merupakan transmigran yang sukses dan telah beranak pinak sehingga mampu menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi, kemudian kembali mengabdikan menjadi pegawai negeri sipil guru di wilayah ini.

Paramedis di wilayah ini seperti dokter masih berstatus kontrak demikian pula tenaga perawat di puskesmas masih cukup minim meskipun sarana kesehatan di ibukota Kecamatan Taluditi sedang dilengkapi untuk menjadi puskesmas rawat inap. Fasilitas kesehatan di tingkat desa yaitu puskesmas pembantu (PUSTU) telah memiliki fasilitas ini yang dilengkapi posyandu untuk menjamin kesehatan ibu dan anak terdapat dimana setiap Desa di Kecamatan Taluditi. Ada pula sebagian masyarakat

yang berprofesi wiraswasta yaitu pedagang barang campuran dan bahan bangunan di toko dan warung dalam menutupi kebutuhan masyarakat disekitar, terutama kebutuhan sehari-hari.

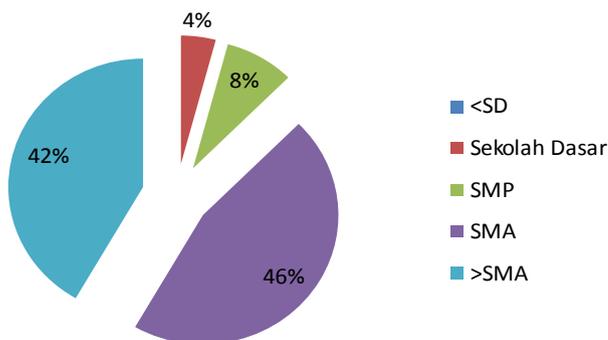


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 9. Komposisi Mata Pencaharian Responden Di Kecamatan Taluditi

Tingkat pendidikan sejumlah responden rumah tangga dan responden pengurus kelembagaan di kecamatan Taluditi menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah berpendidikan sarjana (> SMA) dan setara SMA. Hal tersebut sejalan berkembangnya fasilitas pendidikan dan minat sekolah. Ketersediaan sarana pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan pendidikan. Salah satu permasalahan pendidikan yang diinformasikan oleh responden adalah kurangnya dukungan orang tua kepada anaknya untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi. Dan ada

anggapan pendidikan bukan kebutuhan utama. Hal ini tergambar dengan semakin menurunnya jumlah siswa terutama untuk jenjang SD ke jenjang sekolah menengah pertama. Jarak sekolah yang relatif jauh menjadi salah satu kendala yang terkait dengan biaya transportasi untuk menjangkaunya.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 10. Tingkat Pendidikan Responden Di Di Kecamatan Taluditi

Profil ekonomi masyarakat di kecamatan Taluditi sebagian besar dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada disekitar. Tanaman bahan makanan merupakan komoditas yang wajib di tanam untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat . Luas panen dan produksi padi pada tahun 2010 sebesar 1.022 hektar dengan produksi sebesar 5.651,66 ton. Untuk palawija, produksi jagung di Taluditi pada tahun 2010 sebesar 50.993,72 ton. Sedangkan ubi-ubian seperti ubi kayu

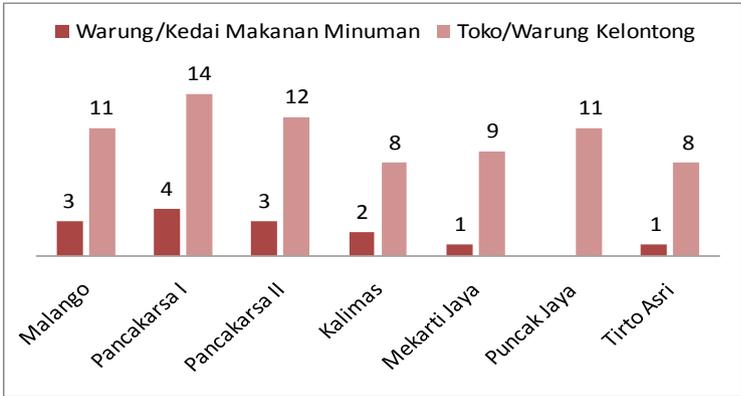
dan ubi jalar belum begitu populer dimasyarakat. Hanya ada beberapa warga yang menanam kedelai, kacang tanah serta kacang hijau. Produksi sayuran juga sangat terbatas, masyarakat biasa mengkonsumsi sayuran yang ada disekitar pekarangan bukan untuk dikomersialkan.

Potensi buah-buahan cukup beragam mulai dari buah yang dominan seperti pisang, jeruk dan rambutan. Hal tersebut menjadi salah satu sumber gizi masyarakat. Komoditas kakao merupakan tanaman primadona warga,terkait karakteristik tanah yang kering. Kakao banyak di tanam dipekarangan rumah. Selain itu kelapa juga menjadi komoditas yang dibutuhkan selain ada beberapa warga yang mulai menanam kopi.

Pemanfaatan sumberdaya alam di Kecamatan Taluditi selain bahan pangan juga dimanfaatkan untuk kerajinan. Di setiap desa terdapat home industry rumah tangga yang memanfaatkan bahan kayu, selain ada kerajinan dari kain di desa Malango. Majunya perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari aktivitas perdagangan di daerah tersebut. Semakin aktif kegiatan perdagangan menunjukkan semakin aktifnya pergerakan perekonomian. Pasar tradisional hanya ada di desa Malango dan Kalimas, hal tersebut menyebabkan peran pedagang perantara antar desa sangat berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hasil produksi pertanian warga untuk bahan pangan umumnya sebagian besar digunakan untuk konsumsi keluarga, hanya sebagian dijual ke pasar melalui tengkulak. Hampir sebagian besar responden petani menjual hasil panen ke pedagang antar desa atau ke tengkulak dengan pola jemput bola di tempat produksi (sawah, ladang atau rumah). Terdapat 2 pasar desa yang terletak di desa Malango dan Kalimas. Keberadaan pasar membantu distribusi barang komoditas pertanian hasil panen petani. Keberadaan warung kelontong dan warung makanan turut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian Kecamatan Taluditi.

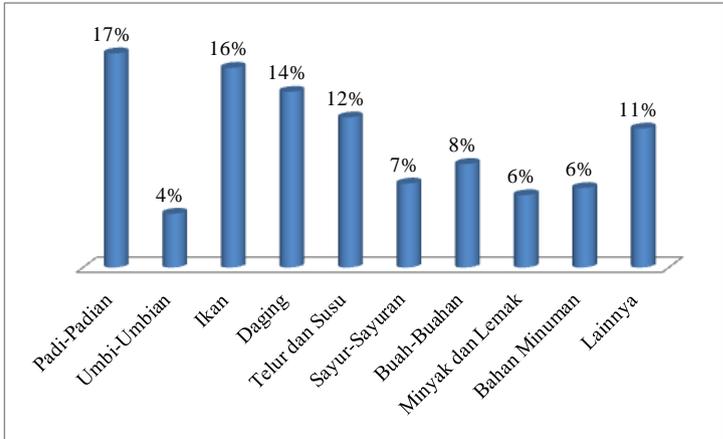
Indikator ekonomi dapat pula dilihat dari peningkatan sektor jasa-jasa seperti adanya pasar, rumah makan dan kedai serta toko-toko masing-masing desa di Kecamatan Taluditi. Desa Pancakarsa I Nampak memiliki banyak toko/warung kelontong yaitu 14%, kedai makanan dan minuman yaitu 4%, selanjutnya diikuti oleh Desa Pancakarsa II memiliki toko/warung kelontong 12% dan kedai makan minuman 3%. Desa yang memiliki sedikit pelayanan sektor jasa toko/warung kelontong dan kedai makanan minuman yaitu Desa Tirto Asri. Indikator dari masing-masing dapat diartikan bahwa kemampuan atau daya beli masyarakat di Desa Panca Karsa I lebih tinggi daripada di desa lainnya seperti Desa Panca Karsa II serta Desa Malango.



Sumber : Kecamatan Taluditi Dalam Angka tahun 2011

Gambar 11. Sebaran Jumlah Warung dan Kedai Makanan di Kecamatan Taluditi

Tingkat kesejahteraan warga selain dilihat dari tingkat pendapatan setiap bulan dapat pula dilihat dari prosentase pengeluaran rumah tangga. Jika melihat dari komposisi pengeluaran rumah tangga responden pada Gambar 12 menunjukkan bahwa karbohidrat beras menjadi pengeluaran terbesar (17%) disusul oleh konsumsi ikan (16%).

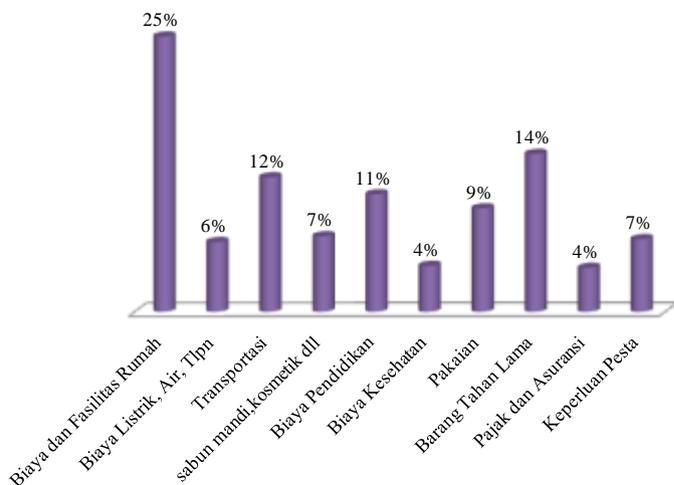


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 12 Komposisi Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Responden di Kecamatan Taluditi

Jika dibandingkan antara pengeluaran pangan dan non pangan, hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata responden membelanjakan 36% pendapatannya untuk pangan dan 64% untuk kebutuhan non pangan. Hal ini menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat bahwa semakin turun prosentase pengeluaran untuk pangan maka pengeluaran untuk barang dan jasa terkait kualitas kehidupan yang lebih baik akan meningkat seperti pendidikan dan kesehatan serta komunikasi. Prosentase pengeluaran non pangan yang cukup besar adalah ubiaya fasilitas rumah (25%), barang tahan lama seperti televisi, telepon selular dan perangkat lain (14%) dan transportasi (12%). Tingginya prosentase pengeluaran non pangan salah satunya disebabkan faktor jarak yang

menyebabkan tingginya biaya-biaya. Gambar 13 berikut menjelaskan prosentase komposisi pengeluaran non pangan responden di kecamatan Taluditi (Lampiran 4).



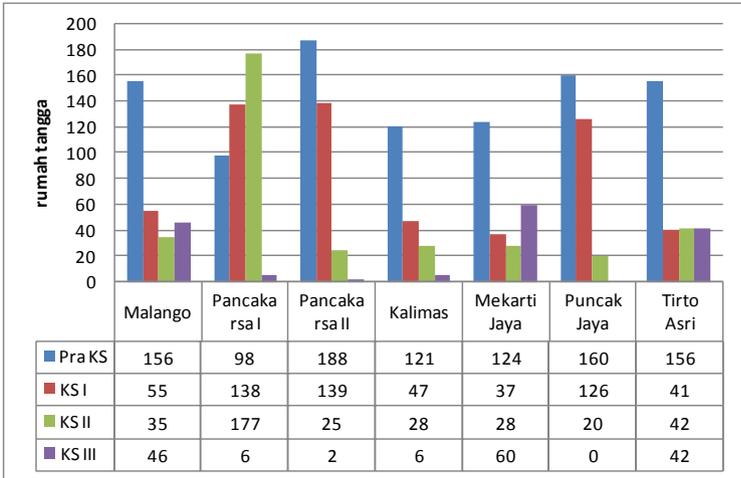
Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 13. Komposisi Pengeluaran Non Pangan Rumah Tangga Responden di Kecamatan Taluditi

Perilaku konsumsi masyarakat terhadap penggunaan komunikasi seperti telepon genggam cukup banyak baik dari kalangan pegawai sampai ketingkat petani. Artinya pola konsumsi masyarakat pada sektor ini cukup meningkat seiring dengan pola konsumsi masyarakat terhadap pangan yang semakin meningkat juga karena barang-barang yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan mudah karena adanya fasilitas

telekomunikasi di wilayah ini. Demikian pula transaksi produk-produk pertanian seperti komoditi jagung, kakao, beras, menjadi lebih ekonomis sehingga disparitas harga dapat terjaga.

Namun demikian masih terdapat keluarga pra sejahtera yang memerlukan bantuan. Oleh karena itu selalu ada bantuan rutin dari pemerintah daerah terkait dengan bantuan beras miskin (raskin) dan bantuan sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk, obat-obat pertanian. Di jumpai bahwa bantuan sarana produksi pertanian ini tidak efektif lagi karena sebagian masyarakat penerima bantuann memperjual belikan bantuan tersebut dengan beberapa alasan antara lain karena bantuan tersebut dapat diperjual belikan *tradable*. Selain itu bantuan tersebut diserahkan bukan pada musim persiapan pengolahan lahan pertanian. Pada gambar berikut nampak bahwa Desa Panca Karsa II sebagai ibukota kecamatan memiliki rumah tangga pra keluarga sejahtera paling banyak dibandingkan desa lainnya. Gambar 14 berikut menjelaskan tentang sebaran jumlah keluarga Pra KS, KS 1 sampai KS III.

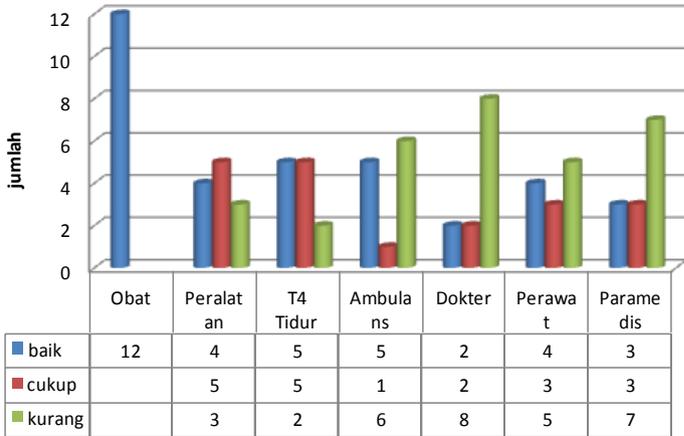


Sumber : Kecamatan Taluditi Dalam Angka tahun 2011
 Gambar 14. Sebaran Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Di Kecamatan Taluditi

Terkait kondisi kesejahteraan masyarakat, seringkali kebijakan pemerintah di sektor pertanian sudah kurang relevan bagi kebutuhan warga sehingga perlu upaya lain misalnya lebih memberikan insentif terhadap harga sarana produksi pertanian dan juga menetapkan harga dasar produk pertanian yang mengedepankan kepentingan petani. Hal ini akan lebih memberikan motivasi dan mendidik masyarakat petani untuk tidak selamanya tergantung pada bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan usaha tani.

Kebijakan di bidang kesehatan merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup

warga. Hasil wawancara dengan responden rumah tangga menyebutkan bahwa belum ada penyakit menular berbahaya yang menjangkiti warga. Umumnya penyakit yang diderita anak-anak adalah batuk, panas dan diare. Sedangkan penyakit regeneratif seperti sakit jantung, asam urat, darah tinggi hampir menjadi cirri khas penyakit kaum lelaki dan perempuan di sekitar desa Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato. Masalah balita kurang gizi juga pernah terjadi di beberapa wilayah. Gambar 15 berikut menjelaskan persepsi responden di Kecamatan Taluditi tentang sarana kesehatan yang ada. Nampak bahwa keberadaan tenaga dokter merupakan hal utama yang dibutuhkan warga selain paramedis lainnya. Sedangkan fasilitas obat dinyatakan sudah cukup baik.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 15. Persepsi Responden Tentang Sarana Kesehatan Kecamatan Taluditi

Kondisi kesehatan masyarakat yang demikian menuntut dukungan peran aktif para medis dan keberadaan sarana dan prasarana kesehatan. Umumnya masyarakat sudah banyak mengetahui adanya fasilitas puskesmas, pustu (puskesmas pembantu) dan pusling (puskesmas keliling) serta posyandu. Fasilitas kesehatan di Taluditi terdiri dari 2 Puskesmas, 4 Puskesmas Pembantu, 2 Puskesmas Keliling, dan 11 Posyandu. Fasilitas tersebut dirasakan masih belum memadai dibandingkan dengan rasio jumlah penduduk.

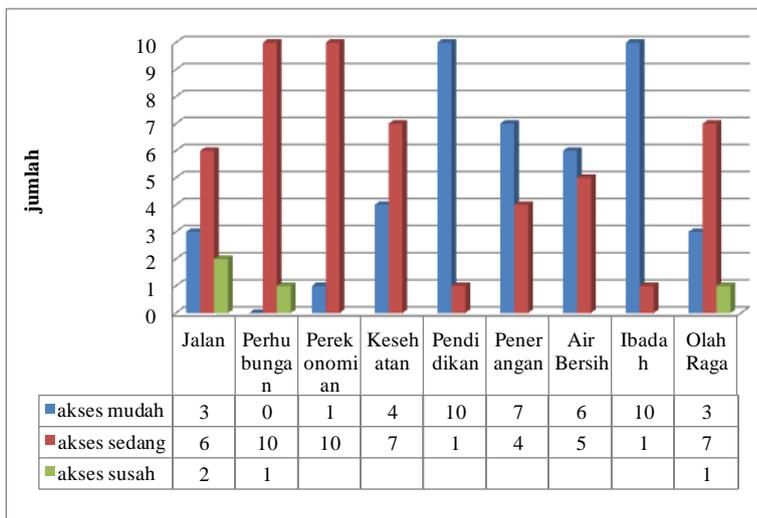
Keberadaan infrastruktur pendukung lain juga akan mendukung perekonomian masyarakat. Persepsi responden tentang keberadaan infrastruktur sangat beragam. Misalnya persepsi

tentang kondisi jalan umumnya responden memberikan indikator “buruk”. Dengan semakin meningkatkan pembangunan dan mobilitas penduduk, maka pembangunan fasilitas jalan yang baik dan mudah diakses menjadi kebutuhan utama. Pada tahun 2010, sebagian besar permukaan jalan antar desa di Kecamatan Taluditi adalah jenis jalan yang diperkeras.

Dijumpai sebagian sarana jalan telah diaspal seperti jalan menuju ke ibu kota kecamatan namun sebagian besar kebutuhan utama public ini masih dalam keadaan rusak karena perawatan jalan kurang baik dan tidak didukung oleh drainase yang baik sehingga disaat musim penghujan terjadi genangan air yang mempercepat aspal jalan terbongkar. Selain itu sebagian sarana jalan dibangun di kaki gunung yang tidak memiliki tutupan hutan yang baik, sehingga terjadi penurunan sedimen dari gunung yang menutupi badan jalan..

Pendapat tentang fasilitas terkait perekonomian, sebagian besar menilai “sedang” ada pula yang menilai “buruk” terkait keterbatasan jumlah sarana dibandingkan dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan. Pembangunan fasilitas perekonomian seperti pasar dan warung kedai memiliki kaitan erat terhadap ketersediaan sarana jalan. Dua aspek ini saling menunjang karena konsumen atau masyarakat tidak akan dapat memanfaatkan fasilitas perekonomian bila akses jalan menuju ke

pasar kondisinya buruk. Hal yang cukup menggembirakan adalah bahwa fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih sudah dinilai cukup baik.



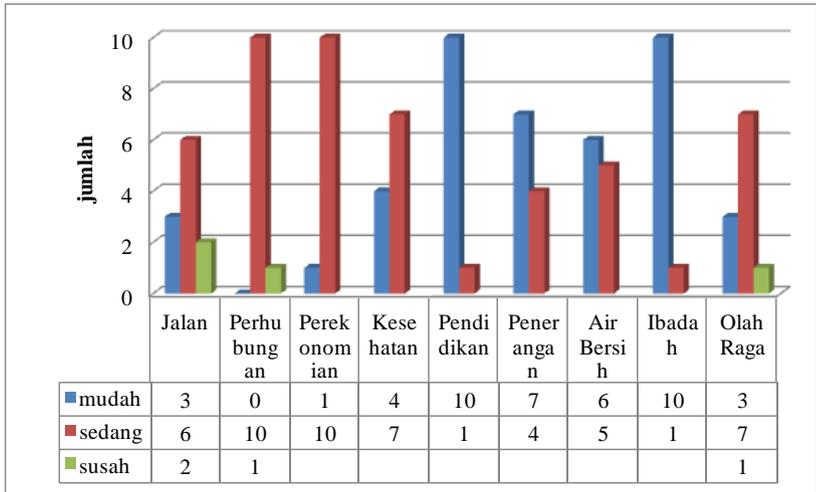
Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 16. Persepsi Responden Tentang Kondisi Infrastruktur di Kecamatan Taluditi

Kondisi sarana prasarana akan terkait dengan akses terhadap sarana prasarana tersebut. Umumnya responden memberikan respon dengan indikator “sedang” untuk akses infrastruktur di Kecamatan Taluditi. Namun terkait fasilitas jalan, ada responden yang menjawab akses jalan menuju Taluditi perlu diperbaiki terkait kemudahan dalam menjangkau. Urgensi dari sarana dan prasarana ini menjadi lebih penting bila dikaitkan dengan

prevernsi masyarakat terhadap aksesibilitas sarana dan prasarana dengan memosisikan aspek ini pada kategori sedang dan cenderung tidak baik atau susah karena komponen sarana jalan, perhubungan dan olahraga yang mendapat persepsi susah sedangkan yang lain masuk kategori sedang dan baik.

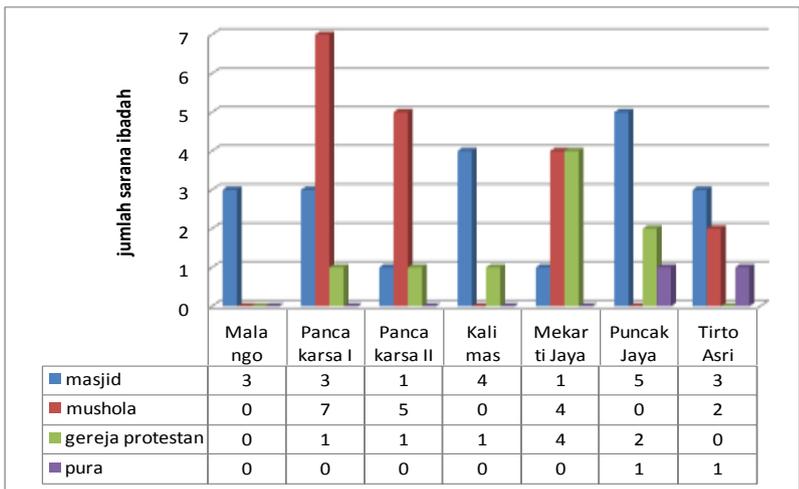
Sarana jalan dan perhubungan merupakan urat nadi masyarakat untuk mengkases sarana lain seperti sarana kesehatan dan pendidikan, oleh karena itu kedua komponen ini sebaiknya dapat diprioritaskan dalam pembangunan, meskipun preferensi masyarakat terhadap sarana pendidikan dan kesehatan baik dan sedang namun efektifitas dari ketersediaan sarana ini akan hilang jika saran utama yaitu jalan dan perhubungan belum dibangun dengan baik.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012
 Gambar 17. Persepsi Responden Tentang Aksesibilitas Ke Sarana Infrastruktur di Kecamatan Taluditi

Masyarakat di Kecamatan Taluditi yang ditandai dengan keberagaman suku dan agama, hal ini nampak terlihat dari keberagaman fasilitas ibadah, pada tahun 2010 terdapat 20 masjid, 18 mushola, 9 gereja protestan, dan 2 pura. Masyarakat hidup berdampingan dan saling menolong. Berdasarkan persepsi tentang kelembagaan yang berperan dalam kehidupan sosial masyarakat adalah adanya majlis ta'lim yang tersebar di setiap desa. Bila dibanding dengan jumlah sarana ibadah gereja protestan di Kecamatan lain di Kabupaten Pohuwato maka Kecamatan Taluditi yang memiliki sarana ibadah umat kristiani. Demikian pula sarana

ibadah bagi umat Hindu yaitu Pura, dijumpai bahwa masyarakat yang memeluk agama Hindu di wilayah ini memiliki keunikan karena disetiap rumah mereka terdapat sarana ibadah yang dibangun sendiri, semakin tinggi status sosial atau derajat perekonomian umat hindu akan nampak pada bangunan sarana ibadah disetiap rumah yang masing-masing bangun. Hal ini semakin menambah kemajemukan di wilayah ini . Hal ini nampak pada Gambar grafik sarana ibadah di wilayah ini menurut data biro pusat statistik setempat.



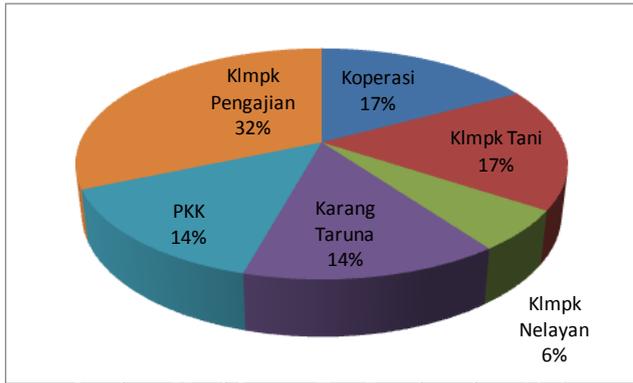
Sumber : Kecamatan Taluditi Dalam Angka tahun 2011

Gambar 18. Sebaran Jumlah Sarana Ibadah Di Kecamatan Taluditi

Untuk mendukung interaksi masyarakat di Kecamatan Taluditi agar tetap harmonis maka perlu adanya wadah atau lembaga sosial kemasyarakatan

.Hal ini penting untuk membangun proses penyadaran melalui bimbingan dan pengarahan serta orientasi setiap organisasi kemasyarakatan yang merupakan perwujudan dari pola kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana posisi lembaga adat, lembaga kegiatan keagamaan, lembaga kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat menjadi ujung tombak pemerintah untuk membangun rasa kebersamaan antara agama, dan seagama tetap terpelihara dengan baik. Namun dijumpai di wilayah ini sarana ibadah masih cukup minim akan sarana pendukung seperti kamar mandi dan jamban serta sarana pendukung seperti pagar dan halaman sarana ibadah, termasuk pendukung lainnya seperti perpustakaan masjid.

Terdapat 25 kelompok majelis ta'lim dengan jumlah terbanyak di desa pancakarsa I. Kegiatan utama yang dilakukan adalah yasinan, tiba'an serta berbagi informasi. Masyarakat masih memelihara adat yang berkembang seperti acara mauludan, isra' mi'raj dan gotong royong. Faktor kepercayaan, keterkaitan antar komponen masyarakat menjadi salah satu dasar terciptanya harmonisasi antar warga. Kelembagaan yang diikuti warga seringkali mengakomodasi berbagai kepentingan seperti beradaptasi dengan kearifan lokal, dengan budaya bahkan turut melestarikan lingkungan sekitar. Hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kriminalitas seperti perampokan, pencurian dan kejahatan lainnya.

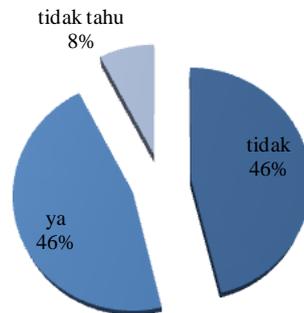


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 19. Persepsi Responden Tentang Lembaga yang Berperan dalam Kehidupan Sosial Ekonomi di Kecamatan Taluditi

Terkait dengan aktivitas pengelolaan tambang, sebagian besar responden mengaku tidak mengetahui adanya aktivitas tambang. Umumnya mereka mengetahui adanya aktivitas tambang di kecamatan Marisa dan popayato. Hal ini memberikan arti bahwa masyarakat belum memiliki akses informasi terhadap pengelolaan pertambangan selama ini, meskipun dari aspek geografis Kecamatan Taluditi akan menjadi bagian dari penerima dampak langsung terhadap pengelolaan tambang di wilayah ini. Disisi lain masyarakat di wilayah ini pada umumnya bermata pencaharian petani yang didukung oleh ketersediaan lahan yang masih cukup sehingga desakan ekonomi dan pilihan perilaku ekonomi masyarakat masih lebih bersifat statis.

Dijumpai dilokasi bahwa sosialisasi atau advokasi terhadap masyarakat terkait dengan pengelolaan pertambangan sampai saat ini belum ada, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh perusahaan dan lembaga non-pemerintah, sehingga wajarlah bila persepsi masyarakat cenderung tidak memahami tentang usaha pertambangan di wilayah ini. Demikian juga terkait konflik antara penambang tradisional dan perusahaan atau pemerintah, umumnya mereka hanya mendengar kejadian konflik di daerah lain karena tidak ada satupun dijumpai masyarakat di kecamatan Taluditi sebagai pelaku pertambangan tradisional. Adapun saran responden terhadap konflik kelembagaan antar pemerintah, masyarakat dan pengusaha pertambangan yaitu sebagian besar responden menyarankan perlu adanya musyawarah dengan pemangku kepentingan terkait pengelolaan tambang.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

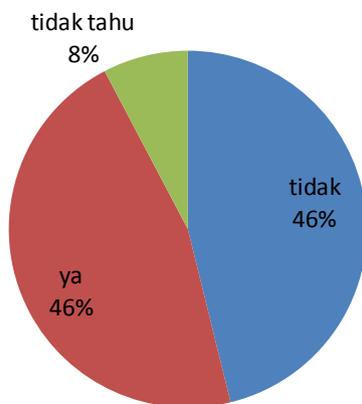
Gambar 20. Persepsi Tentang Potensi Konflik Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pengelolaan Pertambangan di Kecamatan Taluditi

Resolusi konflik yang di tawarkan beberapa unsur kepala desa dan lembaga di desa adalah dengan melibatkan lembaga lokal dengan cara musyawarah sesuai dengan visi organisasi. Kepemimpinan (*leadership*) lembaga lokal akan menentukan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Gambar berikut menjelaskan persepsi responden dari unsur lembaga tentang potensi konflik terkait dengan konsesi PT Gorontalo Sejahtera Mining pada. Umumnya responden kurang begitu mengetahui keberadaan perusahaan tambang ini. sehingga persepsi yang timbul adalah sebagian menganggap perlu ada perusahaan yang jelas mengelola tambang dengan melibatkan masyarakat lokal. Ada pula yang berpendapat bahwa tidak perlu ada perusahaan, karena masyarakat sudah bisa mengelola sendiri.

Peluang konflik yang ditimbulkan akibat pemanfaatan sumberdaya tambang oleh perusahaan cukup terbuka dimana responden yang menjawab konsesi pertambangan PT Gorontalo Sejahtera Mining menimbulkan konflik yaitu 46%, namun peluang konflik ini seimbang dengan persepsi responden yang menjawab tidak berpeluang menimbulkan konflik juga, yaitu 46% . Potensi konflik akibat pemanfaatan sumberdaya tambang untuk wilayah ini nampak tidak dipengaruhi oleh isu-isu politik, faktor heterogenitas masyarakat menjadi perekat dan menjadi penengah dari timbulnya isu politik

tersebut dan juga didukung budaya kekekrabatan antar sesama yang cukup kuat.

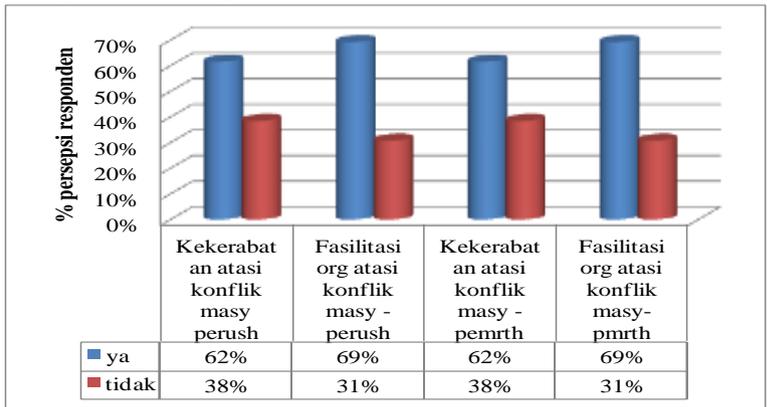
Hal ini dapat dibuktikan di saat kami melakukan survey dan wawancara di wilayah ini menjelang buka puasa dimana Camat Taluditi mengundang seluruh lapisan masyarakat ke rumah dinas camat karena Bupati Pohuwato akan terjadwal untuk melakukan kunjungan. Nampak seluruh masyarakat yang hadir cukup banyak dan berasal dari berbagai macam suku, seperti suku Jawa, Manado, Bali dan yang paling banyak yaitu umat muslim di wilayah ini. Seluruh hadirin mendengarkan arahan Bupati Pohuwato dan ceramah agama menjelang buka puasa dengan penuh hikmah.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 21. Persepsi Responden Kelembagaan Tentang Potensi Konflik Pengelolaan Pertambangan oleh PT GSM

Hubungan kekerabatan ini dapat menciptakan suasana kondusif karena terbangun sifat-sifat yang arif, jujur dan kepercayaan dikalangan masyarakat yang merupakan modal sosial (*social capital*). Hal ini menjadi aspek penting dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam secara lestari melalui pengembangan investasi di Kecamatan Taluditi. Pada gambar 22 berikut menjelaskan persepsi responden jika terjadi konflik pengelolaan sumberdaya tambang, dikatakan bahwa resolusi konflik antara masyarakat dan perusahaan dikatakan 62% responden dapat diatasi dengan kekerabatan dan 69% responden mengatakan bahwa mediasi organisasi kemasyarakatan dapat membantu. Kekerabatan dan fasilitasi organisasi juga dapat membantu jika terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 22. Persepsi Responden Tentang Keterkaitan Organisasi Kemasyarakatan dengan Aktivitas PT Gorontalo Sejahtera Mining di Taluditi

2. Kondisi Sosial Ekonomi Kelembagaan Kecamatan Buntulia

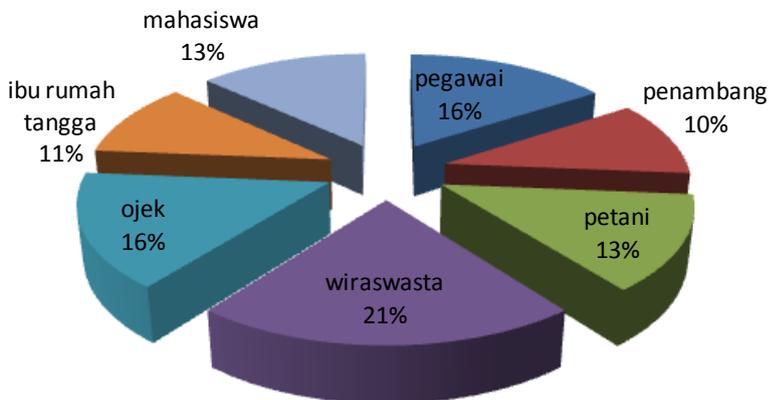
Kecamatan Buntulia hanya berjarak 7 km dari ibukota kabupaten Pohuwato, merupakan kecamatan pecahan kecamatan Marisa. Kecamatan dengan luas wilayah 376,54 km² ini berbatasan dengan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah di sebelah utara, Kecamatan Marisa di sebelah timur, Kecamatan Duhiadaa di sebelah selatan serta Kecamatan Patilanggio di sebelah barat. Kecamatan Buntulia terdiri dari 7 desa yaitu Buntulia Utara sebagai ibukota kecamatan, Taluduyunu, Hulawa, Buntulia Tengah, Karya Indah, Sipatana dan Taluduyunu Utara dengan ibukota kecamatan terletak di Buntulia Utara. Buntulia memiliki 23 dusun. Desa yang memiliki luas terbesar adalah desa Hulawa dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Desa Sipatana. Desa Huluwa merupakan salah satu pintu masuk ke daerah pertambangan rakyat yang merupakan bekas penelitian eksplorasi perusahaan-perusahaan pertambangan seperti PT BHP dan PT Newcrease yang melakukan operasi sejak tahun 1971 termasuk di Gunung Pani di Kabupaten Pohuwato yang saat itu masih bagian dari Kabupaten Gorontalo Provinsi Sulawesi Utara.

Kepadatan penduduk di suatu wilayah menjadi salah satu indikator kemajuan perekonomian. Desa Sipatana yang merupakan desa dengan luas terkecil memiliki kepadatan yang relatif tinggi mencapai

398 jiwa/km², berbeda dengan desa Hulawa dengan jumlah penduduk 1.618 jiwa menempati lahan seluas 236,54 km², sehingga kepadatan penduduknya hanya 7 jiwa/km². Wilayah Kecamatan Buntulia sebagian besar merupakan daerah dataran, perbukitan dan daerah Aliran Sungai, yaitu sungai marisa yang hulunya berada di desa Hulawa sehingga mata pencaharian utama penduduk selain bertani adalah berdagang dan mengelola tambang.

Hal ini tercermin dari distribusi mata pencaharian responden pada gambar 23 yang relatif merata. Mata pencaharian utama sebagai wiraswasta (berdagang dan bidang jasa) menjadi pekerjaan sebagian besar responden, selain berprofesi sebagai petani dan penambang (Lampiran5). Adapun jenis pertambangan yang banyak dijumpai di sepanjang delta Sungai Marisa yaitu pertambangan emas tradisional dan pertambangan pasir (galian C). khusus untuk Jenis kegiatan pertambangan Emas tradisional nyaris sudah tidak dapat dikatakan lagi sebagai pertambangan tradisional karena telah menggunakan teknologi modern seperti mesin Diesel 2 PK yang digunakan untuk menyedot air dari sungai dan digunakan untuk menyemprot batuan yang menurut pengalaman para penambang memiliki potensi emas yang dikenal dengan nama (*Rap*). Selain itu teknis penambangan ini telah berakibat pada semakin keruhnya air Sungai Marisa

yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengairi persawahan, kolam ikan, dan kegiatan sosial lain, bahkan disanyalir air Sungai Marisa ini telah tercemar oleh logam berat seperti Cianida

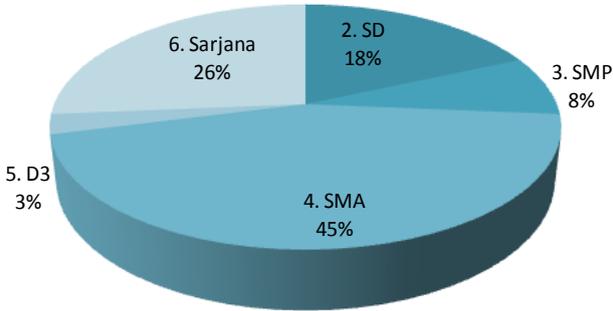


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012
 Gambar 23. Komposisi Mata Pencaharian Responden Rumah Tangga di Buntulia

Aspek sosial seperti pendidikan di Kecamatan Buntulia dilihat dari tingkat pendidikan responden yaitu sejumlah responden rumah tangga dan responden pengurus kelembagaan menunjukkan bahwa hampir 45% berpendidikan SMA dan 26% berpendidikan sarjana, hal tersebut mencerminkan persepsi masyarakat terhadap pendidikan yang relatif baik. Ketersediaan sarana pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan pendidikan. Fasilitas pendidikan dasar seperti taman kanak-kanak sudah

terdapat di 5 desa di kecamatan Buntulia, hanya desa Hulawa dan Karya Indah yang belum ada Taman Kanak-Kanak, sedangkan fasilitas sekolah dasar walaupun tidak tersebar merata di tiap desa sudah terdapat 10 buah dan SMP sejumlah 2 buah. Sekolah menengah atas lokasinya di desa Sipatana, berjumlah 1 buah.

Komponen pendidikan penting bila dikaitkan dengan pengembangan investasi seperti sektor pertambangan, artinya kesiapan dan wawasan masyarakat dalam menyerap informasi tidak mengalami proses yang panjang karena ditunjang oleh tingkat pendidikan masyarakat yang memadai. Namun disisi lain bahwa investasi disektor pertambangan akan menimbulkan reaksi atau respon dari masyarakat bila proses pengembangan investasi disektor ini tidak melibatkan masyarakat secara langsung misalnya direkrut untuk menjadi tenaga kerja maupun diarahkan untuk menjadi bagian proses pengambilan keputusan ditingkat operasional dilapangan terutama berkaitan dengan kerjasama dengan para pihak secara melembaga.

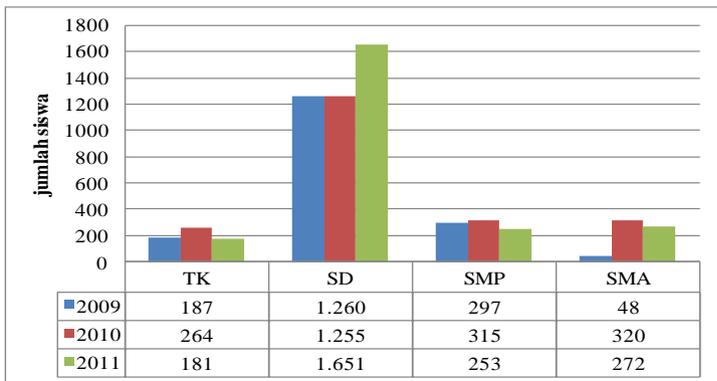


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012
 Gambar 24. Tingkat Pendidikan Responden Di Kecamatan Buntulia

Bila dibanding dengan data statistik maka nampak tingkat pendidikan di Kecamatan Buntulia masih didominasi oleh pendidikan Sekolah Dasar. Jumlah siswa di sekolah dasar mencapai 1260 siswa tahun 2009, dan pada tahun 2010 jumlah siswa mengalami penurunan yaitu 1255, sedang tahun 2011 sedikit meningkat yaitu 1265 siswa. Jumlah siswa sekolah dasar memiliki disparitas cukup jauh bila dibanding dengan jumlah siswa di Sekolah Menengah Pertama, dimana pada tahun 2009 yaitu 290 siswa, tahun 2010 yaitu 315 siswa dan tahun 2011 mencapai 253 siswa. Angka partisipasi siswa sekolah dasar untuk melanjutkan ke pendidikan ditingkat sekolah menengah sangat jauh yaitu sekitar 15% dari setiap total siswa SD yang melanjutkan pendidikan setiap tahun.

Secara umum kondisi pendidikan di Kecamatan Buntulia ditandai dengan banyaknya anak putus sekolah, salah satunya daya tariknya

adalah bekerja di pertambangan tradisional. Pada gambar grafik pada gambar 25 nampak adanya penurunan yang signifikan siswa sekolah dasar. Hanya sekitar 15 sampai 25 persen siswa Sekolah Dasar yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Di jumpai dilokasi penelitian, penulis menemukan anak-nak dibawah umur 12 tahun telah bekerja sebagai buruh kasar di pertambangan tradisional sepanjang delta sungai marisa sampai ke hulu sungai yang hampi setiap jarak 100 meter terdapat aktivitas pertambangan tradisional. Adapula yang menjadi tenaga buruh antar barang yang dikenal denga nama (kijang) dari pertigaan Dusun Ilota sampai ke puncak Ilota yang ditempuh perjalanan sekitar 3 jam dari kaki bukit Dusun Ilota.



Sumber : Kecamatan Butulia Dalam Angka tahun 2009,2010 dan 2011

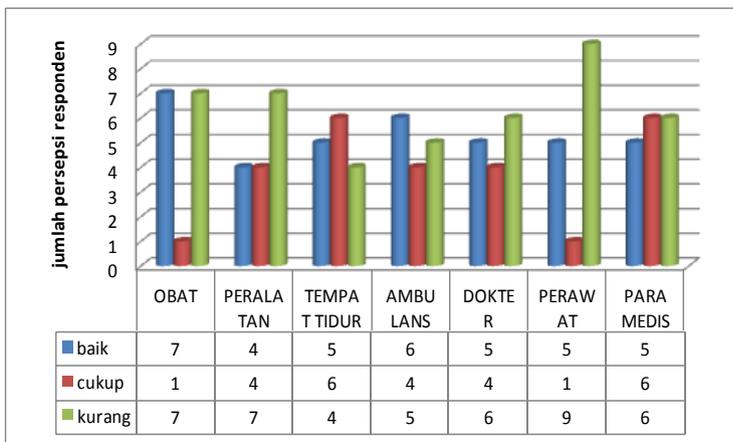
Gambar 25. Jumlah Siswa Sekolah di Kecamatan Buntulia tahun 2009 - 2011

Fasilitas dasar yang penting selain pendidikan adalah aspek kesehatan. Masalah kesehatan yang spesifik untuk anak-anak yang penting diperhatikan di Kecamatan Buntulia adalah masalah kecukupan gizi. Program kecukupan gizi terutama bagi balita dapat dititipkan melalui kegiatan posyandu yang ada pada tiap masing-masing desa. Masalah kesehatan bagi pria dewasa masih bersifat umum seperti masalah lambung, demam dan flu. Fasilitas pusling (puskesmas keliling) menjadi salah satu alternatif pengobatan karena lokasi puskesmas hanya ada di desa Taluduyunu Utara. Masalah kesehatan bagi perempuan umumnya tidak jauh berbeda, namun yang spesifik terkait ibu hamil dan melahirkan. Jumlah bidan yang terbatas hanya 5 orang menjadi salah satu kendala. Namun adanya dukun bayi terlatih yang tersebar pada masing-masing desa ditambah dengan dukun bayi tidak terlatih yang jumlahnya 18 orang diharapkan mampu mengatasi permasalahan spesifik ibu hamil dan melahirkan.

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Buntulia terdiri dari 1 Puskesmas, 3 Puskesmas Pembantu, 7 Puskesmas keliling dan 11 Posyandu. Pada tahun 2010, jumlah dokter, bidan dan perawat berturut-turut adalah 3 Dokter, 5 Bidan dan 4 Perawat. Gambar 25 berikut adalah persepsi responden tentang sarana prasarana kesehatan di kecamatan Buntulia. Umumnya masyarakat merasakan bahwa banyak fasilitas kesehatan yang belum optimal

(ditunjukkan dengan grafik batang warna hijau). Keterbatasan fasilitas obat, peralatan, tenaga paramedik menjadi alasan utama persepsi kurang baik untuk sarana prasarana kesehatan.

Persepsi kurang baik terhadap sarana dari responden adalah bukti bahwa aspek kesehatan masih belum mamadai di wilayah ini. Meskipun wilayah ini tidak begitu jauh dari Ibu Kota Kabupaten Pohuwato namun kenyataan dijumpi masih banyak yang menggunakan sumber air dari sungai yang digunakan untuk mencuci pakaian, mandi dan buang hajat sekalipun air ini telah berubah warna (keruh) akibat kegiatan pertambangan tradisional dengan model semprot.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

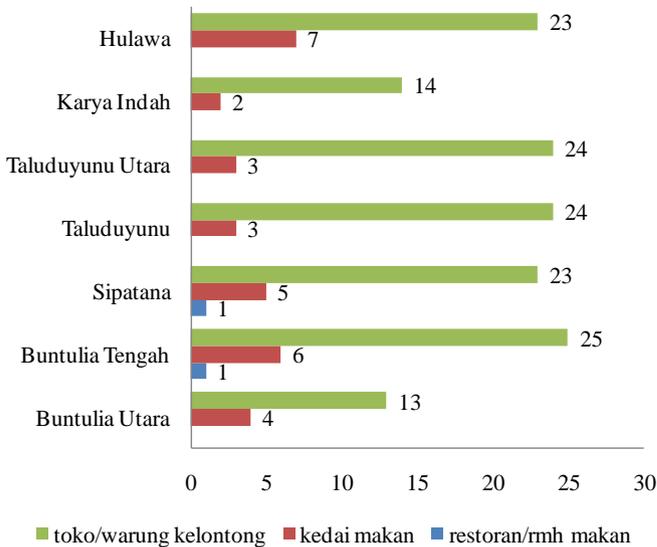
Gambar 26. Persepsi Responden di Kecamatan Buntulia Tentang Kondisi Sarana Prasarana Kesehatan

Dari sisi potensi pertanian, kondisi bentang alam perbukitan dan daerah aliran sungai yang dicirikan dengan lahan kering merupakan lahan potensial untuk tanaman jagung. Pada tahun 2011 terdapat 2.134 hektar lahan tanaman jagung dengan produksi sekitar 11.160 ton. Potensi tanaman jagung belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat, terbukti dengan minimnya agroindustri berbasis jagung di Kecamatan Buntulia, tercatat hanya terdapat 32 unit penggilingan jagung. Hal yang sama terjadi pada komoditas kelapa rakyat seluas sekitar 930,30 hektar dan produksi sebanyak 997,50 ton, sementara hanya di dimanfaatkan untuk keperluan lokal. Terdapat 4 unit pengrajin berbahan kayu yang memanfaatkan kayu kelapa untuk kerajinan rumah tangga, lokasinya tersebar di desa Bontulia Utara, Sipatana dan Taluduyunu.

Potensi buah-buahan cukup beragam di Kecamatan Buntulia, sesuai dengan karakteristik wilayah perbukitan, maka komoditas buah yang potensial adalah pisang dan mangga. Potensi pisang sebenarnya bisa dioptimalkan dengan pemberdayaan ibu-ibu dan remaja putri melalui kegiatan home industry (usaha kecil) bidang makanan. Informasi data dari Kecamatan Buntulia, menyebutkan bahwa belum ada usaha kecil bidang makanan yang didaftarkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Model ini dapat menjadi pekerjaan alternatif bagi kaum wanita agar mereka tidak mengikuti pola pekerjaan tambang yang

cukup beresiko bagi kaum wanita. Dijumpai ada seorang ibu yang menjadi buruh mengambil batu sungai (*rap*) dengan berendam di air sungai sudah keruh sampai 10 jam per hari dengan di dampingi oleh seorang anak laki-laki berumur 10 tahun yang telah putus sekolah.

Hasil produksi pertanian yang diusahakan oleh masyarakat umumnya digunakan untuk konsumsi sendiri, misalnya ternak ayam buras yang populasinya mencapai 12.690 ekor, sebagian besar ditenakan untuk konsumsi keluarga. Beberapa pula jenis ternak besar seperti sapi (3.233 ekor) dan kuda berpotensi sebagai sumber protein hewani sekaligus membantu meningkatkan kesuburan lahan pertanian. Masyarakat menjual hasil produksinya ke pasar desa atau ada tengkulak yang datang. Pasar tradisional di kecamatan Buntulia belum terakomodasi dalam data statistik, namun masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbelanja di toko/warung kelontong yang tersebar di masing-masing desa, dengan jumlah total mencapai 146 toko/warung (Kecamatan Buntulia Dalam Angka. 2011).

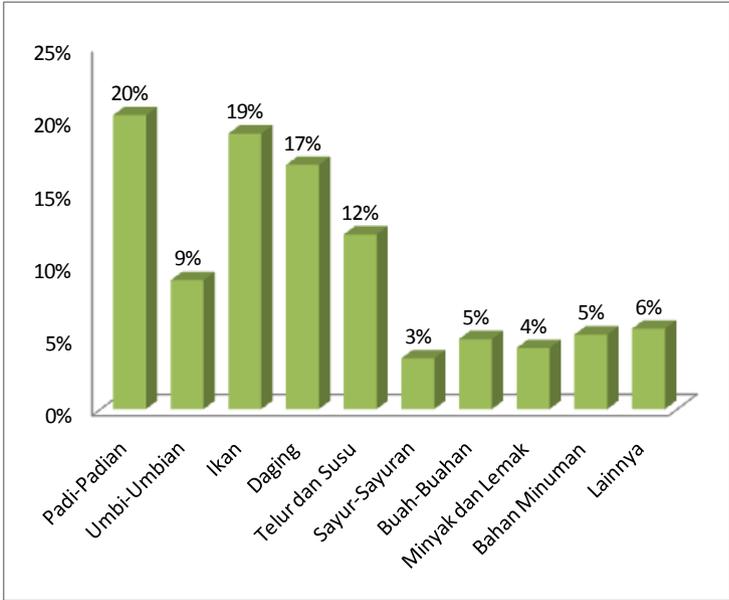


Sumber : Kecamatan Butulia Dalam Angka tahun 2011
 Gambar 27. Sarana Perdagangan di Kecamatan Buntulia

Tingkat pengeluaran masyarakat untuk bahan pangan dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan. Pada gambar 28 berikut menjelaskan prosentase pengeluaran pangan responden di Kecamatan Buntulia. Terlihat bahwa pengeluaran untuk konsumsi padi-padian (20%) dan ikan (19%) lebih tinggi daripada konsumsi pangan lainnya seperti daging, telur dan sayuran. Walaupun secara geografis, Kecamatan Buntulia memiliki topografi perbukitan, lereng sungai dan lembah, namun karena berdekatan dengan kecamatan Marisa sebagai ibu kota Kabupaten maka aksesibilitas

untuk kegiatan perekonomian tidak memiliki hambatan yang berarti.

Disisi lain di wilayah ini terdapat dua perusahaan pertambangan yang sedang melakukan penelitian eksplorasi yaitu PT Gorontalo Sejahtera Mining dan PT Wan Asia. Demikian juga para pemiliki tromol pertambangan tradisional sebagian besar berdomisili di wilayah ini. Hal ini menjadi indikator juga terhadap kegiatan transaksi ekonomi yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam konteks perilaku ekonomi, karena adanya sumber penghasilan dari kegiatan pertambangan. Demikian juga jenis barang yang diperdagangkan di toko-toko atau warung yaitu tidak terbatas pada barang-barang kebutuhan sehari-hari namun juga menyediakan barang-barang yang dibutuhkan di kegiatan pertambangan seperti suku cadang mesin diesel, selang berukuran besar, sepatu boot. Demikian juga kegiatan transportasi lokal yaitu ojek telah menjadi alternatif pekerjaan yang dilakukan masyarakat setempat. Dijumpai bahwa setiap satu orang yang berprofesi sebagai tukang ojek berpendapatan bersih sekitar Rp 100.000/ hari. Hal ini berdampak pada semakin banyaknya pedagang bensin eceran di sepanjang jalan masuk ke wilayah pertambangan tradisional.

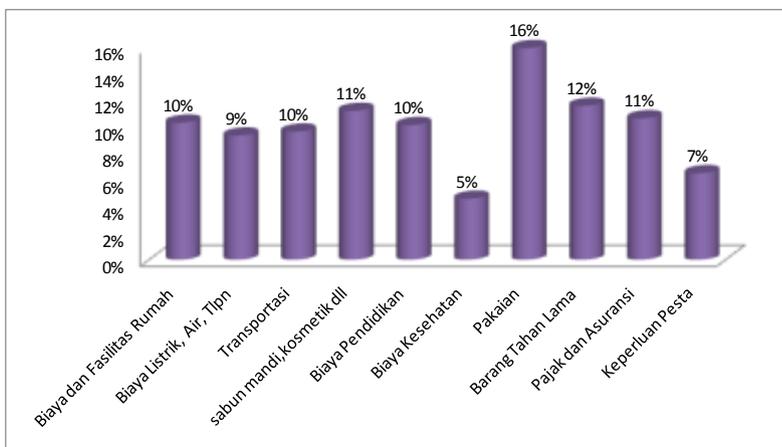


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 28. Komposisi Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Responden di Kecamatan Buntulia

Komposisi pengeluaran non pangan hasil wawancara dengan responden di Kecamatan Buntulia disajikan pada gambar 29 dan Lampiran 8. Nampak bahwa prosentase pengeluaran terbesar adalah untuk membeli pakaian (16%) disusul barang tahan lama (12%) seperti alat rumah tangga, perkakas, alat dapur, kendaraan, kamera, barang elektronik, pemasangan telepon, pemasangan listrik. Perilaku ekonomi masyarakat di wilayah ini merupakan indikator ekonomi rumah tangga yang cukup memadai untuk ukuran transaksi ekonomi di

wilayah ini. Artinya keinginan masyarakat untuk membelanjakan uangnya terhadap barang-barang non pangan cukup maju sehingga hal ini berdampak terhadap perputaran roda perekonomian antara wilayah sekitar.



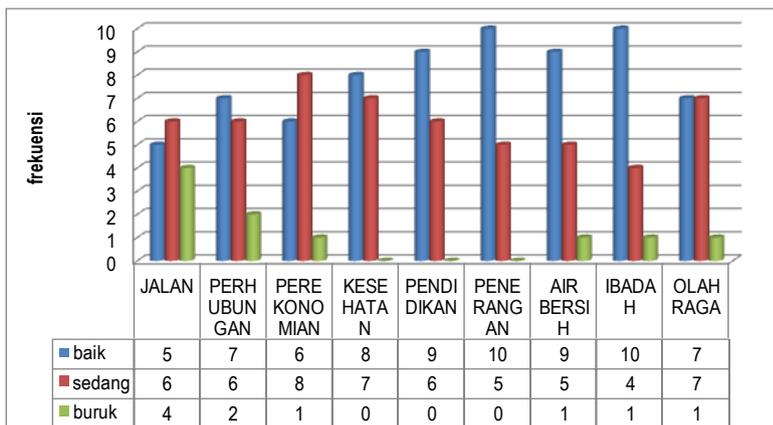
Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 29. Komposisi Pengeluaran Non Pangan Rumah Tangga Responden di Kecamatan Bontulia

Persepsi responden tentang kondisi sarana dan prasarana di kecamatan Bontulia, umumnya relatif baik. Pada gambar 30 nampak bahwa persepsi responden yang kurang baik terkait sarana jalan dan perhubungan (jaringan telekomunikasi). Fasilitas dasar seperti kesehatan, pendidikan, penerangan, air bersih dan sarana ibadah relatif tersedia dengan baik. Demikian pula sarana olahraga yaitu cenderung kurang baik. Hal lain dengan sarana perhubungan, perekonomian dan

kesehatan, ketiga sektor ini relatif sama jawaban responden antar baik dan sedang, seperti ditampilkan pada grafik batang, bahkan sarana perekonomian menunjukkan persepsi responden yaitu sedang bila dibanding dengan responden yang menjawab baik.

Di jupai jalan utama menuju kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Buntulia sebagian telah mengalami kerusakan. Aktivitas kendaraan baik roda dan roda empat melewati jalan ini cukup tinggi, sehingga wajar apabila sarana jalan ini cepat mengalami kerusakan. Di sisi lain pemerintah tidak memiliki sarana kelembagaan hukum untuk memungut pajak atau retribusi terhadap kegiatan pertambangan tradisional tersebut, sehingga hal ini menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan secara terpadu oleh pemerintah.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 30. Persepsi Responden Tentang Kondisi Sarana Prasarana di Kecamatan Buntulia

Isu kelembagaan di Kecamatan Buntulia terkait dengan lingkungan adalah masalah pencemaran air. seperti nampak pada gambar 30. Masyarakat melakukan aktivitas penambangan dan menyalurkan airnya ke sungai sehingga nampak sungai menjadi keruh. Penambangan dengan model semprot dengan cara menyedot air dari sungai dan membuangnya lagi membuat sumberdaya air di kecamatan Buntulia menjadi tidak aman dikonsumsi oleh masyarakat. Padahal sungai tersebut menjadi sumber air baku untuk air minum bagi warga. Umumnya model pertambangan semprot dilakukan oleh para penambang tanpa ijin yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Pihak pemerintah daerah seharusnya memperhatikan warga disekitar aktivitas pertambangan yang terkena dampak langsung aktivitas tambang rakyat.



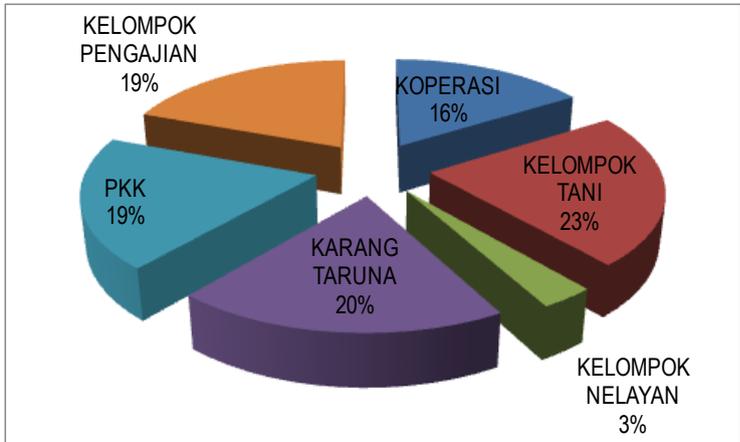
Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 31. Kegiatan Penambang Tradisional Yang Berkontribusi Dalam Pencemaran Air Sungai di kecamatan Buntulia

Pada aspek kelembagaan ditingkat Kecamatan Buntulia nampak bahwa kelembagaan yang banyak memberikan kontribusi terhadap aktivitas masyarakat yaitu Kelompok Tani dengan prosentase 23%, meskipun wilayah pertanian lahan basah diwilayah ini tidak luas namun untuk kelompok tani lahan kering cukup luas terutama yang ditanami jagung yang didukung oleh pemerintah Kabupaten dan Provinsi untuk terus melakukan penanaman secara intensif dengan

melalui kelompok tani di distribusikan bantuan bibit dan sarana produksi lain, seperti pupuk dan pestisida. Oleh karena itu kelompok tani lebih memberikan kontribusi di wilayah ini. Selanjutnya di ikuti Karang Taruna yang menjadi wadah kaum mudah di wilayah ini dengan persentase 20%.

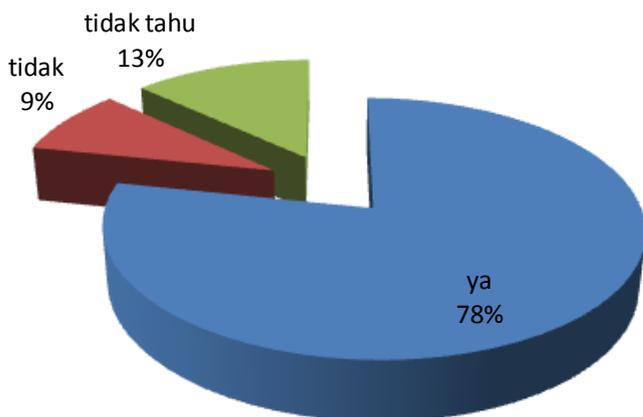
Jenis kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kelompok pengajian juga memberikan kontribusi nyata dalam aktivitas masyarakat, hal ini penting karena terkait dengan pembinaan ahlik masyarakat yang saat ini telah banyak mengalami degradasi. Kegiatan ibu-ibu PKK memiliki posisi penting di wilayah ini dengan persentase 19%, hal ini terkait dengan pembinaan hidup sehat dan pemanfaatan waktu bagi ibu-ibu dalam mencari kegiatan tambahan di dalam rumah dan dapat menghasilkan uang. Demikian juga lembaga Koperasi dengan persentase 16%, meskipun Koperasi saat ini mengalami kemunduran namun di Kecamatan buntulia masyarakat masih memiliki harapan yang baik terhadap lembaga Koperasi yang merupakan soko guru bagi perekonomian masyarakat. Dan Terakhir yaitu Nelayan, meskipun wilayah ini tidak memiliki garis pantai namun terdapat beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, hal ini menandakan bahwa masyarakat di kecamatan buntulia memiliki variabilitas kegiatan ekonomi.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012
 Gambar 32. Persepsi Responden Tentang Lembaga yang Mendukung Aktivitas Sosial Ekonomi Di Kecamatan Buntulia

Aspek konflik vertikal antar masyarakat dengan perusahaan pertambangan bila dilihat dari persepsi responden cukup tinggi yaitu 78% bahwa potensi konflik dapat ditimbulkan dengan adanya usaha pertambangan secara profesional di wilayah ini. Hal ini bukan lagi rahasia umum bahwa kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya saat ini cukup terbuka dan hampir tidak mengenal hirarki atau batasan-batasan lagi, Akan tetapi hal ini merupakan informasi yang baik bagi manajemen perusahaan pertambangan untuk menyusun program kegiatan kepada masyarakat baik dalam sosialisasi dan advokasi maupun cara pelibatan langsung masyarakat dalam kegiatan

pertambangan profesional dengan melakukan pendidikan dan pelatihan.



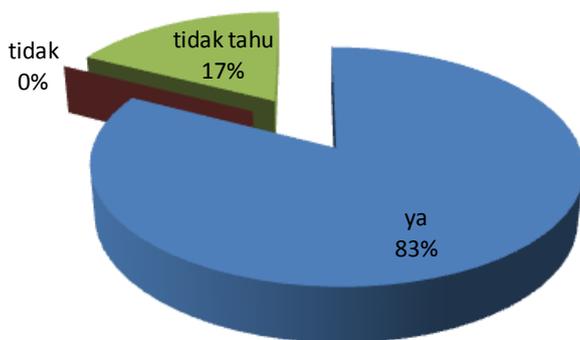
Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 33. Persepsi Resppnden Kelembagaan Tentang Potensi Konflik Antara Masyarakat dengan Perusahaan Pertambangan di Kecamatan Buntulia

Demikian juga dengan persepsi masyarakat yang menjadi pengurus kelembagaan sentral di kecamatan Buntulia terhadap PT Gorontalo Sejahtera Mining terkait dengan wilayah konsesi kontrak karya yang saat ini masuk pada tahap penelitian eksplorasi detil. Dimana responden menganggap bahwa perusahaan ini berpotensi menimbulkan konflik dengan persentase 83%. Sedangkan yang menjawab tidak tahu yaitu 17%. Hal ini dapat menjadi pedoman bagi perusahaan untuk melakukakan upaya komunikasi dengan para pihak sehingga tera tidak ada kesenjangan

diantara perusahaan dengan Pemerintah, Perusahaan dengan masyarakat teruatom masyarakat penambang tradisional agar mencapai tahapan-tahapan kesepakatan yang mendasar dengan tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.

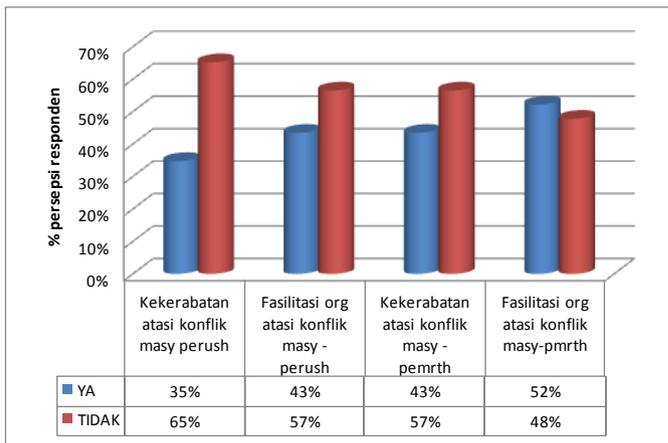
Dijumpai dilokasi penelitian bahwasanya masyarakat tidak menolak kegiatan usaha pertambangan secara profesional namun diperlukan interaksi dan komunikasi dengan memanfaatkan kelembagaan masyarakat yang ada untuk ditingkatkan kapasitasnya, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kegiatan perusahaan pertambangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan antusias masyarakat mengisi angket dan wawancara di setiap Kecamatan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 34. Persepsi Potensi Konflik Pengelolaan Pertambangan oleh PT GSM di Kecamatan Buntulia

Berdasarkan informasi dari beberapa responden yang menjadi tokoh dalam kelembagaan masyarakat di Kecamatan Buntulia, diketahui bahwa jika terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan, maka perlu intervensi oleh pemerintah, sebab unsure kekerabatan dan fasilitasi oleh organisasi kemasyarakatan setempat belum cukup membantu. Hanya 35% Responden yang mengatakan bahwa kekerabatan dapat membantu resolusi konflik dengan perusahaan dan 43% menganggap bahwa fasilitasi organisasi mampu membantu mengatasi konflik. Hal yang berbeda terjadi jika terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah, fasilitasi organisasi dianggap dapat mengatasi konflik, seperti dijelaskan pada grafik pada gambar 35 berikut.



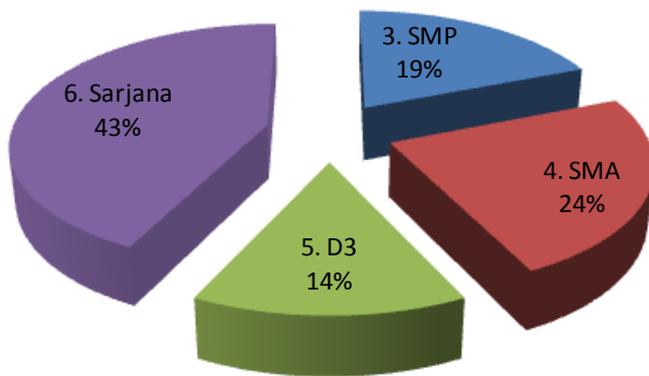
Gambar 35. Persepsi Resolusi Konflik Pengelolaan Pertambangan oleh PT GSM di Kecamatan Buntulia

3. Kondisi Sosial Ekonomi Kelembagaan Kecamatan Dengilo

Kecamatan Dengilo terletak paling timur yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Mananggu (wilayah Kabupaten Boalemo). Kecamatan dengan luas wilayah 244,00 km² ini berbatasan dengan Kecamatan Sumalata di sebelah utara Kabupaten gorontalo utara, Kecamatan Mananggu di sebelah timur, Teluk Paguat di sebelah selatan serta Kecamatan Marisa di sebelah barat. Memiliki lima desa yaitu Popaya, Padengo, Karangetan, Karya Baru, Huta Moputi dengan ibukota kecamatan terletak di Popaya. Desa yang memiliki luas terbesar adalah desa Karangetang dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah desa Padengo.

Kepadatan penduduk rata-rata 24 penduduk/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi di desa Popaya (43 penduduk/km²) dan kepadatan terendah di desa Karangetang yaitu 7 penduduk/km². Kepadatan penduduk yang tinggi mencerminkan kemajuan ekonomi lebih tinggi daripada desa lainnya dan sering dikategorikan sebagai pusat pemerintahan. Rata-rata jumlah anggota keluarga di setiap desa relatif seragam yaitu 4 orang per KK kecuali di desa Karangetang yaitu 3 orang per KK. Hal ini sejalan dengan data keluarga responden yang umumnya terdiri dari keluarga inti (ayah, ibu dan anak). Rendahnya jumlah anggota keluarga akan berdampak pada

pendidikan anak-anak, walaupun keluarga petani, namun memiliki keinginan menyekolahkan anak minimal sampai SMA bahkan sampai keperguruan tinggi. Gambar berikut menjelaskan prosentase pendidikan responden masyarakat di Kecamatan Dengilo. (Lampiran 9).

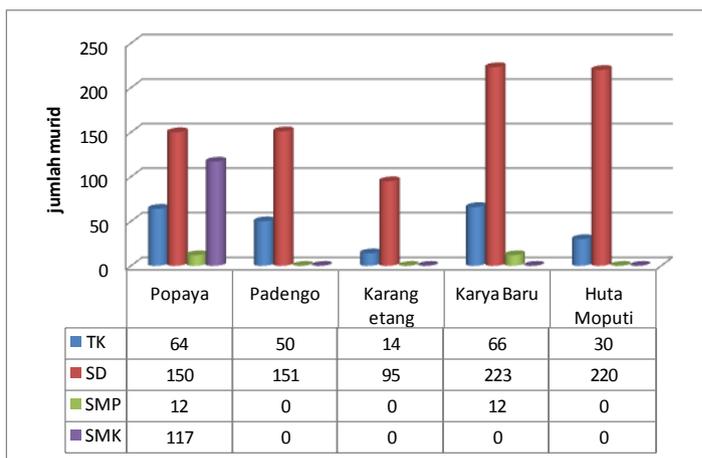


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 36. Pendidikan Responden Di Kecamatan Dengilo

Fasilitas pendidikan dasar seperti taman kanak-kanak dan sekolah dasar sudah tersedia di masing-masing desa. Bahkan fasilitas taman kanak-kanak, pada masing-masing desa terdapat 2 buah, kecuali di desa Karangetang dan Huta Moputi. Demikian pula fasilitas sekolah dasar sudah ada pada masing-masing desa, bahkan di desa Karya Baru terdapat 2 buah SD. Fasilitas SMP hanya ada di dua desa yaitu Popaya dan Karya Baru. Masalah pendidikan yang muncul berdasarkan informasi dari wawancara

dengan responden adalah adanya pengaruh lingkungan keluarga, alasan ekonomi dan jarak ke sekolah. Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan semakin rendahnya minat siswa melanjutkan sekolah. Gambar berikut menjelaskan jumlah murid di kecamatan Dengilo dari Taman Kanak-Kanak sampai SMK.

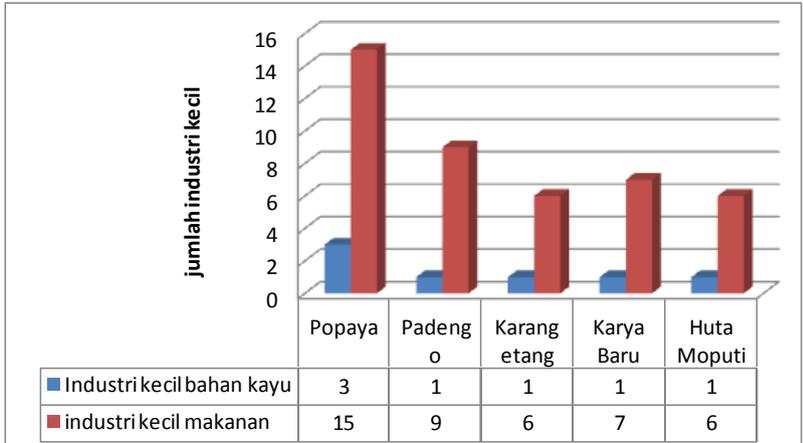


Sumber : Kecamatan Dengilo Dalam Angka tahun 2009, 2010 dan 2011

Gambar 37. Tingkat Partisipasi Pendidikan TK, SD, SMP dan SMK di Kecamatan Dengilo

Karakter wilayah Kecamatan Dengilo sebagian besar merupakan dataran, sebagian lagi berupa lereng (punggung bukit) terutama desa Karya Baru dan Huta Moputi. Mata pencaharian dibidang pertanian menjadi pilihan utama terkait kondisi topografi tersebut. Komoditas utama yaitu jagung mendominasi tanaman bahan pangan, dengan luas

tanam 4.559 hektar dapat menghasilkan 26.259 ton. Produktivitas komoditas jagung yang cukup tinggi yaitu rata-rata 5,75 ton/hektar merupakan potensi yang layak untuk pengembangan ekonomi daerah. Informasi industri terkait komoditas jagung, baik home industry maupun agroindustri belum ada di wilayah kecamatan Dengilo. Tanaman pangan lain adalah padi, dengan luas tanam sebesar 638 hektar dengan produksi 3.528 ton. Ada pula umbi-umbian seperti ubi jalar dan ubi kayu serta kacang tanah. Potensi buah-buahan dan hortikultura yang layak dikembangkan adalah pisang dan cabe. Selain itu komoditas perkebunan yaitu kelapa, kakao dan cengkeh juga potensial menjadid unggulan di kecamatan Dengilo. Untuk mendukung potensi tersebut sudah ada 5 industri menengah dan beberapa industri kecil seperti disajikan pada Gambar 38.

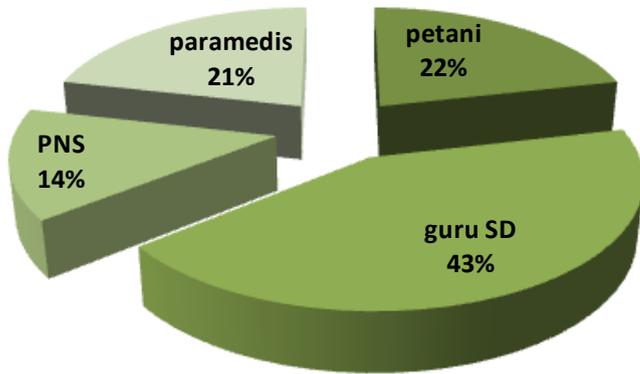


Sumber : Kecamatan Dengilo Dalam Angka tahun 2011
 Gambar 38. Jumlah Industri Kecil Berbahan Kayu dan Makanan di Kecamatan Dengilo

Potensi sumberdaya alam terkait dengan profesi utama masyarakat yaitu sebagai petani. Walaupun profesi lain seperti guru, tenaga medis dan pedagang juga menjadi pekerjaan utama, namun kegiatan bertani seringkali menjadi pekerjaan sampingan di sela-sela kegiatan utama. Hal ini tercermin dari komposisi responden yang sebagian besar berprofesi sebagai guru (43%) dengan pekerjaan sampingan sebagai petani dan ada pula paramedis (21%). Profesi penambang tradisional jarang menjadi profesi utama di desa-desa sekitar kecamatan Dengilo, umumnya ketika proses wawancara, sebagian responden mengaku memiliki profesi utama adalah petani dengan kegiatan sampingan adalah penambang tradisional.

Pemilihan profesi responden terkait dengan pengisian kuisioner yang bertujuan untuk menggali informasi tentang keberadaan sosial ekonomi dan kelembagaan di kecamatan Dengilo sekaligus merekam informasi tentang kegiatan tambang rakyat. Gambar 39 memberikan informasi jenis pekerjaan responden di kecamatan Dengilo yang sebagian besar adalah guru (43%) disusul petani (22%) dan paramedis (21%), petani 22% dan pegawai negeri sipil 14%. Ketersediaan tenaga guru di kecamatan Dengilo menjadi indikator yang baik bagi pengembangan anak didik.

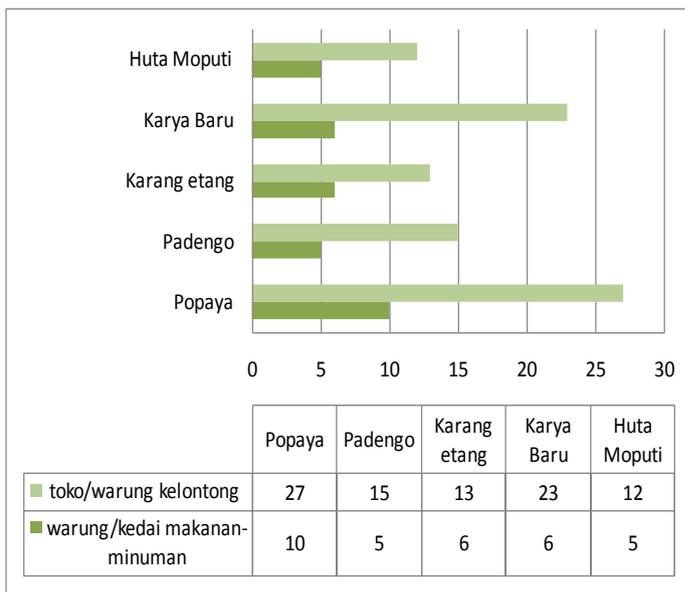
Demikian pula adanya ketersediaan tenaga paramedis akan melayani masyarakat dibidang kesehatan, karena wilayah ini sedikit jauh dari ibukota Kabupaten Pohuwato. Demikian juga masyarakat yang berprofesi sebagai petani dapat melakukan aktivitas pertanian dengan baik ditunjang oleh aspek lain. Dijumpai bahwa sebagian lahan pertanian di wilayah ini adalah hasil ekstensifikasi usaha pertanian, baik dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian serta usaha petani untuk membuka lahan menjadi areal pertanian.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012
 Gambar 39. Komposisi Pekerjaan Responden Di Kecamatan Dengilo

Fasilitas ekonomi seperti pusat perdagangan dan pasar serta toko penjual kebutuhan pokok masyarakat menjadi penggerak perekonomian wilayah. Responden yang berprofesi sebagai petani umumnya menjual hasil produk pangan melalui tengkulak dan pedagang pengumpul. Pola yang diterapkan biasanya menggunakan sistem yarnen (bayar panen), petani dapat mengambil uanga p untuk biaya sarana produksi (pupuk, obat dan bibit) dan dibayar jika panen. Ada pula yang menjual ke eksportir untuk komoditas jagung dan kelapa, namun jumlahnya sangat terbatas. Sarana perdagangan di Dengilo terdiri dari 1 pasar tradisional tanpa bangunan permanen yang letaknya di ibukota kecamatan (Desa Popaya), sebagai penunjang terdapat 32 warung/kedai

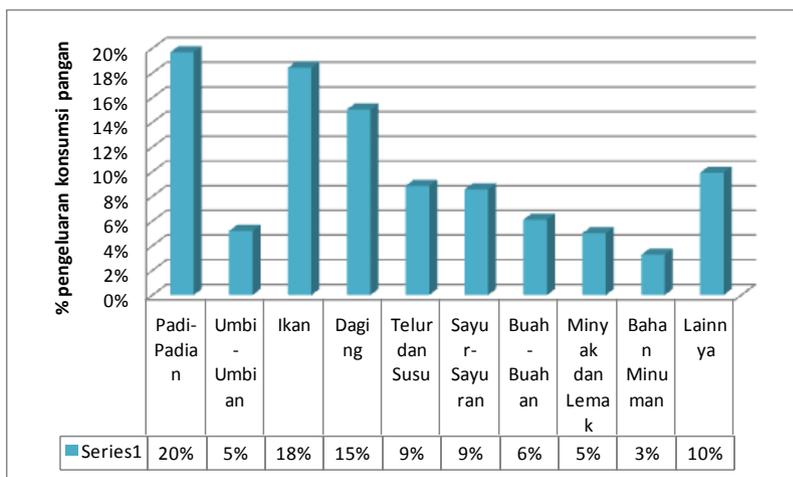
makanan dan 90 toko/kios. Gambar 40 berikut menjelaskan distribusi jumlah warung/kedai dan kios di masing-masing desa di kecamatan Dengilo.



Sumber : Kecamatan Dengilo Dalam Angka tahun 2011
 Gambar 40. Sebaran Jumlah Warung dan Toko di Kecamatan Dengilo

Tingkat kesejahteraan warga selain dilihat dari tingkat pendapatan setiap bulan dapat pula dilihat dari prosentase pengeluaran rumah tangga. Berdasarkan komponen pengeluaran pangan dan non pangan responden di kecamatan Dengilo, diketahui bahwa 54% pengeluaran rumah tangga digunakan untuk belanja pangan dan 46% digunakan untuk belanja nonpangan. Gambar 41

menjelaskan komposisi pengeluaran pangan rumah tangga responden. Konsumsi karbohidrat yang berasal dari padi-padian masih mendominasi selain ada diversifikasi dari umbi-umbian walaupun prosentasenya kecil. Kondisi yang cukup menyolok adalah konsumsi protein hewani yang berasal dari ikan, ternyata prosentase pengeluarannya mendekati kebutuhan karbohidrat (20%) dan sumber protein dari daging (15%), susu dan telur. Kondisi ini dapat menjadi peluang perusahaan perikanan darat, mengingat kecamatan Dengilo memiliki topografi dataran dan perbukitan.

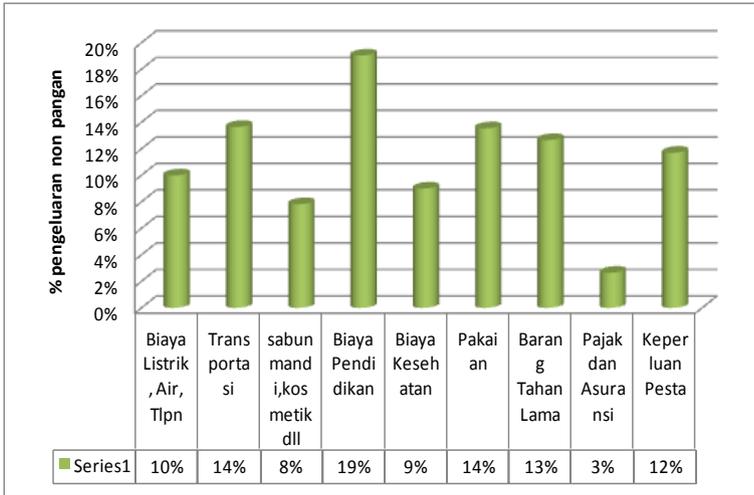


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 41. Prosentase Komposisi Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Responden di Kecamatan Dengilo

Gambar 42 berikut memberikan informasi komposisi pengeluaran non pangan responden di Kecamatan Dengilo. Nampak bahwa sebagian responden sangat peduli pada aspek pendidikan (19%). Kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai ketinggian perguruan tinggi adalah perilaku ekonomi yang baik. Artinya kehidupan masyarakat dimasa yang akan datang akan banyak dipengaruhi oleh investasi masyarakat dibidang pendidikan saat ini. Indikator lain juga bahwa masyarakat di Kecamatan dengilo telah memiliki komposisi ekonomi yang baik karena telah mampu menyekolahkan anaknya keperguruan tinggi.

Besarnya biaya transportasi (14%) terkait dengan profesi sebagai guru dan para medis yang mengharuskan untuk melaksanakan tugas terkait kecukupan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Hal ini karena di pengaruhi oleh faktor jarak anatar pemukiman dengan lokasi pendidikan yang masih jauh dan juga belum adanya angkutan umum yang dapat melayani siswa dan para guru serta paramedis untuk melakukan tugas kesehariannya. Dijumpai dilokasi penelitian bahwa masalah aksesibilitas sarana dan prasarana masih cukup terbatas sehingga hal ini menjadi biaya tinggi (*hight cost*).

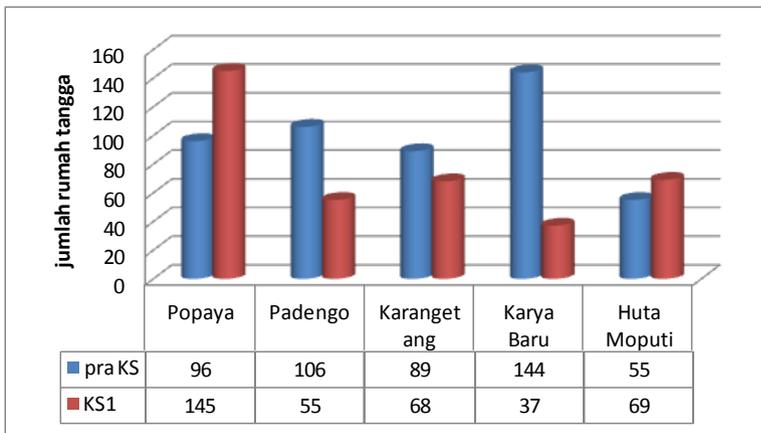


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 42. Prosentase Komposisi Pengeluaran Non Pangan Rumah Tangga Responden di Kecamatan Dengilo

Walaupun komposisi sebagian responden cukup sejahtera, namun secara umum, di Kecamatan Dengilo masih terdapat beberapa keluarga yang membutuhkan bantuan kebutuhan pokok. Gambar 42 menjelaskan sebaran jumlah keluarga Pra KS dan KS 1 di masing-masing desa. Desa Karya Baru memiliki jumlah KK keluarga pra KS paling banyak, demikian pula Desa Popaya memiliki jumlah KK yang dikategorikan KS 1 terbanyak. Kondisi ini memerlukan penanganan serius terkait pemberdayaan masyarakat sesuai dengan profesi dan potensi sumberdaya alam sekitar kecamatan.

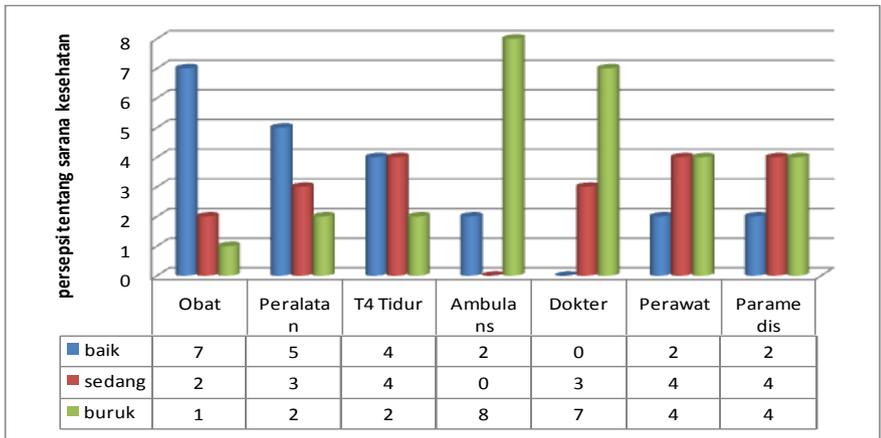
Indikator ini menunjukkan disparitas kesejahteraan di wilayah ini sangat nampak terutama bagi keluarga petani dan tukang kebun. Dijumpai rata-rata rumah tempat tinggal petani dan tukang kebun di wilayah ini masih terbuat dari kayu dan bambu yang dianyam, meskipun pondasinya batu dan beratap seng namun pola hidup mereka masih belum menentu karena lahan yang dimiliki oleh petani cukup terbatas juga.



Sumber : Kecamatan Dengilo Dalam Angka tahun 2011
 Gambar 43. Sebaran Jumlah Keluarga Pra KS dan KS 1 di Kecamatan Dengilo

Aspek kesehatan merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga. Hasil wawancara dengan responden rumah tangga menyebutkan bahwa belum ada penyakit menular berbahaya yang menjangkiti warga. Umumnya

penyakit yang diderita anak-anak adalah panas dan diare. Sedangkan penyakit regeneratif seperti sakit jantung, asam urat, darah tinggi dan diabetes hampir menjadi ciri khas penyakit kaum lelaki dan perempuan di sekitar desa Kecamatan Dengilo Kabupaten Pohuwato. Masalah balita kurang gizi juga pernah terjadi. Aspek kesehatan akan terkait dengan sarana dan prasarana kesehatan, Gambar 44 menjelaskan tentang persepsi responden tentang sarana dan prasarana kesehatan di kecamatan Dengilo.



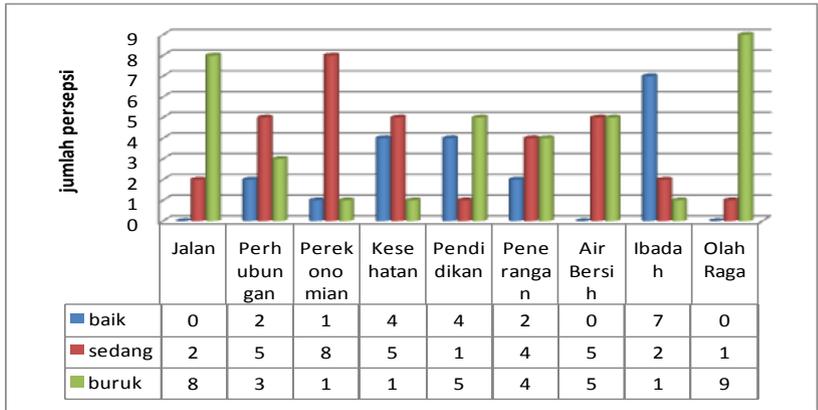
Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 44. Persepsi Responden Tentang Fasilitas Kesehatan Kecamatan Dengilo

Fasilitas kesehatan di Dengilo belum merata di setiap desa, terdapat 1 Puskesmas terletak di ibukota kecamatan (desa Popaya) , 2 Puskesmas Pembantu di Desa Popaya dan Karya baru.

Posyandu berjumlah 10 Posyandu, bahkan desa Popaya, Karya Baru dan Padengo memiliki 3 posyandu kecuali Desa Karangetang yang belum memiliki posyandu namun ada fasilitas 1 unit Polindes. Hal tersebut mempengaruhi persepsi responden tentang kurang baiknya sarana kesehatan. Beberapa fasilitas yang dinilai kurang memadai adalah fasilitas ambulan, tenaga dokter dan paramedisnya. Sedangkan obat-obatan dan peralatan di fasilitas kesehatan dinilai cukup memadai. Memang di kecamatan Dengilo, belum ada dokter praktek, perawat yang ada pun hanya 2 orang dan bidan 4 orang yang tersebar tidak merata di tiap desa. Akhirnya masyarakat banyak menggantungkan aspek kesehatan pada dukun bayi yang tersebar di tiap desa.

Keberadaan fasilitas umum juga menjadi salah satu indikator kemajuan ekonomi wilayah. Persepsi responden terhadap beberapa fasilitas umumnya kurang baik terutama terkait sarana jalan yang merupakan urat nadi perekonomian. Sementara fasilitas air bersih dan sarana olahraga juga dinilai kurang baik. Fasilitas dasar kesehatan dan pendidikan dinilai dengan skor “sedang”, artinya masih perlu penangan agar menjadi lebih baik. Gambar berikut menjelaskan kondisi infrastruktur di Dengilo.



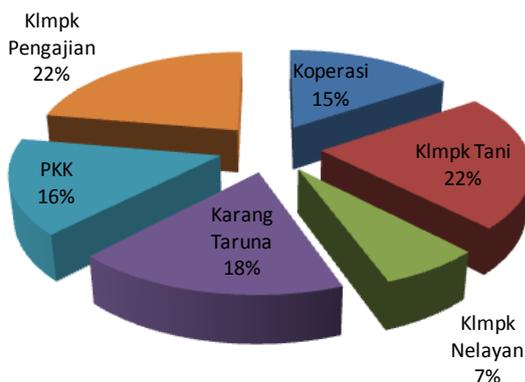
Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 45. Persepsi Responden Tentang Keberadaan Prasarana di Kecamatan Dengilo

Masyarakat di beberapa desa di Dengilo masih memegang adat budaya dengan kuat. Beberapa tradisi yang masih dilakukan misalnya Langgana, dana berpantun, barsanji, zikir burunda sampai kegiatan huyula/gotong royong. Hal ini menyiratkan bahwa kelembagaan sosial keagamaan masih berpengaruh kuat di masyarakat. Tidak semua desa di kecamatan Dengilo memiliki Majelis Ta'lim yang terdaftar di kecamatan. Di desa Popaya terdapat satu majelis ta'lim, di Pandengo terdapat 3 buah dan di Desa Karya Baru terdapat 2 buah.

Persepsi responden tentang organisasi yang berpengaruh dalam kehidupan sosial dan ekonomi disajikan pada Gambar 46. Hampir semua organisasi sosial memiliki anggota yang spesifik,

misalnya responden petani akan ikut kelompok tani. Pemuda akan mengikuti organisasi karang taruna dan juga kelompok pengajian. Sedangkan kaum ibu, selain mengikuti PKK juga aktif dalam majlis ta'lim. Kondisi tersebut menyiratkan bahwa tiap organisasi memiliki peran yang berbeda dalam memajukan perkembangan kecamatan.

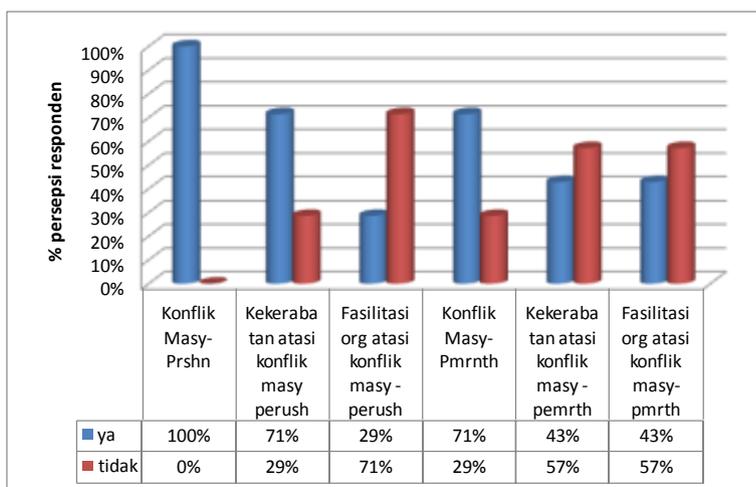


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 46. Persepsi Responden Tentang Lembaga Yang Berperan Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi di Kecamatan Dengilo

Terkait dengan aktivitas pengelolaan tambang, hampir semua responden mengatakan akan terjadi konflik antara pemerintah. Penyelesaian konflik yang diharapkan adalah adanya musyawarah dengan mengedepankan kekerabatan atau kekeluargaan, demikian di jawab oleh 71% responden. Sedangkan peran fasilitasi organisasi kemasyarakatan masih diragukan oleh banyak

responden. Demikian pula jika terjadi konflik antara masyarakat dan pemerintah, diperlukan mediasi pihak ketiga yang mengedepankan saling percaya dan keterlibatan tiap komponen masyarakat. Sebab sebagian responden masih meragukan peran fasilitasi organisasi kemasyarakatan dan aspek kekerabatan atau kekeluargaan seperti nampak pada grafik pada gambar 46.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 47. Persepsi Responden Tentang Potensi dan Resolusi Konflik Pengelolaan Tambang di Kecamatan Dengilo

Di Jumpai bahwa diwilayah Kecamatan Dengilo sering terjadi banjir karena adanya sedimen yang dibawa oleh air hujan ke pemukiman penduduk. Hal ini disebabkan adanya aktivitas pertambangan dan peladang berpindah disekitar

kawasan hutan yang masih bagian dari Cagar Alam Panua. Peluang bencana alam seperti banjir mungkin akan terjadi bila tidak ada upaya dari pemerintah dan semua pihak menertibkan kegiatan peladangan berpindah dan pertambangan tradisional. Gambar 48 berikut menjelaskan aktivitas penambang tradisional dengan model semprot yang salah satu penyebab sedimentasi.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 48. Aktivitas Penambangan Tradisional dengan Model Semprot di Kecamatan Dengilo

Kegiatan pertambangan tradisional lebih banyak diilhami oleh isu-isu tentang potensi endapan emas disekitar wilayah ini sehingga

mendorong masyarakat untuk mencari dengan berbagai macam cara yang sebenarnya dampaknya lebih besar daripada yang diperoleh karena untuk memisahkan logam mulia tersebut dicampurkan batu yang telah dihaluskan dan disaring lewat alat penyaring yang terbuat dari sabut enau tersebut akan diproses dengan menggunakan sianida dan merkuri.

Demikian pula persepsi responden tentang pengelolaan konsesi PT Gorontalo Sejahtera Mining diprediksi akan berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat sekitar dengan perusahaan.. Hal ini diakibatkan tidak adanya pemahaman masyarakat tentang manfaat pertambangan dikelola dengan profesional dan tradisional. Di sisi lain karena adanya polarisasi politik praktis terhadap pertambangan tradisional bahkan disinyalir sebagian tromol dan lokasi pertambangan dikuasai oleh tokoh politik lokal dan beberapa aparat pemerintah yang di dukung oleh aparat keamanan.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 49. Proses Pengolahan Pertambangan Rakyat Dan Dampaknya Terhadap Sumberdaya Air Di Kecamatan Dengilo

4. Kondisi Sosial Ekonomi Kelembagaan Kecamatan Randangan

Kecamatan Randangan yang memiliki fasilitas sarana dan parasarana yang memadai setelah Ibukota Kabupaten pohuwato yaitu Kecamatan Marisa. Kematan ini terletak di sebelah barat Kecamatan Patilanggio, dengan luas wilayah 331,18 km², berbatasan dengan Kecamatan Wonggarasi dan Kecamatan Taluditi di sebelah utara, Kecamatan Patilanggio di sebelah timur, Teluk

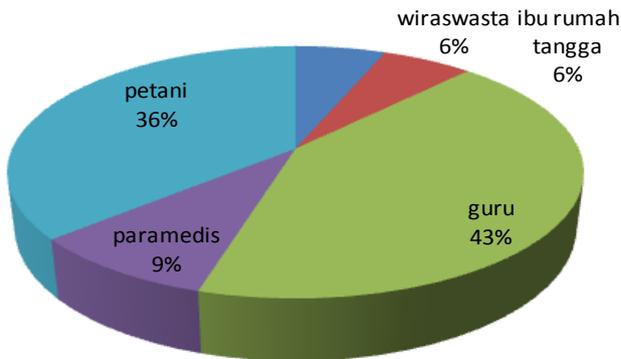
Tomini di sebelah selatan serta Kecamatan Lemito di sebelah barat. Jarak tempuh ibukota kecamatan Randangan kurang lebih 33 km ke kecamatan Marisa (ibukota kabupaten Pohuwato), dengan ketinggian sekitar 23 mdpl menyebabkan wilayah ini potensial untuk pengembangan pertanian lahan kering. Selain potensi perikanan untuk beberapa desa di wilayah pesisir.

Kondisi geografis kecamatan Randangan cukup unik karena keanekaragaman tipologi desanya meliputi desa pesisir, dataran, bukit dan lembah. Dari 13 desa yang merupakan wilayah kecamatan Randangan, terdapat 5 desa yang memiliki pantai selain memiliki lembah dan dataran, namun semua desa berada pada satu daerah aliran sungai. Desa yang memiliki luas terbesar adalah Imbodu dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Patuhu.

Jumlah penduduk Randangan pada tahun 2010 adalah 14.505 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 7.428 jiwa dan penduduk perempuan 7.077 jiwa. Kepadatan penduduk Randangan pada tahun 2010 sebesar 44 jiwa per km². Desa yang paling padat penduduknya adalah Manunggal Karya, yaitu 96 jiwa per km², sedangkan yang terendah adalah Imbodu yaitu 17 jiwa per km². Jumlah anggota keluarga berkisar antara 3 sampai 4 orang/kepala keluarga, sejalan dengan kondisi responden yang umumnya terdiri dari keluarga inti. Bila ditelaah tentang penduduk laki-laki dan perempuan maka diantara jenis penduduk ini hampir sama

jumlahnya dan ini menjadi indikator demografis kedepan terkait dengan pengembangan investasi terutama disektor pertambangan. Artinya pelibatan dan persiapan kaum perempuan dalam bekerja menjadi perhatian khusus.

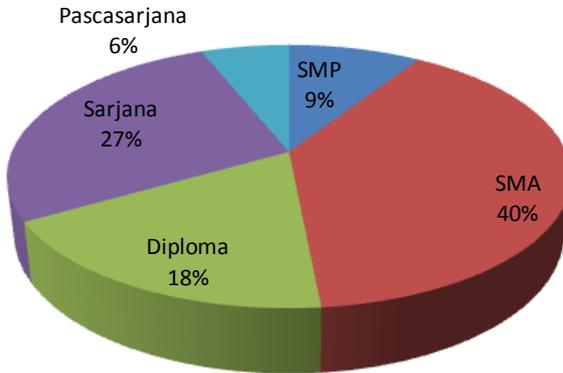
Umumnya masyarakat bermatapencaharian di sektor pertanian secara luas (pangan, perkebunan, perikanan), namun untuk keperluan penggalian data sosial ekonomi kelembagaan, maka responden di pilih berdasarkan profesi utama, misalnya guru, tenaga medis, petani dan penambang, ada pula responden pemuda/pemudi untuk menggali informasi tentang persepsi mereka terhadap pembangunan di kecamatan. Berikut jenis pekerjaan responden di kecamatan Randangan



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012
Gambar 50. Distribusi Profesi Responden Di Kecamatan Randangan

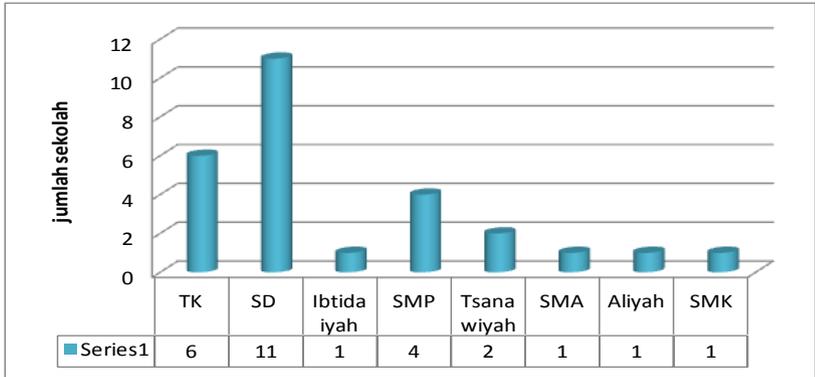
Berdasarkan informasi dari gambar 50 diketahui bahwa hampir 43% pekerjaan responden adalah tenaga pendidik, walaupun ada sebagian dari mereka memiliki pekerjaan sampingan sebagai petani atau berusaha di bidang jasa. Namun demikian sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama sebagai besar warga kecamatan Randangan. Selanjutnya gambar 51 menjelaskan tentang tingkat pendidikan responden yang minimal sudah mengenyam pendidikan dasar, bahkan ada yang berpendidikan pascasarjana. Peluang kecamatan Randangan yaitu sebagian besar wilayahnya di lalui oleh jalan trans Sulawesi yang merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan semua provinsi yang ada di pulau Sulawesi, sehingga untuk pengembangan usaha jasa seperti rumah makan dan penginapan memiliki prospek yang baik.

Demikian juga untuk akses masyarakat terhadap sarana pendidikan yaitu cukup mudah. Dijumapi bahwa sebagian orang tua siswa dan mahasiswa di wilayah ini sampai menyekolahkan anaknya ke luar daerah seperti ke Makassar, Manado, Gorontalo, karean adanya jalan utama trans Sulawesi tersebut mempermudah anak didik untuk menuntut ilmu sampai keluar daerah. Selain itu karena adanya dukungan ekonomi yang cukup baik maka hal ini dapat menjadi indikator bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai kependidikan tinggi.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012
 Gambar 51. Tingkat Pendidikan Responden Di Kecamatan Randangan

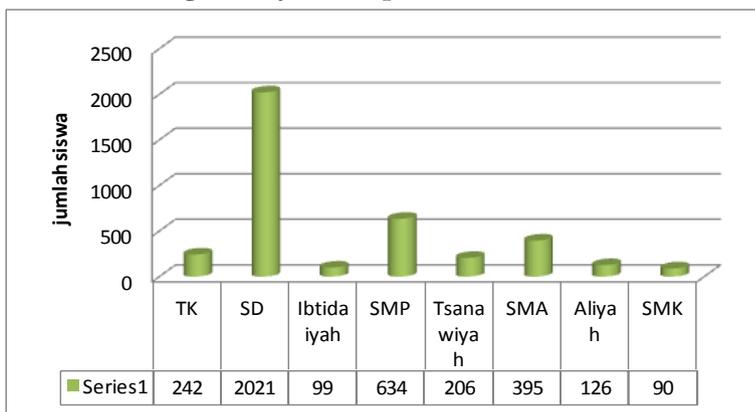
Pada gambar 51 diinformasikan bahwa sebagian besar pendidikan responden adalah SMA (40%), sarjana (27%). Hal tersebut mengindikasikan bahwa dinamika pendidikan di kecamatan Randangan cukup baik. Hal tersebut sejalan dengan fasilitas pendidikan mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, lanjutan sampai pendidikan kejuruan yang tersedia di kecamatan Randangan. Grafik berikut menjelaskan fasilitas pendidikan yang ada di beberapa desa di kecamatan Randangan.



Sumber : Kecamatan Randangan Dalam Angka tahun 2011
 Gambar 52. Jumlah Fasilitas Sekolah Di Kecamatan Randangan

Fasilitas pendidikan yang bervariasi menyebabkan banyaknya pilihan bagi masyarakat di kecamatan Randangan ataupun di kecamatan sekitarnya untuk dapat memilih jenis pendidikan yang diinginkan. Fasilitas taman kanak-kanak tidak terdapat setiap desa, namun pendidikan dasar sudah bisa di akses di hampir seluruh desa kecuali desa Sari Murni dan Sidorukun. Selanjutnya fasilitas SMP ada 4 buah masing-masing terdapat di desa Motolohu, Omayuwa, Patuhu dan Plambane. Pilihan pendidikan agama terdapat di desa Banuroja, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah sampai Aliyah, ada pula madrasah Tsanawiyah di Desa Huyula namun jumlah murid lebih sedikit, SMK kejuruan juga terdapat di desa Banuroja.

Masalah rendahnya partisipasi sekolah dengan semakin tingginya jenjang pendidikan juga terjadi di kecamatan Randangan. Menurut informasi dari tenaga pendidik, diketahui bahwa masalah internal keluarga seperti kurang dukungan orangtua, motivasi dari orang tua, tuntutan ekonomi keluarga selain faktor eksternal seperti jarak ke sekolah terkait dengan biaya transportasi.

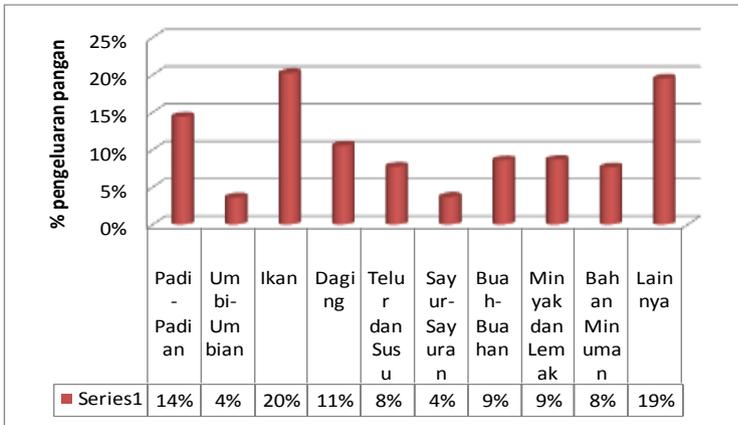


Sumber : Kecamatan Randangan Dalam Angka tahun 2011
 Gambar 53. Tingkat Partisipasi Siswa Di Kecamatan Randangan

Kecukupan pangan rumah tangga menjadi salah satu variabel ekonomi profil rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diketahui bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan (46%) lebih rendah daripada pengeluaran non pangan (54%). Hal ini menandakan bahwa prioritas keluarga adalah pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan

kualitas hidup yang lebih baik. Jika dikaji lebih lanjut, dari komposisi pengeluaran pangan tersebut, hampir 20%nya digunakan untuk belanja protein (ikan) dibandingkan dengan bahan pangan sumber karbohidrat. Hal ini bisa dimaklumi karena tipologi kecamatan randangan yang memiliki wilayah pantai.

Dijumpai masyarakat di Kecamatan Randangan lebih sering mengkonsumsi ikan, hal ini nampak pada prosentase pengeluaran pangan bahwa pengeluaran responden untuk ikan mencapai 20% dibanding dengan pengeluaran untuk jenis padi-padian dan umbi-umbian hanya mencapai 18% demikian jenis kebutuhan makanan. Artinya kesadaran responden untuk hidup sehat dengan banyak mengkonsumsi ikan semakin baik. Fenomena yang baik ini dapat terjadi karena didukung oleh aspek geografis, dimana terdapat beberapa desa yang berada di pesisir Teluk Tomini yang kaya akan potensi ikan laut. Selanjutnya perilaku ekonomi responden ini terjadi secara normatif karena adanya ketersediaan suplay ikan sehingga meskipun responden lebih banyak mengkonsumsi ikan namun biaya ekonominya tidak mahal.

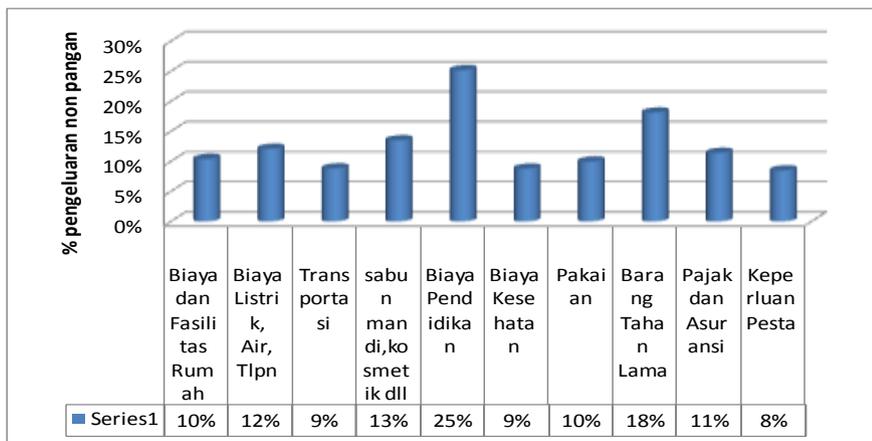


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 54. Prosentase Pengeluaran Pangan Responden Di Kecamatan Randangan

Gambar 55 berikut menjelaskan prosentase pengeluaran responden di Kecamatan Randangan untuk kebutuhan non pangan. Nampak bahwa biaya pendidikan menempati porsi tertinggi, hal tersebut dimungkinkan karena ada keluarga responden yang menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Seperti telah diilustrasikan melalui grafik, kecenderungan hubungan positif antara pengeluaran non-pangan dengan tingkat pendidikan responden di Kecamatan Randangan cukup realistis. Hal ini didukung oleh model perilaku ekonomi responden yang cenderung memilih menyekolahkan anaknya dapat dibuktikan pada pengeluaran non-pangan responden di Kecamatan Randangan. Di sisi lain peluang pengembangan wawasan masyarakat untuk dalam

rangka pengembangan investasi di wilayah ini cukup baik terutama untuk investasi di sektor pertambangan sesuai dengan aturan yang berlaku, karena aspek sumberdaya manusia cukup tersedia.



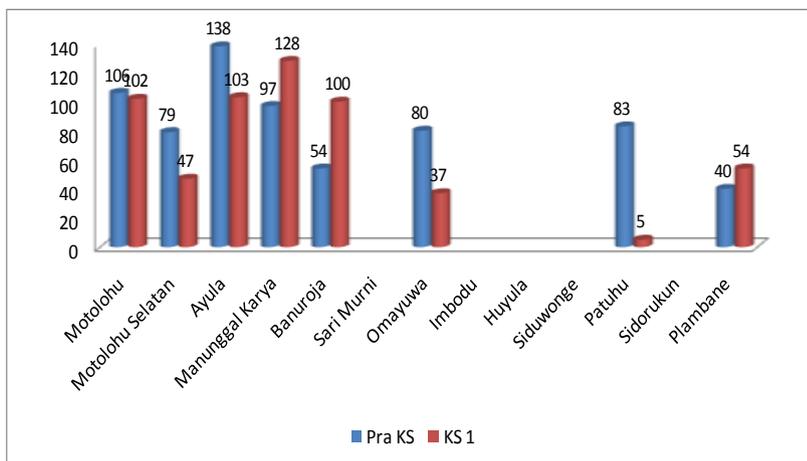
Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 55. Prosentase Pengeluaran Non Pangan Responden di Kecamatan Randangan

Namun demikian di kecamatan Randangan masih terdapat beberapa keluarga yang tergolong kurang sejahtera. Terbatasnya kepemilikan sumberdaya produktif menjadi salah satu masalah masih adanya prosentase keluarga pra KS dan KS 1. Gambar 56 menjelaskan sebaran keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Nampak bahwa desa Ayula dan Manunggal Karya memiliki rumah tangga miskin yang lebih banyak dibanding desa-desa lainnya. Secara geografis, karakteristik kedua

desa adalah lembah dan lereng bukit menyebabkan akses pangan menjadi salah satu kendala.

Disparitas kesejahteraan di wilayah ini lebih karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana wilayah untuk menjangkau lahan-lahan pertanian di desa- desa, sehingga biaya produksi pertanian akan menurun dan akan berdampak pada daya saing produk pertanian yang dihasilkan. Di jumpai bahwa biaya angkutan adalah kendala utama untuk mengangkut hasil produksi pertanian lahan kering seperti Cabai, Tomat, sayur mayor serta pisang.



Sumber : Kecamatan Randangan Dalam Angka tahun 2011
Gambar 56. Sebaran keluarga pra KS dan KS I di Kecamatan Randangan

Profil ekonomi masyarakat di kecamatan Randangan sebagian besar dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada disekitar. Dari sisi

ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk Randangan bekerja di sektor pertanian dalam arti luas, mulai kegiatan budidaya sampai pengolahan. Di desa Motolohu, terdapat warga yang melakukan pengolahan bahan pangan, jasa rumah makan sampai kegiatan perdagangan. Hampir semua jenis bahan pangan diusahakan di kecamatan Randangan, dengan komoditas unggulan jagung seperti nampak pada tabel 28 berikut. Untuk menunjang komoditas pangan, terdapat fasilitas perontok (2 unit) dan pengering padi (4 unit), namun jumlahnya sangat terbatas dibandingkan produksi seluruh kecamatan. Demikian terdapat 5 unit pengilingan jagung yang jumlahnya sangat jauh dari mencukupi kebutuhan.

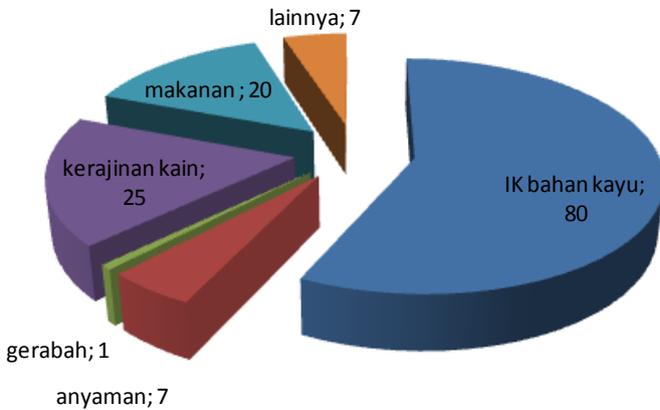
Tabel 29. Produksi Tanaman Pangan Di Kecamatan Randangan Tahun 2011

komoditas	luas panen (ha)	produksi (ton)
padi	149	779,27
jagung	9.825	57.576,50
kedelai	575	833,25
kacang tanah	15	20,25
kacang hijau	18	25,74
ubi kayu	4	-
ubi jalar	4	38,10

Komoditas jagung yang telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang di wilayah ini karena jenis jagung yang ditanam oleh petani pada umumnya adalah jagung berorientasi ekspor dimana perusahaan pedagang pengumpul sampai eksportir mau membangun pasilitas yang dibutuhkan karena dari aspek ekonomi jenis jagung ini dapat menghasilkan keuntungan . Dijumpai bahwa masyarakat senang menanam jagung karena pedagang pengumpul langsung transaksi dengan harga patokan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di rumah masing-masing petani.

Selain tanaman pangan, tanaman buah dan hortikultura juga banyak diusahakan oleh warga. Bawang merah dan cabe menjadi salah satu andalan sayuran selain tomat, kangkung, kacang panjang dan sayuran lain. Tanaman buah jeruk menjadi salah satu andalan kecamatan randangan selain mangga dan pisang. Tanaman tahunan pendukung industri olahan di kecamatan randangan adalah kelapa dan kakao dan apa pula jambu mete. Komoditas kelapa cukup dominan, dengan luas lahan 2.232 hektar mampu memproduksi 2.550 ton. Potensi pertanian yang cukup melimpah didukung oleh keberadaan ternak besar dan kecil. Populasi ternak besar sapi pada tahun 2010 adalah 10.327 ekor. Sedangkan untuk populasi ternak kecil, terdiri dari kambing 3.780 ekor dan ayam buras mencapai 16.873 ekor.

Potensi sumberdaya alam di kecamatan Randangan didukung oleh kreativitas masyarakat yang mengembangkan aneka kerajinan. Terdapat 80 unit usaha kerajinan berbahan dasar kayu, kerajinan dari bahan kain berjumlah 25 unit. Home industri yang berkembang dapat membantu perekonomian masyarakat terutama kaum perempuan dan remaja putrid. Dijumpai bahwa sebagian kelompok industri rumah tangga ini mengalami kendala dalam penganggaran dan pemasaran hasil produksi, meskipun pemerintah melalui Dinas terkait telah menupayakan program dan dukungan pelatihan namun karena hal ini berorientasi pada proyek dan bukan untuk pengembangan sektor industri kecil secara berkelanjutan maka banyak usaha kecil seperti ini berjalan sesuai dengan orderan yang mereka peroleh.



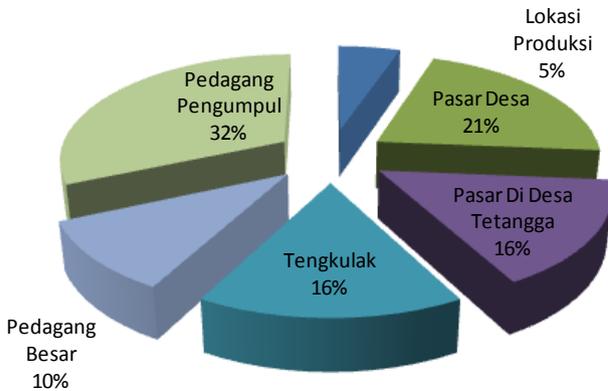
Sumber : Kecamatan Randangan Dalam Angka tahun 2011

Gambar 57. Jumlah Industri Kecil Di Kecamatan Randangan

Fasilitas pemasaran juga mendukung perkembangan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, sebagian besar menjual ke pedagang pengumpul (32%), walaupun ada juga yang menjual ke pasar desa (21%) dan pasar desa tetangga (16%). Fasilitas pasar desa hanya terletak di desa Motolohu. Namun fasilitas warung makan (58 unit) dan toko/warung kelontong (143 unit) tersebar di masing-masing desa.

Di wilayah ini terdapat pasar yang didukung oleh terminal angkutan antar daerah. Dilokasi ini menjadi jantung kegiatan perekonomian masyarakat baik yang berasal dari Kecamatan Randangan maupun dari daerah sekitar. Terkait

dengan kelembagaan perekonomian di wilayah ini yang cukup baik, karena adanya ketersediaan stok/hasil produksi pertanian terutama komoditi jagung yang telah menjadi primadona di wilayah ini. Kelembagaan ekonomi seperti pedagang pengumpul, tengkulak, dan pedagang besar adalah cermin dari karakter produk pertanian yang menjadi obyek transaksi sehingga sebagian orang-orang yang memainkan peran dalam kelembagaan ekonomi ini yaitu pedagang jagung.

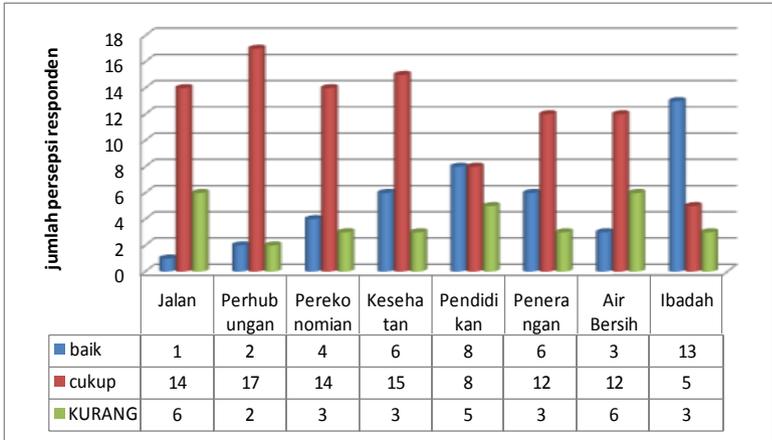


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012
 Gambar 58. Lokasi Penjualan Hasil Produksi Responden di Kecamatan Randangan

Persepsi responden tentang infrastruktur yang merupakan urat nadi kegiatan sosial ekonomi masyarakat nampak bahwa dominan responden menjawab keadaan sarana di wilayah ini dalam keadaan cukup dan responden paling banyak menjawab sarana dalam keadaan cukup yaitu

perhubungan, kemudian diikuti oleh kesehatan, selanjutnya sarana jalan dan perekonomian pada posisi yang sama. Terdapat satu sarana yang dianggap baik oleh responden yaitu sarana Ibadah. Demikian juga dengan sarana yang menurut responden masih kurang yaitu sarana jalan dan air bersih masing-masing 6 responden dan diikuti oleh sarana pendidikan yaitu 5 responden.

Dijumpai bahwa meskipun sarana pendidikan di Kecamatan Randangan masih dirasa kurang namun sebagian besar masyarakat menyekolahkan anaknya untuk tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi ke Kota Gorontalo dan sebagian ke Manado dan Makassar, sehingga desakan masyarakat untuk meningkatkan sarana pendidikan ini tidak begitu signifikan karena aspek hubungan langsung dengan masyarakat terputus disaat anak didik memilih untuk sekolah diluar daerah.

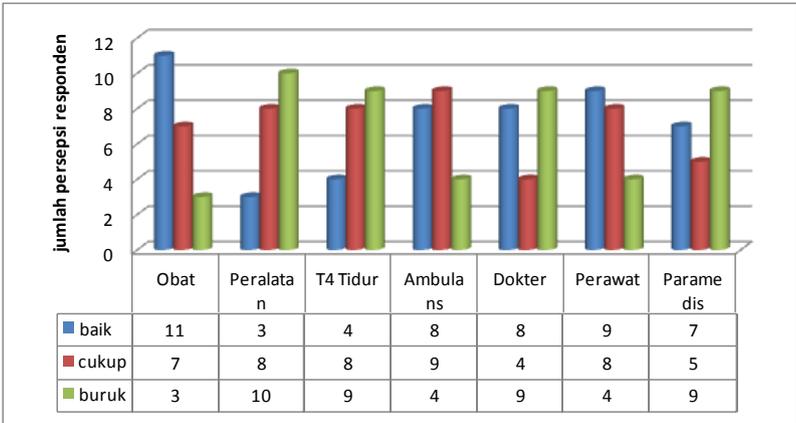


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012
 Gambar 59. Persepsi Responden Untuk Fasilitas Infrastruktur Di Kecamatan Randangan

Masalah kesehatan masyarakat difasilitasi dengan beberapa fasilitas kesehatan seperti puskesmas, pustu, pusling ataupun posyandu, masalah kesehatan anak umumnya adalah flu, ispa dan diare, sedangkan bagi pria dewasa kebanyakan menderita asam urat, masalah lambung, darah tinggi dan kolestrol, sedangkan penyakit yang diderita kaum perempuan dewasa tidak jauh berbeda. Fasilitas kesehatan di Randangan terdiri dari 1 Puskesmas terletak di ibukota kecamatan yaitu desa Molotohu, didukung oleh 3 Puskesmas Pembantu yang terletak di desa Banuroja, Imbody dan desa Sidorukun. Ada pula 3 unit Puskesmas Keliling, 13 Posyandu di masing-masing desa dan 4 Polindes di desa Manunggal Karya, Imbody, Sarimurni dan Sidorukun. Fasilitas kesehatan

dilengkapi dengan 3 tempat praktek dokter, serta 1 Apotik. Pada tahun 2011, jumlah dokter, bidan dan perawat di Randangan berturut-turut adalah 2, 7 dan 10 orang. Paramedis hanya lengkap di ibukota kecamatan.

Persepsi masyarakat tentang fasilitas kesehatan dapat dilihat pada Gambar berikut , dimana responden dominan memberikan jawaban cukup variatif. Aspek ketersediaan obat-obatan dipuskesmas responden menjawab dah cukup baik yaitu 11 responden dan yang menjawab cukup yaitu 7 responden sedang menjawab buruk yaitu 3 responden. Hal ini terbalik dengan persepsi responden terhadap peralatan medis, dimana responden dominan menjawab buruk yaitu 10 responden, demikian juga ketersediaan tempat tidur pasien masih dominan menjawab buruk yaitu 9 responden. Hal yang sama juga di aspek ketersediaan dokter masih terasa buruk dengan jawaban yang disampaikan 9 responden serta ketersediaan paramedis masih di dominasi oleh persepsi buruk yaitu 9 responden. Namun utnuk ketrediaan tenaga perawat di angga sudah memadai/baik dengan persepsi 9 responden.



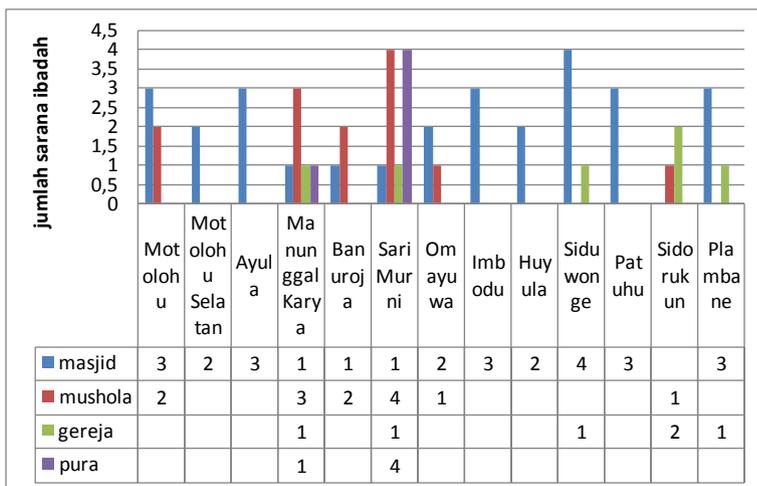
Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 60. Persepsi Responden Tentang Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Randangan

Kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Randangan ditandai dengan semangat gotong royong dan tetap memelihara adat istiadat yang berlaku. Walaupun sebagian masyarakat Randangan adalah transmigran berasal dari Pulau Jawa dan Bali, mereka hidup rukun, walaupun dari beragam etnis dan agama. Beberapa aktivitas sosial yang masih tetap dilestarikan oleh warga adalah rukun duka, kegiatan keagamaan seperti perayaan mauludan, isra mi'raj, tradisi tarunani, mohaulu, tumbilatohe dll.

Fasilitas ibadah seperti masjid dan mushola terdapat di masing-masing desa. Umat Hindu Budha cukup banyak di Kecamatan Randangan mencapai 1.035 orang, sehingga terdapat fasilitas 5 pura di desa Manunggal Karya dan Sari Murni.

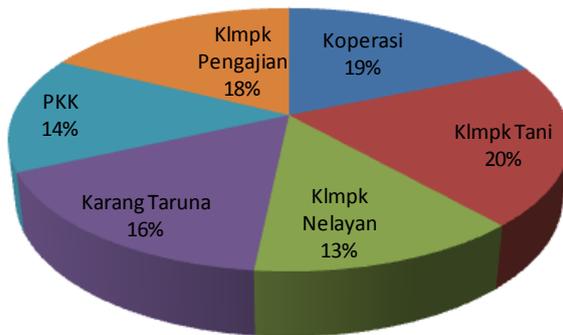
Demikian pula umat nasrani cukup banyak sejumlah 469 orang. Fasilitas gereja juga terdapat di desa Manunggal Karya dan Sari Murni.



Sumber : Kecamatan Randangan Dalam Angka tahun 2011
 Gambar 61. Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Randangan

Lembaga yang berpengaruh terhadap kegiatan sosial ekonomi terkait dengan profesi sebagai petani, yaitu kelompok tani (20%) disusul oleh koperasi (19%) dan kelembagaan sosial lain seperti kelompok pengajian (18%) dan karang taruna (18%). Lembaga tersebut turut mendukung beberapa tradisi seperti kepercayaan terhadap waktu penanaman yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan sosialekonomi masyarakat di kecamatan Randangan cukup tersedia dan aktif dan hampir merata meskipun nampak bahwa yang paling dominan yaitu kelompok tani, dimana

beberapa kelompok tani telah memiliki bengkel alat pertanian (bengkel Alsintan) seperti mesin pemipil jagung dengan kapasitas 2,5 ton/jam, mesin perontok padi kapasitas 1,2 ton/jam, sedangkan mesin pengupas kacang tanah dengan kapasitas 1,2 ton/ jam yang dimiliki oleh Pak Yanto,. Terkait dengan ketersediaan kelembagaan sosial ekonomi lainnya seperti Koperasi masih banyak yang memanfaatkan terutama masyarakat yang belum mampu menyiapkan persyaratan administrasi simpan pinjam di bank. Demikian juga untuk kelembagaan ekonomi nelayan masih lebih banyak mengandalkan kapasitas permodalannya di koperasi namun terdapat pula yang telah menggunakan fasilitas perbankan.



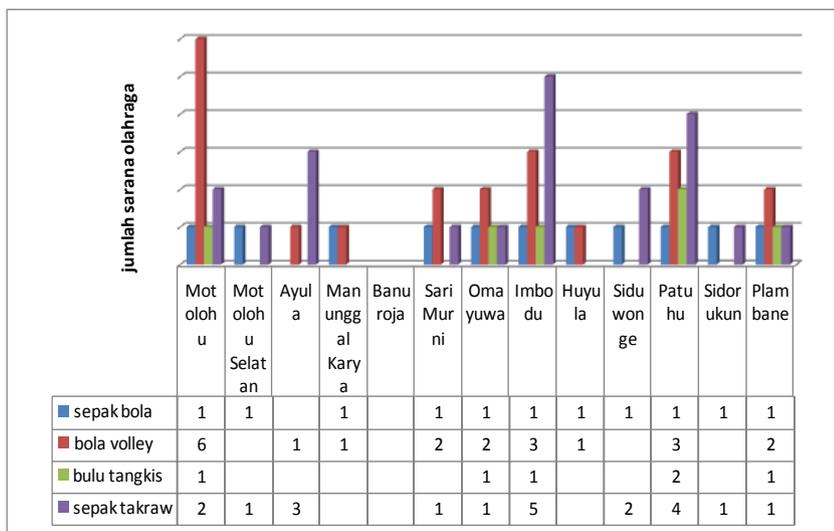
Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 62. Prosentase Persepsi Responden Terhadap Organisasi yang Berpengaruh Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi di Kecamatan Randangan

Sesuai dengan kondisi di kecamatan Randangan, bahwa kelembagaan agama(majlis ta'lim) hampir tersebar di setiap desa, bahkan di desa Ayula, terdapat 4 kelompok majlis ta'lim. Masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah kurangnya kemampuan dan ketrampilan, sehingga keberadaan LSM dan lembaga sosial yang dapat membantu masyarakat meningkatkan kemampuan soft skill sangat dibutuhkan. Terdapat 5 buah LSM yang masing-masing terdapat di desa Motolohu, Ayula, Omayuwa, Huyula, dan Plambane. Masalah lingkungan terkait pencemaran air oleh penambang tradisional juga dirasakan oleh masyarakat dan memerlukan penanganan oleh pihak yang berwenang.

Salah satu keunggulan Kecamatan Randangan adalah lengkapnya Sarana olahraga seperti nampak pada Gambar berikut kecuali di desa Banu Roja yang nyaris tidak memiliki sarana olahraga. Terdapat 5 desa yang memiliki sarana olahraga dari 13 desa yang ada .dan sarana olahraga yang paling banyak yaitu lapangan bola voli dan lapangan sepak takraw. Indikator ini merupakan potensi yang baik untuk dalam rangka pembinaan bakat dan minat masyarakat terhadap olahraga sekaligus untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui olahraga, dan hal ini menjadi peluang bagi para investor untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui sektor olahraga untuk dalam

rangka meningkatkan solidaritas masyarakat terhadap kegiatan usaha.

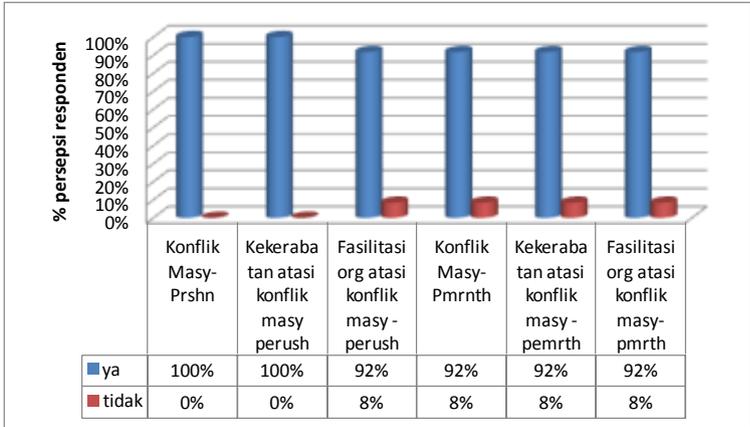


Sumber : Kecamatan Randangan Dalam Angka tahun 2011
 Gambar 63. Jumlah Sarana Olah Raga Di Kecamatan Randangan

Masalah sosial lain terkait pengelolaan tambang adalah klaim terhadap wilayah tambang dan keprihatinan terhadap kesejahteraan penambang tradisional. Isu kesenjangan sosial seringkali menjadi penyebab adanya tindak kriminal seperti pencurian kopra, jagung, ternak dan sumberdaya lain. Bentuk bantuan sosial seperti raskin, bantuan uang bahkan permodalan usahatani pernah diberikan, namun hal tersebut bukan solusi kesenjangan yang terjadi. Pemerintah desa diharapkan dapat membantu melalui musyawarah

dan pendekatan sosial pada masyarakat, sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran. Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang disesuaikan dengan peraturan desa yang telah disepakati bersama menjadi salah satu cara untuk mencapai mufakat. Adanya kepercayaan dan keterkaitan antar masyarakat dengan pemerintah desa menjadi salah satu kekuatan untuk mengatasi kesenjangan dan konflik yang terjadi.

Terkait dengan kegiatan investasi disektor pertambangan seperti yang dilakukan oleh PT Gorontalo Sejahtera Mining, hampir seluruh responden menjawab tidak mengetahui informasi secara langsung terkait dengan kegiatan usaha tersebut. Namun dari isu-isu yang ada saat ini terkait dengan poten konflik antara pertambangan tradisional dengan pertambangan profesional Hasil wawancara dan penggalian informasi melalui kegiatan FGD hampir seluruh responden kelembagaan yang terdiri dari para kepala desa berpendapat bahwa pengelolaan konsesi PT Gorontalo Sejahtera Mining berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat sekitar dengan perusahaan dan juga dengan pemerintah jika tidak disertai musyawarah. Namun dengan pendekatan kekeluargaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan, maka masalah-masalah yang timbul akan dapat direduksi.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

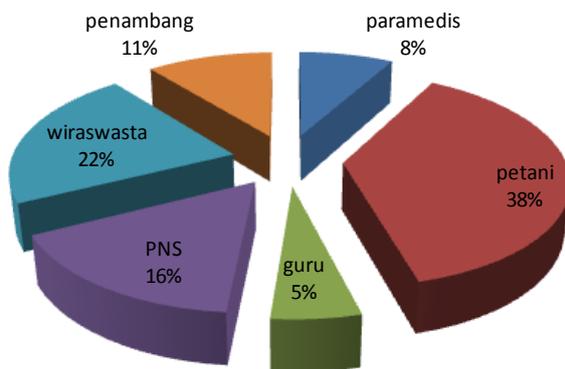
Gambar 64. Persepsi Responden Tentang Potensi dan Resolusi Konflik Antara Pengelolaan Tambang di Kecamatan Randangan

5. Kondisi Sosial Ekonomi Kelembagaan Kecamatan Patilanggio

Kecamatan Patilanggio terletak di sebelah selatan Marisa, ibukota Kabupaten Pohuwato, memiliki luas wilayah 298,82 km². Perbatasan kecamatan di sebelah utara adalah Kecamatan Marisa, Teluk Tomini di sebelah timur, Kecamatan Randangan di sebelah selatan serta Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat. Kecamatan Patilanggio memiliki 6 desa dan 26 dusun dengan karakteristik umum merupakan daerah aliran sungai dan dataran. Namun demikian ada beberapa desa yang memiliki wilayah pantai seperti Desa Manawa dan Dulomo dengan karakteristik pantai, lembah/aliran sungai dan dataran. Desa yang

memiliki luas terbesar adalah Iloheluma (100,33 km²) dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Manawa (7,83 km²). Ibukota kecamatan adalah desa Dulomo. Desa terjauh adalah Balayo (jarak 10 km dari ibukota kecamatan) dan dudempo (jarak 8 km dari ibukota kecamatan).

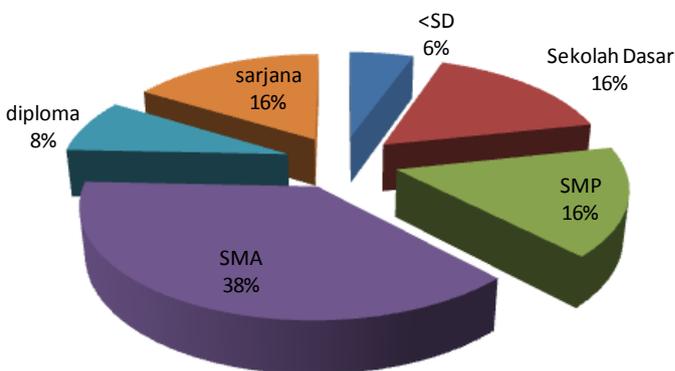
Kepadatan penduduk Patilanggio pada tahun 2010 sebesar 29 jiwa per km². Desa yang paling padat penduduknya adalah Manawa, yaitu 260 jiwa per km², sedangkan yang terendah adalah Balayo yaitu 17 jiwa per km². Jumlah anggota keluarga rata-rata 4 orang yang terdiri dari keluarga inti (ayah, ibu dan anak). Dari sisi ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk Patilanggio bekerja di sektor pertanian, industri pengolahan jasa, dan lainnya. Berikut gambaran pekerjaan utama responden di kecamatan Patilanggio.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 65. Komposisi Mata Pencarian Utama Responden di Kecamatan Patilanggio

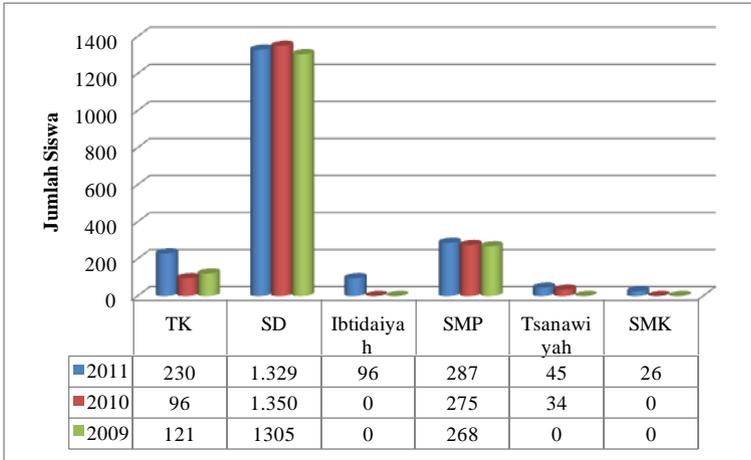
Sebagian besar pekerjaan utama responden adalah sebagai petani (38%), disusul dengan wiraswasta (22%), (Lampiran 17). Namun demikian, hampir sebagian besar responden memiliki pekerjaan sampingan di bidang pertanian. Keterbatasan kemampuan yang berdampak pada akses modal menjadi salah satu masalah utama dalam mengelola sumberdaya alam di kecamatan Patilanggio. Tingkat pendidikan menjadi salah satu komponen penting dalam menunjang kemampuan dalam mengelola sumberdaya alam. Gambar 66 berikut menjelaskan tingkat pendidikan responden di kecamatan Patilanggio.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012
 Gambar 66. Tingkat Pendidikan Responden Di Kecamatan Patilanggio

Informasi pada gambar 66 di atas mengindikasikan bahwa ternyata masih ada responden yang tidak tamat SD dengan prosentase 6%. Responden tersebut merupakan pengurus lembaga desa di desa Manawa dan pengurus kelompok tani di desa Suka Makmur. Namun sebagian besar responden berpendidikan SMA (38%) sehingga informasi yang diberikan tentang persepsi dan pengelolaan sumberdaya alam terutama terkait pertambangan dirasakan cukup sesuai, ada juga responden tingkat sarjana sebanyak 16%. Kondisi umum tingkat pendidikan di kecamatan Patilanggio memang bervariasi terkait dengan fasilitas pendidikan yang ada.

Fasilitas pendidikan dasar seperti taman kanak-kanak dan sekolah dasar sudah tersedia di masing-masing desa, sedangkan fasilitas pendidikan lanjutan tingkat pertama (SMP) berjumlah 3 buah yang masing-masing terletak di desa Iloheluma, Dulomo dan Balayo. Fasilitas sekolah menengah umum belum ada ada di kecamatan Patilanggio, namun pada tahun 2011 didirikan sebuah SMK di desa Dulomo untuk memfasilitasi siswa di sekitarnya, namun jumlah siswa masih terbatas 26 orang. Perkembangan pendidikan di kecamatan Patilanggio cukup pesat, ada pilihan pendidikan madrasah tsanawiyah sejak tahun 2010 dan madrasah ibtidaiyah sejak tahun 2011 di desa Iloheluma. Berikut informasi perkembangan siswa sekolah di kecamatan Patilanggio.



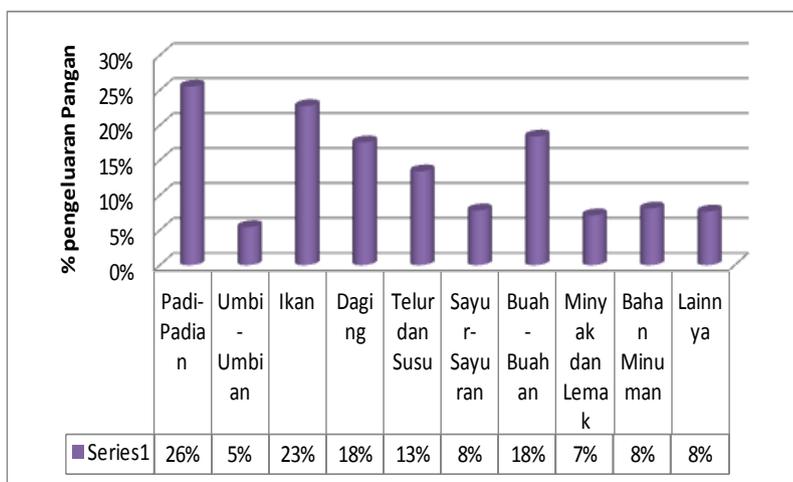
Sumber : Kecamatan Patilanggio Dalam Angka tahun 2011

Gambar 67. Tingkat Partisipasi Pendidikan Di Kecamatan Patilanggio

Permasalahan pendidikan yang utama di kecamatan Patilanggio berdasarkan informasi dari tenaga pendidik dan responden adalah kurangnya kesadaran orang tua tentang pendidikan, kurangnya motivasi dari orang tua, kurangnya minat untuk bersekolah dari siswa. Dari sisi eksternal terkait fasilitas sekolah adalah jarak sekolah yang relatif jauh yang berimplikasi pada biaya pendidikan, terutama untuk siswa yang berdomisili jauh dari fasilitas sekolah lanjutan atas atau SMK.

Selain tingkat pendidikan, salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah berdasarkan tingkat pengeluaran dalam keluarga. 53% pengeluaran pangan, 47% pengeluaran nonpangan

dengan rincian prosentase pengeluaran pangan untuk padi-padian yaitu 25%, kemudian di ikuti prosentase pengeluaran pangan ikan sebanyak 23%, kemudian prosentasi pengeluaran pangan yang tidak kalah penting yaitu buah-buahan mencapai 18%, proporsi pengeluaran pangan untuk buah adalah sama dengan proporsi pengeluaran pangan untuk daging yang mencapai 18% . Selanjutnya telur dan susu yaitu 13%. Aspek penting lain dalam pengeluaran pangan yaitu sayur mayur yang mencapai 8% dimana proporsi ini sama dengan proporsi bahan minuman dan proporsi yang paling rendah yaitu pada pengeluaran umbi-umbian.

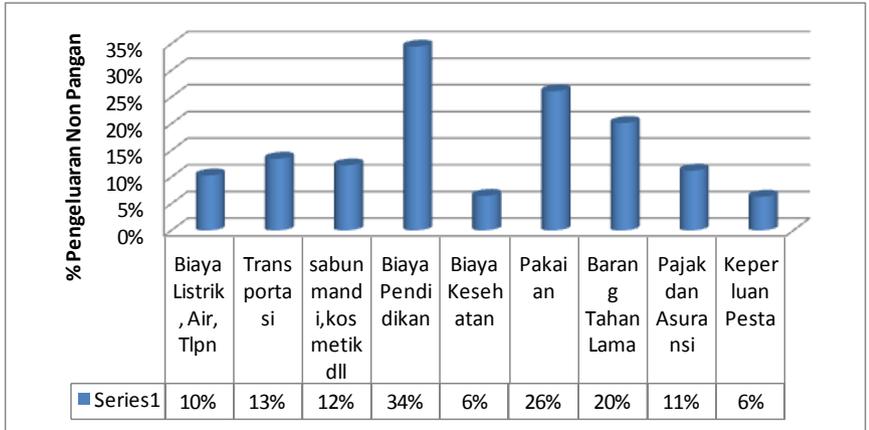


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 68. Prosentase Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Responden di Kecamatan Patilanggio

Komponen pengeluaran non-pangan dapat digunakan juga untuk mengamati kecenderungan perilaku ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan juga dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Patilanggio. Aspek yang paling dominan dalam kegiatan pengeluaran non-pangan yaitu biaya pendidikan mencapai 34%, hal ini merupakan indikator perilaku ekonomi masyarakat di wilayah ini mempertimbangkan hal-hal yang bersifat jangka panjang, namun disisi lain kecenderungan biaya pendidikan yang mahal menjadi indikator mengapa biaya pendidikan berada pada proporsi yang paling atas. Kemudian diikuti oleh biaya pakaian dengan prosentasi 26%. Demikian juga pengeluaran non-pangan pada barang-barang tahan lama mencapai 20%.

Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat di wilayah ini perilaku ekonominya cenderung konsumtif. Perilaku ekonomi ini sepadan dengan hasil pengamatan langsung dilokasi penelitian bahwa disepanjang jalan Patilanggio lewat bawah terdapat deretan rumah permanen yang besar-besar dan bagus, artinya kemampuan ekonomi masyarakat untuk melakukan transaksi terhadap kebutuhan non-pangan terutama pakaian dan barang-banrang tahan lama cukup baik. Gambar berikut menjelaskan prosentase pengeluaran non pangan rumah tangga responden di kecamatan Patilanggio.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

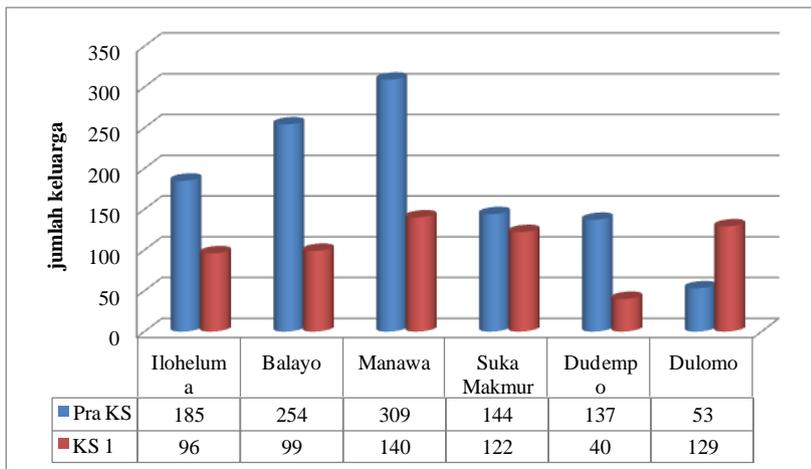
Gambar 69. Prosentase Pengeluaran Non Pangan Rumah Tangga Responden di Kecamatan Patilanggio

Indikator ekonomi di wilayah ini akan semakin lengkap kaitannya dengan perilaku ekonomi masyarakat akan nampak pada kondisi perekonomian masyarakat itu sendiri. Gambar 70 menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Patilanggio dominan berada pada pra keluarga sejahtera dan desa yang paling tinggi tingkat pra kesejahteraan yaitu Manawa yaitu 309 orang, diikuti oleh desa Balayo 254 orang kemudian menyusul desa Iloheluma sebanyak 185 orang, sedang desa Suka Makmur dan desa Dudepo masing-masing 144 dan 137 orang yang berada pada keluarga pra sejahtera. Akan tetapi terdapat

satu Desa berada pada keluarga sejahtera satu yaitu Desa Dulomo dengan jumlah penduduk 52 orang.

Kemampuan ekonomi wilayah ini didukung oleh ketersediaan sumberdaya lahan yang luas, sepanjang jalan terdapat hamparan sawah dengan dukungan irigasi teknis dan perkebunan kelapa yang luas juga. Namun dijumpai perkebunan kelapa tersebut bukan milik masyarakat sekitar lagi, tetapi telah dijual dan dikuasai oleh orang-orang tertentu dari Kota Gorontalo seperti para pejabat pemerintah dan pengusaha lokal keturunan Cina dan Arab. Oleh karena itu peningkatan keluarga prasejahtera satu maupun prasejahtera dipengaruhi oleh kondisi kepemilikan atau penguasaan lahan di wilayah ini (*Land tenure right*).

Meskipun penduduk wilayah ini didominasi oleh penduduk asli Gorontalo akan tetapi sebagian besar dari penduduk telah banyak beradaptasi dengan pola kerja penduduk pendatang dari luar Kabupaten Pohuwato seperti transmigrasi dari pulau Jawa. Adanya asimilasi pola kerja ini berakibat positif terhadap peningkatan keluarga pra-sejahtera bila dibandingkan dengan penduduk yang berada di wilayah/kecamatan lain.



Sumber : Kecamatan Patilanggio Dalam Angka tahun 2011

Gambar 70 Sebaran Keluarga Pra KS dan KS I di Kecamatan Patilanggio

Profil ekonomi masyarakat di kecamatan Patilanggio sebagian besar dengan memanfaatkan sumberdaya alam. Dari sisi ketenagakerjaan, hampir seluruh desa di kecamatan Patilanggio bekerja di sektor pertanian, namun ada beberapa desa yang memiliki sumberdaya tambang seperti desa Balayo, masyarakatnya berprofesi sebagai penambang. Industri pengolahan, sektor perdagangan dan akomodasi menjadi pilihan masyarakat di desa Iloheluma.

Komoditas pangan masih menjadi andalan di tiap desa di kecamatan Patilanggio, luas panen dan produksi padi pada tahun 2010 sebesar 758 hektar dengan produksi sebesar 4.191,74 ton. Untuk palawija, produksi jagung di Patilanggio pada

tahun 2010 sebesar 89.441,18 ton sedang luas lahan 15.263 hektar. Produksi produksi ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah masing-masing adalah 144,12 ton, 114,29 ton dan 28,35. Jagung masih menjadi komoditas andalan walau nampak bahwa terdapat keaneragaman komoditas pangan. Dukungan fasilitas pengolahan lahan masih sangat terbatas, traktor roda dua hanya sejumlah 11 unit untuk melayani beberapa desa di kecamatan Patilanggio. Demikian pula pengolahan padi, tercatat 2 mesin penggilingan padi besar dan 20 mesin perontok dan pengolah jagung, jumlah yang dirasakan kurang memadai dibandingkan dengan kapasitas produksi pangan di kecamatan Patilanggio.

Potensi hortikultura selain komoditas andalan yaitu cabe rawit (produksi 216 ton), terdapat juga tomat, terung, bawang merah, walau jumlah panennya tidak terlalu banyak. Buah musiman yang sesuai dengan iklim yang kering adalah mangga (produksi 145 ton) disusul produksi buah yang tidak mengenal musim seperti pisang dan pepaya. Potensi buah lainnya masih banyak dan relatif beragam seperti jeruk, nangka, jeruk, nanas, durian yang dapat menjadi produk andalan jika dikelola dengan baik.

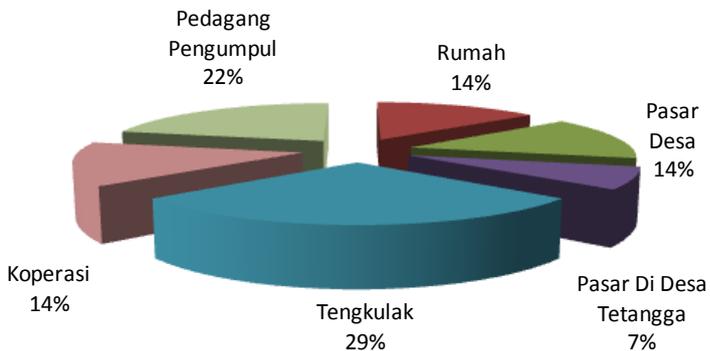
Dijumpai bahwa potensi buah yang tidak mengenal musim di wilayah ini cukup luas bahkan sebagian tidak dibudidaya (tumbuh sendiri). Peluang buah ini untuk diolah menjadi makanan

jadi seperti keripik pisang kapok khas Patilanggio (branding) hampir tidak dijumpai terutama pengolahan hasil pertanian dalam skala rumah tangga (home industri) akan sangat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga akan berdampak pula pada penurunan angka keluarga pra-sejahtera 1.

Potensi tanaman perkebunan seperti kelapa (luas panen : 2.058 dan produksi mencapai 1.750,50 ton) menjadi andalan selain kakao, jambu mente dan kemiri. Komoditas perkebunan tersebut potensial sebagai bahan baku agroindustri pangan atau home industry pangan terutama pengembangan produk ikutan dari masing-masing komoditi terutama komoditi kelapa yang telah dibudidayakan secara turun temurun oleh petani diwilayah ini.

Pemasaran menjadi salah satu kendala yang dihadapi, pasar tradisional hanya ada satu dan terletak di desa Ileholuma, umumnya masyarakat mengandalkan tengkulak atau pedagang pengumpul. Seperti pada gambar 70 berikut, sebanyak 29% responden menjual melalui tengkulak, 22% melalui pedagang pengumpul. Fasilitas pasar menurut responden hanya sedikit dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu kendalanya adalah jarak dan beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh tengkulak seperti dana awal sebelum panen dan sebagainya.

Hubungan tradisional antar tengkulak dan penjual bukan hanya sebatas hubungan dagang, namun sampai hubungan sosial seperti terkait dengan masalah keluarga atau sengketa penguasaan lahan, kemudian meningkat menjadi bagian dari proses penyelesaian konflik melalui jaminan keuangan dari sang tengkulak dalam bentuk administrasi sederhana karena terbangun dari hubungan kepercayaan dan kekerabatan, bahkan hubungan politik, karena sebagian dari para tengkulak memiliki peran ganda bahkan sebagian adalah tokoh masyarakat di wilayah ini kemudian menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

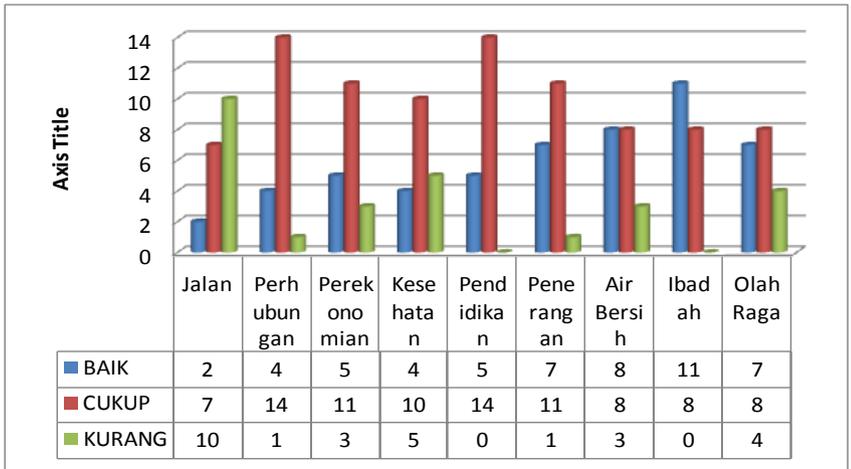


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012
 Gambar 71. Pilihan Lokasi Pemasaran Produk Responden Di Kecamatan Patilanggio

Kecamatan Patilanggio terdiri di dataran dan lembah serta memiliki wilayah pantai, sehingga produksi perikanan juga menjadi salah satu

andalan selain ternak sapi. Populasi ternak besar yang terdiri dari sapi pada tahun 2010 adalah 7.670 ekor, sedangkan untuk populasi ternak kecil, terdiri dari kambing 2.358 ekor. Populasi ayam buras juga relatif banyak, sekitar 21.387 ekor. Potensi peternakan tersebut diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan masyarakat. Untuk perikanan laut umumnya terdapat di Kecamatan Dudempo dan Dulomo, terdapat 12 rumah tangga nelayan dan 21 nelayan yang memasok ikan untuk kecamatan Patilanggio dan sekitarnya. Sentra perikanan darat di desa Manawa dan Iloheluma, selain ada pula di Dudempo dan Dulomo, terdapat 13 rumah tangga yang bermata pencaharian sebagai pembudidaya ikan. Besarnya produksi ikan belum tercatat, sebab belum ada fasilitas TPI.

Keterbatasan infrastruktur terkait transportasi menjadi masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Gambar 72 berikut menjelaskan persepsi responden tentang kondisi infrastruktur, nampak bahwa fasilitas jalan menjadi hal utama yang membutuhkan pembenahan selain fasilitas kesehatan. Persepsi responden terhadap ketersediaan infrastruktur didominasi oleh warna merah pada Gambar grafik batang dibawah ini dimana untuk saat ini infrastruktur ini dirasa cukup dengan asumsi bahwa sarana ini dapat ditingkatkan.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 72. Persepsi Tentang Kondisi Infrastruktur Di Kecamatan Patilanggio

Ketersediaan air minum yang sehat sangat dibutuhkan masyarakat. Pada tahun 2010, sebagian besar kebutuhan air di Patilanggio masih dipenuhi oleh sumber air seperti sumur dan sungai. Air PAM sudah terdistribusikan, namun masih terbatas di desa Manawa dan Suka Makmur. Program air minum dan penyehatan lingkungan yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat belum nampak di wilayah ini meskipun potensi sumberdaya air cukup tersedia. Akan tetapi kesadaran masyarakat akan pentingnya penyediaan air bersih mulai nampak nyata dengan membeli air galon yang disediakan oleh pedagang air keliling diperkampungan.

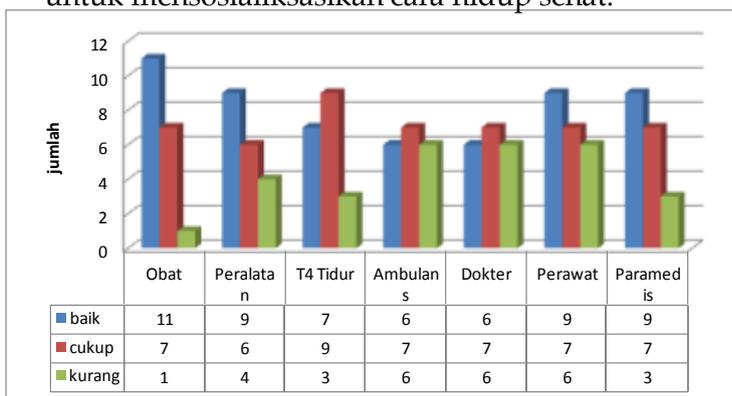
Fasilitas kesehatan di Patilanggio terdiri dari 1 Puskesmas yang terletak di ibukota kecamatan (desa Dulomo), 2 Puskesmas Pembantu (di desa Iloheluma dan Balayo). Terdapat 12 Posyandu yang sudah tersebar pada masing-masing desa, bahkan desa Manawa dan Suka Makmur memiliki masing-masing 3 unit posyandu. Penyakit diare/muntaber, gizi buruk, ISPA (infeksi saluran pernafasan), kurangnya pemahaman masyarakat tentang imunisasi merupakan masalah umum kesehatan anak-anak balita di kecamatan Patilanggio.

Hal tersebut memerlukan perhatian lebih lanjut karena jika tidak ditangani akan menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Masalah kesehatan orang dewasa lebih banyak terkait penyakit degeneratif seperti hipertensi, asam urat, dan ada pula beberapa penyakit khusus seperti penyakit kusta dan TBC, namun tidak bersifat endemik. Salah satu kendala terkait masalah kesehatan adalah keterbatasan tenaga para medis yang memberikan pelayanan medic atauoun memberikan sosialisasi tentang pentingnya penanggulangan penyakit secara dini.

Pada tahun 2010, tenaga kesehatan di Patilanggio terdiri dari 1 Dokter berlokasi di puskesmas kecamatan, 4 perawat yang tersebar di beberapa desa kecuali Suka Makmur dan Dudepo. Kesehatan ibu dan anak di fasilitasi oleh keberadaan 4 Bidan yang juga tersebar di setiap desa kecuali desa Suka makmur dan Dudepo.

Dukungan 5 orang dukun bayi terlatih dan 2 dukun bayi belum terlatih belum mampu mengatasi permasalahan kesehatan ibu dan anak di kecamatan Patilanggio. Gambar 73 berikut menginformasikan persepsi responden di kecamatan Patilanggio tentang sarana kesehatan yang ada.

Proporsi masing-masing komponen pada Gambar grafik batang dibawah menunjukkan bahwa persepsi baik dan cukup hampir barada pada posisi yang sama sekalipun persepsi baik lebih dominan. Namun persepsi cukup memiliki proporsi besar bila di kombinasi dengan persepsi kurang. Di jumpai juga bahwa fasilitas penunjang kesehatan seperti iklan dan pamphlet tentang cara hidup sehat masih terbatas, demikian pula pemanfaatan sarana sosial seperti sekolah dan masjid belum digunakan untuk mensosialisasikan cara hidup sehat.

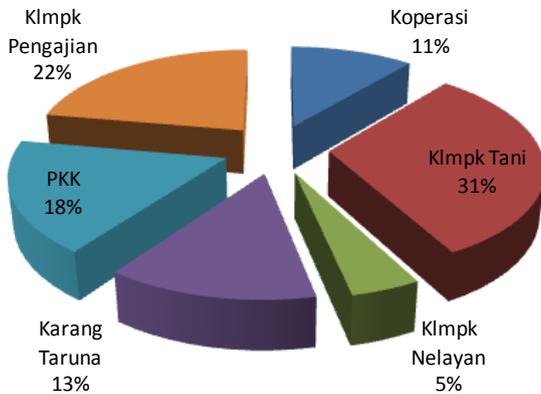


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 73. Persepsi Responden Tentang Sarana Kesehatan di Kecamatan Patilanggio

Profil sosial ekonomi masyarakat di kecamatan Patilanggio diwarnai dengan beragam aktivitas sosial seperti gotong royong, dana duka, simpan pinjam, arisan, program generasi sehat dan cerdas, posyandu, kegiatan karang taruna seperti rema muda. Tradisi keagamaan masih tetap dipelihara seperti maulud, ibadah kolom BPK, serta kegiatan di majelis taklim. Hal ini tergambar pada jumlah majlis ta'lim di kecamatan Patilanggio, yang totalnya mencapai 10 buah dan tersebar di masing-masing desa.

Kerukunan antar umat beragama juga tetap di jaga. Pada tahun 2010, fasilitas ibadah di Patilanggio terdiri dari 15 masjid, 1 mushola, dan 2 gereja protestant yang masing-masing terletak di desa Ilohulema dan Dudepo. Penganut kristiani jumlahnya sekitar 136 orang hidup rukun berdampingan dengan penduduk muslim. Gambar 74 berikut menjelaskan persepsi responden tentang organisasi yang berpengaruh secara sosial ekonomi dikecamatan Patilanggio.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 74. Persepsi Responden Tentang Organisasi Yang Berpengaruh Secara Sosial Ekonomi Di Kecamatan Patilanggio

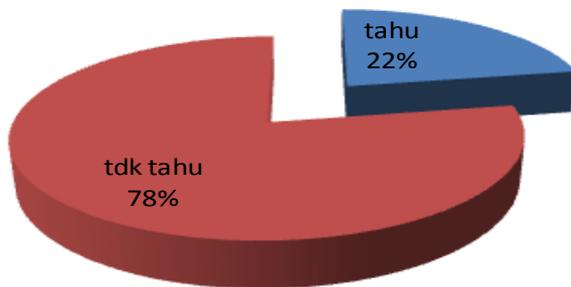
Pada gambar 74 di atas diketahui bahwa organisasi yang bersifat sosial ekonomi seperti kelompok tani (31%) dianggap memiliki pengaruh dalam mendukung keberlanjutan usahatani. Selanjutnya kelompok pengajian seperti majlis taklim (22%) dianggap cukup penting, selain kelompok PKK (18%) bagi ibu-ibu dan kaum muda memandang bahwa kegiatan karang taruna juga berpengaruh sebesar 13%. Dukungan fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan volley, bulutangkis dan sepak takraw menjadi salah satu daya tarik aktifnya para pemuda/pemudi di masing-masing desa di kecamatan Patilanggio,

terutama di Desa Ilelohuma yang memiliki sampai 10 unit lapangan sepak takraw.

Masalah sosial yang diinformasikan pernah muncul adalah konflik tanah yang terjadi antara masyarakat dengan masyarakat. Sedangkan konflik yang pernah muncul antara masyarakat dan pemerintah adalah tentang wilayah pertambangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pengelola organisasi dan kelembagaan desa, sebagian besar berpendapat bahwa keberadaan organisasi sosial kemasyarakatan dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keagamaan anggotanya. Faktor kepercayaan kepada pengelola lembaga dan keterkaitan antar masyarakat menjadi faktor yang dominan. Fungsi organisasi sebagai pengendali menjadikan opini bahwa setiap masalah diselesaikan dengan musyawarah. Perlu juga upaya mediasi dan sosialisasi dengan cara yang tepat melalui diskusi kelompok dengan melibatkan aparat desa dan masyarakat dan aparat keamanan. Terdapat 2 LSM yang berposisi di desa Suka Makmur dan Dudempo diharapkan menjadi lembaga yang mampu memediasi konflik yang terjadi di masyarakat.

Terkait dengan pertambangan tradisional, ternyata sebagian besar responden (78%) belum mengetahui bahwa sejak Tahun 2008 sebagian kawasan Suaka Margasatwa Panua dirubah statusnya menjadi HPT (Hutan Produksi Terbatas)

dalam RTRWK (Revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten) Pohuwato. Informasi ini terkait dengan pengelolaan tambang oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya seperti KUD Dharma Tani dan PT GSM.



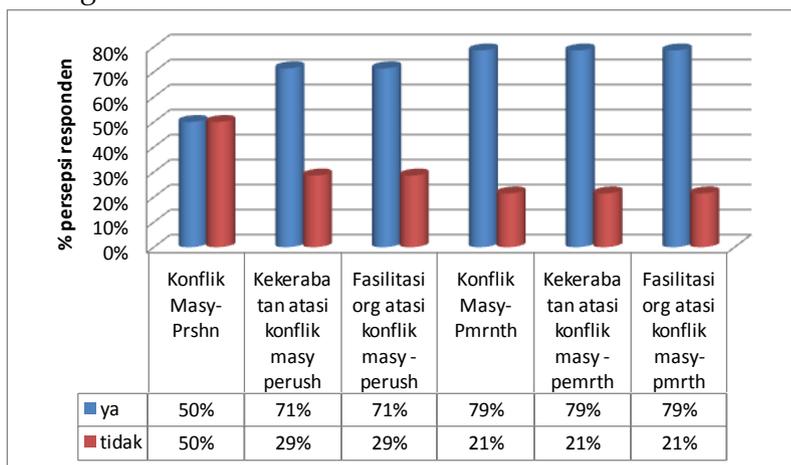
Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 75. Persepsi Responden Tentang Perubahan Status Suaka Margasatwa Panua

Hal ini berimplikasi pada beberapa hal antara lain persepsi responden terhadap potensi konflik antara masyarakat dengan perusahaan dan antara masyarakat dengan pemerintah tentang pengelolaan sumberdaya tambang. Hasil yang berbeda nampak pada persepsi responden terkait tidak adanya potensi konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan (50%). Potensi konflik yang lebih besar persentasenya adalah antara masyarakat dengan pemerintah (79%). Hal ini dapat dijadikan rujukan awal bahwa responden di Kecamatan patilanggio memiliki pandangan bahwa

konflik masyarakat dengan perusahaan pertambangan mayoritas menjawab tidak ada.

Pada dasarnya bentuk konflik ini lebih memosisikan pemerintah pada pihak pengambil keputusan dalam arah kebijakan pemanfaatan sumberdaya tambang di wilayah tersebut. Namun demikian, menurut pendapat responden seperti tergambar pada grafik, resolusi konflik dapat ditempuh dengan cara kekeluargaan dan melalui mediasi kelembagaan atau organisasi kemasayarakat melalui pengurus dan ketua organisasi tersebut.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 76. Persepsi Responden Tentang Potensi Konflik dan Resolusi Konflik Pengelolaan Tambang di Kecamatan Patilanggio

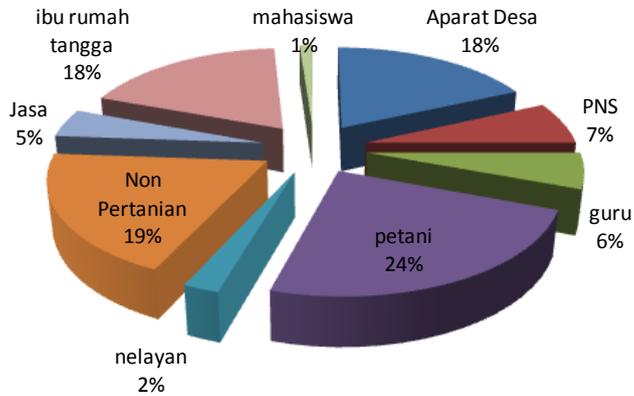
6. Kondisi Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Kecamatan Marisa

Kecamatan Marisa merupakan ibukota kabupaten Pohuwato, memiliki luas wilayah 39,4775 km² ini berbatasan dengan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah di sebelah utara, Kecamatan Paguat di sebelah timur, Teluk Tomini di sebelah selatan serta Kecamatan Patilanggio di sebelah barat. Terdapat 8 desa di kecamatan Marisa. yaitu Marisa Selatan, Pohuwato, Pohuwato Timur Marisa Utara, Teratai, Botubilotahu Indah, Palopo, dan Bulangita dengan ibukota kecamatan terletak di Marisa Selatan. Jika dilihat dari luas wilayahnya, maka desa yang memiliki luas terbesar adalah desa Pohuwato Timur dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Pohuwato.

Topografi wilayah Kecamatan Marisa sebagian besar merupakan daerah dataran dan daerah Aliran Sungai, walaupun jika dikaji lebih jauh, tiap tipe wilayah ada di kecamatan Marisa. Misalnya wilayah pantai dimiliki oleh desa Pohuwato, Pohuwato Timur dan Palopo, sementara daerah lainnya dicirikan dengan daerah berlembah dan berbukit. Agroekologi wilayah yang beragam menyebabkan keragaman mata pencaharian sebagian warganya. Dari sisi ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk Marisa bekerja di sektor pertanian dan industri pengolahan. Hanya 5% dari responden yang memiliki profesi sebagai

penambang, itupun hanya sebagai mata pencaharian sampingan.

Letak geografis Kecamatan Marisa yang cukup strategis menyebabkan wilayah berkembang dari berbagai sektor. Hal ini nampak dari berkembangnya sektor jasa seperti penginapan dan jasa perbankan di wilayah ini sebagai indikator adanya aktifitas yang cukup meningkat. Sektor lain yang sedang berkembang di wilayah ini yaitu perkebunan dan dan pertambangan. Terdapat dua perusahaan besar yang telah berinvestasi meskipun lokasi investasi berada di Kecamatan Pepayato, akan tetapi kegiatan perusahaan ini berlokasi di Kecamatan Marisa. Dampak dari kegiatan perekonomian anantara lain yaitu meningkatnya penyerapan tenaga kerja baik disektor formal maupun informal, tersedianya outlet-outlet penjualan berupa makanan dan jasa telekomunikasi, demikian pula took-toko gahan bangunan cukup berkembang di Kecamatan Marisa. Selanjutnya dampak lain yaitu tumbuhnya pelayanan terhadap jasa pendidikan termasuk pendidikan tinggi di wilayah ini.



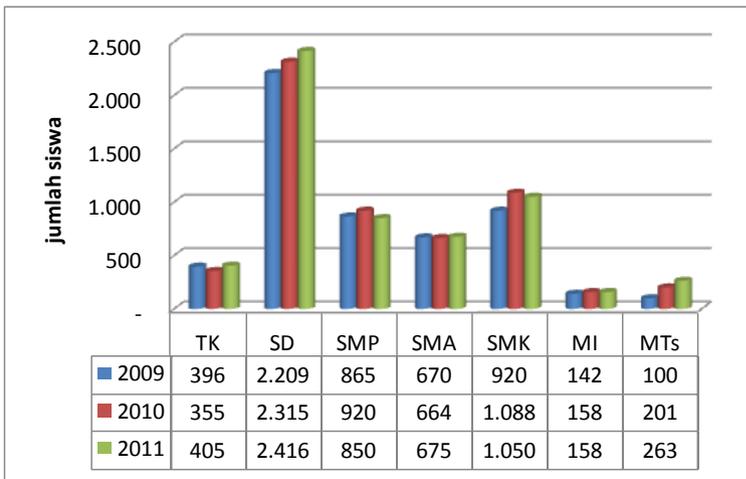
Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 77. Mata Pencaharian Utama Respondendi Kecamatan Marisa

Jumlah penduduk Marisa pada tahun 2010 adalah 17.310 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 8.547 jiwa dan penduduk perempuan 8.763 jiwa. Kepadatan penduduk Marisa pada tahun 2010 sebesar 439 jiwa per km². Desa yang paling padat penduduknya adalah Marisa Utara, yaitu 3.282 jiwa per km², sedangkan yang terendah adalah Bulangita yaitu 124 jiwa per km². Kepadatan penduduk terkait dengan banyaknya fasilitas pendukung seperti fasilitas perekonomian, kesehatan dan pendidikan.

Fasilitas pendidikan untuk taman kanak-kanak sudah terdapat pada masing-masing desa kecuali di desa Bulangita. Pendidikan sekolah dasar, minimal terdapat satu sekolah, bahkan di desa Teratai terdapat 3 SD dan desa Botubilotahu Indah terdapat

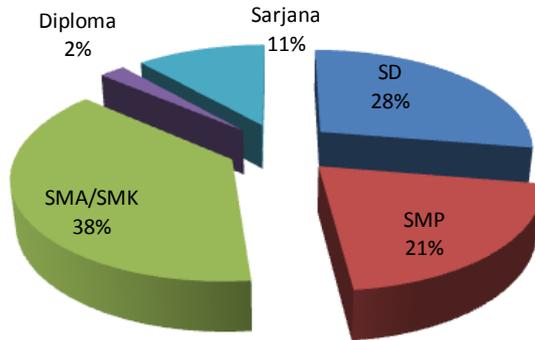
2 SD, namun pengecualian pada desa Marisa Utara yang belum terdapat fasilitas SD. Terdapat 3 buah SMP di kecamatan Marisa yang tersebar pada desa Teratai, Botubilotahu Indah dan Marisa Selatan, sedangkan sekolah menengah lanjutan umum hanya ada 1 buah terdapat di desa Teratai. Namun SMU tersebut didukung 2 buah SMK di desa Teratai dan Pohuwato Timur. Fasilitas pendidikan umum tersebut didukung oleh berdirinya Madrasah Ibtidaiyah di Pohuwato Timur dan Madrasah Tsanawiyah di Pohuwato Timur dan Palopo. Berikut diskripsi jumlah siswa untuk masing-masing tingkatan sejak tahun 2009.



Sumber : Kecamatan Marisa Dalam Angka tahun 2011
 Gambar 78. Tingkat Partisipasi Pendidikan siswa tingkat TK sampai SMU di Kecamatan Marisa

Pada gambar 78 nampak bahwa sejak tahun 2009, jumlah siswa SD mengalami peningkatan, namun prosentasi siswa SD dan MI yang mampu melanjutkan ke sekolah menengah pertama hanya sekitar kurang lebih 40% saja. Namun demikian prosentase tersebut diperkirakan sebagian besar dapat melanjutkan ke SMA atau SMK mengingat jumlah siswa sekolah tersebut lebih besar dibanding dengan siswa SMP dan MTs.

Hal serupa tergambar pada tingkat pendidikan responden (gambar 79) yang hampir 28% berpendidikan SD, namun yang berpendidikan SMA/SMK juga relatif banyak sejumlah 38% (Lampiran 21). Banyaknya pendatang di kecamatan Marisa terkait bidang kesehatan (paramedis) dan pendidikan (guru) dapat mempengaruhi motivasi warga untuk bersekolah. Bila dikategorikan dalam model pendidikan sembilan tahun maka proporsi responden yang berpendidikan dasar sekitar 49% sedang res[ponden yang memiliki pendidikan menengah sampai pendidikan yaitu 51%. Bila dikaitkan dengan pengembangan investasi disektor pertambangan maka proporsi tingkat pendidikan masih jauh dari kebutuhan akan tenaga kerja disektor pertambangan. Terutama kebutuhan tenaga kerja di lini tengah seperti koordinator lapangan, koordinator dibidang administrasi.

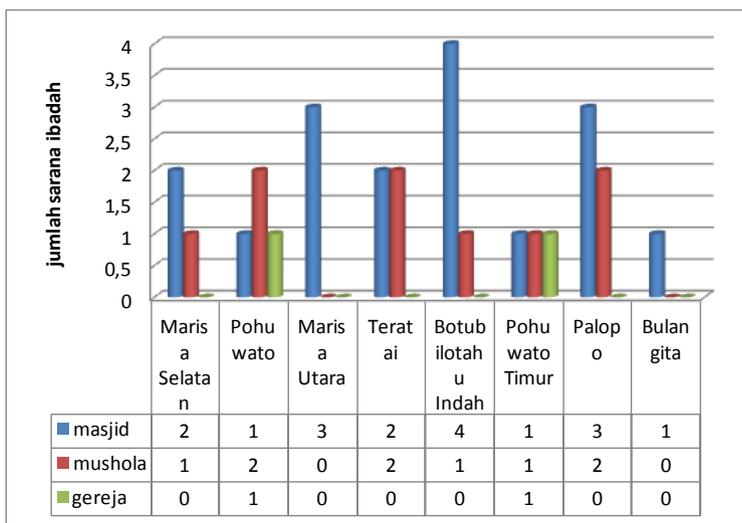


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012
 Gambar 79. Tingkat Pendidikan Responden Di Kecamatan Marisa

Hasil wawancara dengan responden di kecamatan Marisa mengindikasikan bahwa fasilitas pendidikan dasar sudah cukup memadai. Ada beberapa alasan mengapa banyak siswa putus sekolah antara lain adalah kurang motivasi dari keluarga, lebih mementingkan untuk membantu perekonomian keluarga selepas sekolah dasar. Biaya pendidikan terkait dengan kebutuhan transportasi sebab sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK hanya terdapat pada wilayah tertentu.

Kerukunan hidup antar umat beragama merupakan hal yang penting untuk stabilitas sosial dan ekonomi. Masyarakat di Kecamatan Marisa memiliki keragaman beragama yang kompleks, walaupun penduduk muslim merupakan mayoritas (17.158 KK), tetap menjaga kerukunan dengan masyarakat Kristen protestan dan katolik (132 KK atau 0,8%) dan warga yang memeluk agama Hinda

dan Budha (51 KK atau 0.3%). Pada tahun 2010, fasilitas ibadah di Marisa terdiri dari 17 masjid, 9 mushola dan 2 gereja protestan, walaupun belum ada fasilitas ibadah untuk pemeluk agama Hindu dan Budha, mereka dapat beribadah di Kecamatan tetangga yang memiliki Pura atau Wihara. Kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Marisa merupakan model sosial capital yang baik untuk pengembangan investasi dalam bentuk material capital karena salah satu aspek yang dapat menentukan kemajuan suatu investasi adanya faktor luar “Exsternal faktor” yang menjadi pendukung iklim usaha di Kecamatan Marisa.



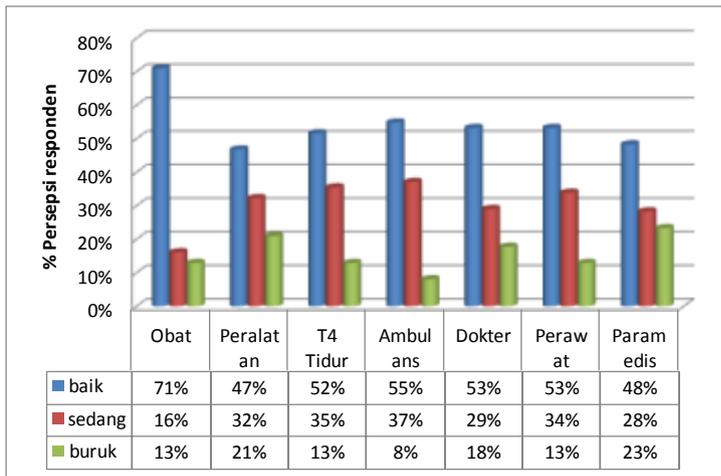
Sumber : Kecamatan Marisa Dalam Angka tahun 2011
 Gambar 80. Jumlah Sarana Ibadah di Kecamatan Marisa

Aspek lain yang penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat adalah aspek kesehatana. Terkait masalah kesehatan, fasilitas puskesmas dan pusling terletak di desa Marisa Selatan, namun demikian posyandu sudah merata terdapat pada masing-masing desa, bahkan ada 3 desa yaitu Teratati, Botubilotahu Indah dan Bulangita yang memiliki 2 posyandu. Fasilitas toko obat dan apotik masing-masing terletak di Marisa Utara. Jumlah paramedis masing sangat terbatas, hanya terdapat 2 orang dokter yang berpraktek di Marisa Utara dan marisa Selatan, terdapat 4 orang bidan dan 7 orang perawat.

Berdasarkan informasi responden, penyakit yang diderita anak-anak biasanya panas, batuk, demam, ada sebanyak 26% responden yang menyatakan bahwa masalah gizi buruk balita masih menjadi masalah dalam kesehatan anak-anak. Masalah kesehatan perempuan dan lelaki dewasa umumnya adalah kolestrol, diabetes, darah tinggi, ada pula yang menyatakan penyakit ISPA masih banyak diderita seperti flu, batuk dan demam.

Salah satu permasalahan kesehatan adalah terbatasnya jumlah paramedis di masing-masing desa. Terbatasnya tenaga paramedis ini sesuai dengan persepsi responden tentang keberadaan dokter, perawat dan paramedis yang dinilai masih buruk. Fasilitas lain seperti obat dan peralatan masih dinilai cukup baik (gambar 81). Kesiapan sarana kesehatan di Kecamatan Marisa haruslah

lebih baik karena posisinya sebagai ibukota Kabupaten pohnuwo dimana sarana penting yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu sarana kesehatan. Indikator ini cukup sesuai karena sarana pelayanan publik seperti Rumah sakit daerah pada umumnya terletak disetiap ibu kota kabupaten.



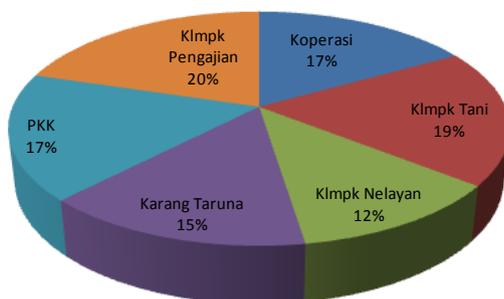
Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 81. Persepsi Responden Di Kecamatan Marisa Tentang Sarana Kesehatan

Masyarakat di Kecamatan Marisa masih memelihara aktivitas sosial seperti gotong royong, saling memberi bantuan atau *huyula*. Aktivitas ekonomi yang masih dilakukan sebagian warga adalah barter beras, sedangkan tradisi sosial yang rutin dilakukan antara lain dana-dana tradisional, Maulid Nabi, Isra Miraj, Tumbilo Tohe, yang lebih berorientasi pada ritual keagamaan seperti

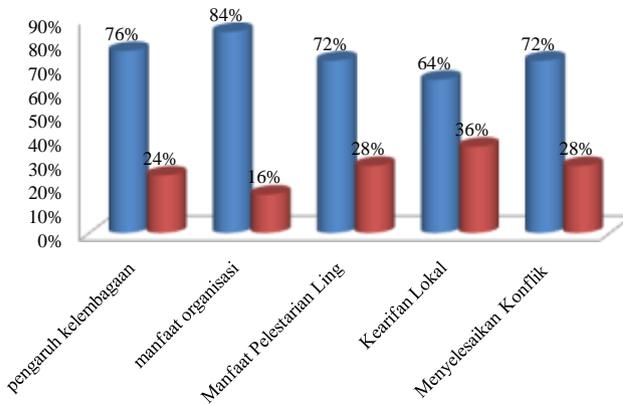
pelaksanaan Tumbilo tohe adalah tradisi masyarakat menyambut malam Laylatulqadri yang dipercayai masyarakat Gorontalo termasuk di Kecamatan Marisa yaitu jatuh pada malam ke 27 bulan Ramdhan.

Menurut masyarakat, kelembagaan sosial yang populer diikuti oleh warga di kecamatan Marisa adalah majelis taklim yang aktivitasnya adalah dakwah, atau ceramah dan pengajian. Di seluruh kecamatan Marisa terdapat 14 kelompok majelis ta'lim, artinya di setiap desa minimal terdapat satu kelompok bahkan di desa Puhuwato Timur terdapat 3 kelompok Majelis ta'lim. Masyarakat juga mengikuti kelembagaan lain sesuai dengan profesinya seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan koperasi seperti terlihat pada gambar 82 berikut. Dukungan koperasi Non KUD yang berjumlah 6 unit turut membantu perekonomian masyarakat terutama petani dan nelayan serta pelaku usaha kecil lainnya.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012
Gambar 82 Kelembagaan Yang Berperan dalam Kegiatan Sosial Ekonomi di Kecamatan Marisa

Fungsi kelembagaan di kecamatan Marisa cukup nyata dalam mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah. Gambar 83 berikut menjelaskan persepsi respon kelembagaan yang meliputi kepala desa, aparat desa dan tokoh masyarakat tentang peran kelembagaan (Lampiran 22). nampak bahwa kelembagaan yang ada mampu memberikan pengaruh (76%) dan bermanfaat (84%). Manfaat yang dirasakan misalnya dalam pelestarian lingkungan (72%), menjaga kearifan lokal (64%) dan penyelesaian konflik (72%). Prosentase dari masing-masing aspek relative cukup tinggi, hal ini menunjukkan bahwa peran kelembagaan yang didorong oleh keinginan berorganisasi "*Institutional wishing*" telah mengalami kemajuan .



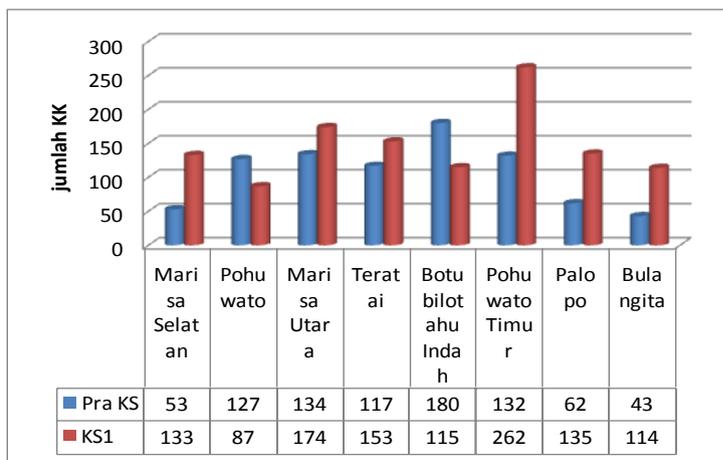
Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 83. Peran Kelembagaan dalam Kehidupan Sosial Masyarakat di Kecamatan Marisa

Keaktifan masyarakat dalam kegiatan sosial juga dapat menjadi salah satu wadah untuk berbagi informasi berbagai program pembangunan. Terdapat 2 buah lembaga LSM yang masing-masing berlokasi di Desa Palopo dan Marisa Selatan. Keberadaan LSM menjadi salah satu indikator partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap program pembangunan. Menurut responden, motivasi utama mengikuti kegiatan sosial di desa adalah untuk menyelesaikan masalah bersama (80%) dan sebagai solidaritas dan penyaluran bakat (20%). Namun demikian permasalahan terkait keluarga kurang sejahtera masih menjadi prioritas bagi pemerintah daerah, sebab dari sejumlah 4.600 kepala keluarga di Kecamatan Marisa, sebanyak 26% nya dikategorikan dalam KS1 (Keluarga Sejahtera 1) dan 18% nya dikategorikan sebagai keluarga pra KS. Pada gambar 6 menjelaskan bahwa kategori rumah tangga pra KS, paling banyak di desa Botubilotahu Indah sedangkan rumah tangga KS1 paling banyak di desa Pohuwato Timur.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 2/3 dari penduduk kecamatan Marisa masih dibawah garis kemiskinan. Dijumpai dilokasi bahwa penduduk yang berada pada garis kemiskinan lebih disebabkan oleh kemampuan atau kapasitas mereka cukup terbatas terutama penduduk asli di Kecamatan marisa yang relatif menggantungkan hidupnya pada ketersediaan property seperti lahan

perkebunan kelapa yang pada umumnya telah dijual pada orang-orang keturunan Arab dan Tionghoa sehingga mereka pada umumnya hanya menjadi petani penggarap.



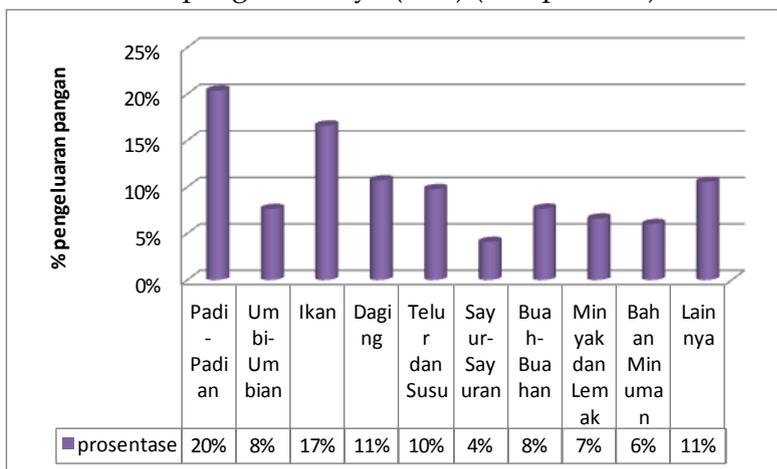
Sumber : Kecamatan Marisa Dalam Angka tahun 2011

Gambar 84. Sebaran Keluarga Pra KS dan KS I di Kecamatan Marisa tahun 2010

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dikaji berdasarkan tingkat pendapatan dan komposisi tingkat pengeluaran keluarga. Pendapatan masyarakat sangat bervariasi, sehingga akan lebih mewakili jika menilai dari tingkat pengeluaran pangan dan non pangan. Berdasarkan gambaran pendapatan responden di Kecamatan Marisa, diketahui bahwa pendapatan terendah perbulan ada yang masih di bawah tingkat Upah Minimum Regional Kabupaten Pohuwato. Profesi buruh tani merupakan mata pencaharian dengan tingkat

pendapatan yang rendah. Namun ada beberapa responden yang memiliki tingkat pendapatan relatif tinggi mencapai Rp. 9.000.000 perbulan, mereka umumnya memiliki usaha perdagangan (non pertanian). Namun secara rata-rata masyarakat di Kecamatan Marisa digolongkan cukup sejahtera.

Berdasarkan total pengeluaran rumah tangga, diketahui bahwa 76% pengeluaran rumah tangga digunakan untuk belanja non pangan dan selebihnya sebesar 24% digunakan untuk belanja pangan. Gambar 85 berikut mengilustrasikan komposisi pengeluaran pangan responden masyarakat di Kecamatan Marisa. Nampak pengeluaran karbohidrat menduduki urutan pertama (20%) disusul dengan konsumsi ikan (17%) dan bahan pangan lainnya (11%) (Lampiran 23).

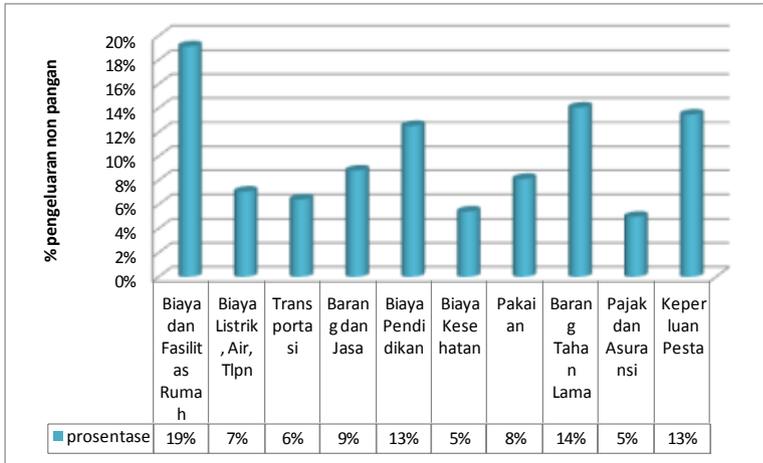


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 85. Komposisi Pengeluaran Pangan Responden di Kecamatan Marisa

Selanjutnya penting untuk mengetahui komposisi pengeluaran non pangan yang dilakukan oleh responden di kecamatan Marisa. Gambar 86 mengilustrasikan bahwa pengeluaran untuk kepentingan perumahan (19%) dan barang tahan lama (14%) menjadi pengeluaran terbesar disusul pengeluaran untuk barang tahan lama dan keperluan pesta (hajatan). Perilaku konsumtif masyarakat cukup beralasan, antara lain karena didukung oleh kultur masyarakat Gorontalo yang berprinsip bahwa harta yang cukup berharga selain anak-anak dan keluarga yaitu rumah karena rumah adalah tempat mereka mati sebelum di prosesi kealam kubur.

Hal lain karena tumbuhnya sektor informal di daerah ini seperti angkutan bentor di dalam kota kecamatan sampai ke pelosok desa, dan ojek karena adanya kegiatan pertambangan tanpa izin berlokasi tidak jauh dari wilayah Kecamatan Marisa. Selain itu karena wilayah ini menjadi kabupaten pemekaran dari Kabupaten Boalemo sehingga berdampak terhadap sektor tenaga kerja formal seperti pegawai negeri di setiap perkantoran Kabupaten Pohuwato yang berdampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat melalui belanja pemerintah yang mengalami peningkatan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

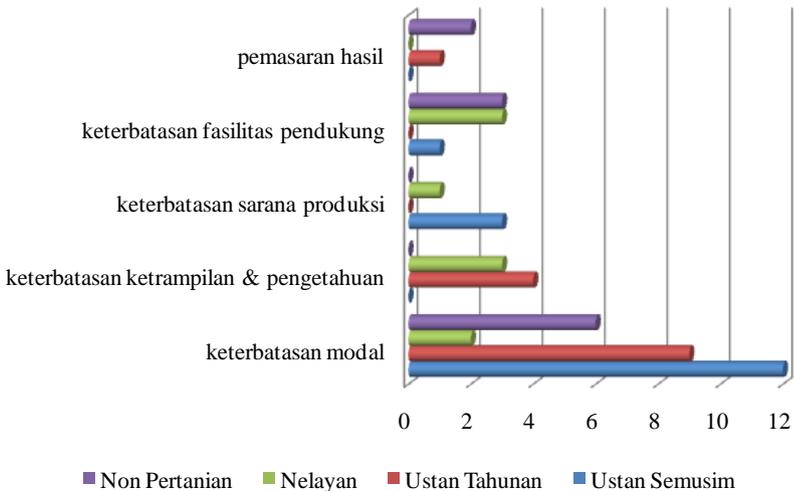


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012
 Gambar 86. Komposisi Pengeluaran Non Pangan Responden di Kecamatan Marisa

Namun demikian komposisi pengeluaran rumah tangga perlu mempertimbangkan adanya kesenjangan pendapatan. Berdasarkan pengukuran standar deviasi pendapatan masih terjadi kesenjangan antar pendapatan yang mencapai Rp. 1.641.597 dan kesenjangan dari sisi pengeluaran rumah tangga adalah Rp. 1.257.161. kesenjangan tersebut terkait dengan kurang meratanya akses terhadap sumberdaya ekonomi, salah satunya sumber permodalan. Permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat berdasarkan informasi dari responden adalah keterbatasan modal yang tidak hanya menjadi masalah bagi petani untuk tanaman semusim namun juga menjadi masalah petani

tanaman tahunan, nelayan dan non pertanian (pengolahan).

Permasalahn kedua yang menjadi hambatan adalah keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan. Dampak dari keterbatasan kemampuan pengetahuan dan keterampilan nampak pada penyerapan tenaga kerja formal diaerah ini seperti pegawai negeri sipil sebagian yang terserap yaitu berasal dari luar Kabupaten Pohuwato seperti dari sumberdaya manusia dari Kota Gorontalo bahkan untuk spesifikasi tertentu seperti ahli arsitek bangunan dan mesin masih lebih banyak menyerap tenaga pegawai dari luar Kabupaten Pohuwato



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 87. Permasalahan Utama Kegiatan Ekonomi di Kecamatan Marisa

Subsektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sub sektor pada sektor pertanian. Subsektor ini mencakup tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai. Untuk palawija, produksi jagung di Marisa pada tahun 2010 sebesar 11.019,61 ton dengan luas tanam 2.107 hektar. Produksi tahun 2010 relatif turun dari produksi pada tahun 2009 yaitu 11.487,42 ton dengan luas tanam 2.026 hektar. Peningkatan luas tanam jagung nampak pesat sejak tahun 2008 yang semula hanya 1.376 hektar dengan rata-rata produksi 5.779,2 ton. Komoditas jagung terlihat dominan dibanding tanaman pangan laina seperti ubi jalar, dan kedelai yang masing-masing produksinya adalah 144,29 ton dan 15,73 ton.

Produksi sayur-sayuran tidak terlalu menonjol di kecamatan Marisa, ada beberapa petani yang menanam cabe, tomat dan terung dengan produksi masing-masing hanya 1,83 ton, 1,30 ton dan 0,94 ton. Produksi tahun-tahun sebelumnya juga tidak terlalu jauh dari kisaran produksi tersebut. Tanaman buah-buahan juga tidak terlalu banyak, namun ada beberapa komoditas yang menonjol seperti mangga dan pisang, walaupun ada pula beberapa komoditas seperti jeruk, nangka dan pepaya, namun produksi tidak terlalu banyak.

Karakteristik daerah lembah dan perbukitan, maka akan berpotensi untuk tanaman tahunan seperti kelapa, kakao dan jambu mete. Pada tahun 2010 produksi kelapa 792,38 ton dengan luas tanam

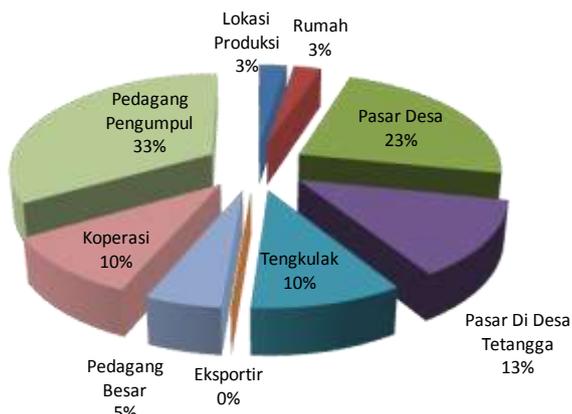
724,25 hektar mengalami penurunan dari produksi tahun 2009 sebesar 3.175 ton dan luas tanam 2.610 hektar, karena beberapa tanaman telah berumur tua dan ada peremajaan tanaman. Selain kelapa, hasil perkebunan lain yang ada di kecamatan Marisa adalah kakao dengan luas tanam 120,75 hektar dan produksi 23,98 ton. Luas tanam dan produksi kakao juga mengalami penurunan dari tahun 2009 seluas 338,75 hektar dengan produksi 442,00 ton.

Populasi ternak besar yang terdiri dari sapi turut mendukung perekonomian masyarakat di kecamatan Marisa. Populasi sapi sebanyak 2.211 ekor, jumlahnya relatif stabil dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan untuk populasi ternak kecil pada tahun 2010 terdiri dari kambing 1.486 ekor dan relatif stabil dalam 3 tahun terakhir. Unggas ayam juga diminati masyarakat untuk mendukung kebutuhan protein hewani, dengan populasi pada tahun 2010 sebanyak 7.183 ekor, mengalami penurunan populasi dari 12.989 ekor pada tahun 2009.

Perikanan darat dan laut belum ada data tentang produksi, walaupun desa Pohuwato dan Palopo memiliki pantai di wilayah teritorial toluk Tomini dan masuk dalam program Etalase Perikanan sejak tahun 2003 oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Data yang tersedia hanya jumlah rumah tangga nelayan sejumlah 304 rumah tangga pada tahun 2009. Fasilitas penangkapan yang digunakan seperti perahu tanpa motor yang

berjumlah 436 unit, perahu motor tempel sejumlah 179 unit dan kapal motor sebanyak 7 unit.

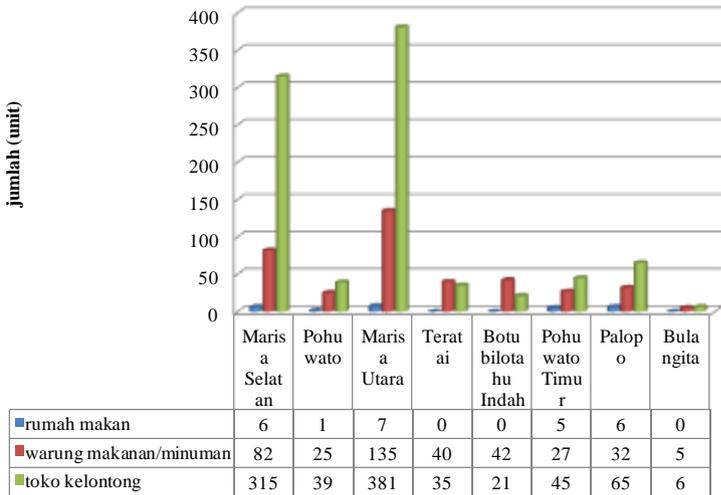
Potensi sumberdaya alam mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan darat dan laut perlu didukung oleh kegiatan pemasaran dan kegiatan pengolahan. Pada gambar 88 lembaga pemasaran yang berperan paling besar adalah pedagang pengumpul (33%), peran tengkulak sebesar 10% dan pedagang besar 5%. Pasar desa (23%) menjadi tujuan utama pemasaran hasil pertanian selain pasar di desa tetangga (13%) dan koperasi (10%). Hanya sedikit petani atau nelayan yang menjual produknya di tempat produksi atau di rumah, hal ini menandakan bahwa petani memiliki banyak alternatif untuk memasarkan. Informasi dari responden, belum ada yang berhubungan langsung dengan eksportir.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 88. Lokasi Penjualan Hasil Produksi Pertanian Responden Di Kecamatan Marisa

Pasar desa di kecamatan Marisa hanya satu unit, terletak di desa Marisa Utara, demikian pula TPI (Tempat Pelelang Ikan) hanya satu unit dan terletak di desa Pohuwato Timur. Namun demikian banyaknya rumah makan, warung makan/minum dan toko kelontong seperti di ilustrasikan pada gambar 9, yang menjelaskan jumlah sarana perdagangan yang mendukung perekonomian di Kecamatan Marisa. Disisi lain Kecamatan Marisa adalah menjadi kota transit bagi masyarakat yang menggunakan angkutan darat antar provinsi seperti penumpang dari Gorontalo menuju ke beberapa Kabupaten di Sulawesi Tengah atau sebaliknya lebih banyak menggunakan jasa kuliner dan penginapan di Kecamatan Marisa untuk tempat istirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Pada aspek aksesibilitas perdagangan, Kecamatan Marisa memiliki nilai strategis karena masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah masih relatif lebih cepat dan mudah untuk berbelanja di Kecamatan Marisa bila dibandingkan mereka harus menempuh perjalanan jauh ke Palu sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi tengah dimana Kabupaten ini merupakan daerah penghasil kakao dari kopra serta hasil laut.

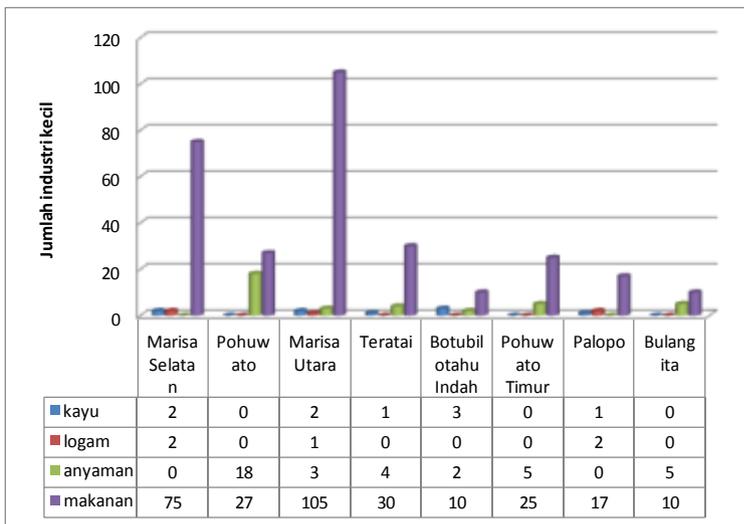


Sumber : Kecamatan Marisa Dalam Angka tahun 2011

Gambar 89. Jumlah Sarana Perdagangan di Kecamatan Marisa

Pada gambar 89 nampak bahwa sarana perdagangan paling banyak di Marisa Utara, disusul di Marisa Selatan. Selain fasilitas perdagangan, pada tahun 2010 terdapat 2 perusahaan sedang di desa Pohuwato, perusahaan besar belum berinvestasi di Kecamatan Marisa. Namun demikian beberapa industri kecil skala rumah tangga tumbuh seiring semakin tingginya permintaan masyarakat terhadap barang olahan kebutuhan sehari-hari. Industri kecil pengolahan pangan merupakan industri yang paling diminati, terkait kesederhanaan teknologi dan potensi sumberdaya di Kecamatan Marisa. Perkembangan industri kecil makanan berkembang di wilayah

Marisa Utara dan Marisa Selatan. Basis industri kecil merupakan sektor yang paling tidak kuat menghadapi gencangan kenaikan harga barang-barang terutama bahan baku industri tersebut kendatipun sektor ini termasuk yang paling banyak menyerap tenaga kerja lokal. Oleh karena itu dukungan dan peningkatan kemampuan antar sektor cukup penting seperti sektor pertanian yang paling banyak menyiapkan bahan baku industri pada makan olahan.

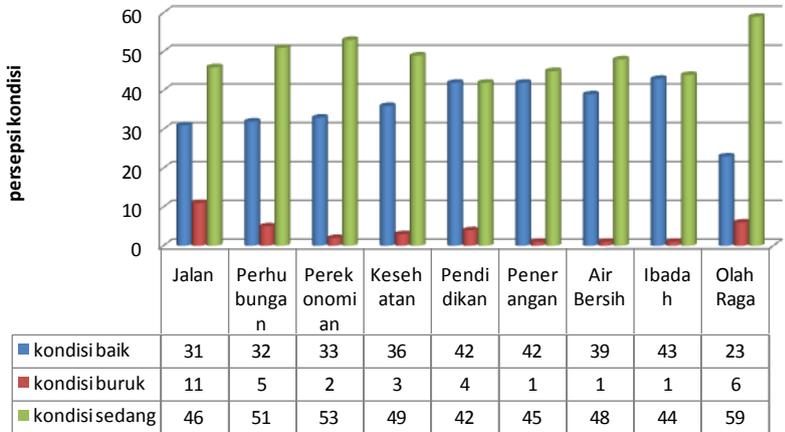


Sumber : Kecamatan Marisa Dalam Angka tahun 2011
 Gambar 90. Jumlah Industri Kecil di Kecamatan Marisa

Perkembangan perekonomian suatu wilayah juga harus didukung oleh keberadaan infrastruktur. Kecamatan Marisa sebagai ibukota Kabupaten

Pohuwato secara umum memiliki infrastruktur pendukung yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kecamatan lain. Menurut sebagian besar responden menyatakan bahwa keberadaan infrastruktur jalan, perhubungan, kesehatan dan pendidikan sudah baik, hanya beberapa orang yang menyatakan bahwa fasilitas olahraga dan perhubungan (jalan) yang buruk. Gambar berikut menjelaskan persepsi masyarakat.

Selain sarana olahraga dan pendidikan yang dianggap masih perlu ditingkatkan kapasitasnya, terdapat juga sarana yang dianggap penting yaitu perhubungan, hal ini cukup sesuai dengan letak geografis Kecamatan marisa pada Kshusnya dan Kabupaten pohuwato pada umumnya yang relative jauh dari Ibu Kota Provinsi gorontalo perlu dipertimbangkan untuk membangun sarana perhubungan udara untuk rute penerbangan lurus dengan menggunakan pesawat Cessna, hal ini akan memacu pertumbuhan ekonomi karena adanya kecepatan waktu untuk melakukan ektivitas ekonomi terutama bagi investor yang akan mengembangkan usahanya di Kabupaten Pohuwato juga akan mempercepat pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat.



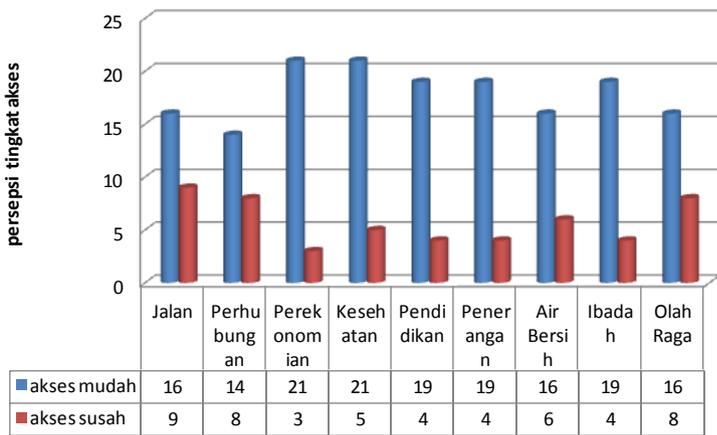
Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 91. Persepsi Responden Tentang Kondisi Sarana Prasarana Di Kecamatan Marisa

Aksesibilitas sarana jalan di Kecamatan marisa relatif kurang baik bila dibandingkan dengan sarana lain seperti sarana perekonomian dimana responden yang menjawab cukup baik yaitu 21 orang dan sarana kesehatan responden yang menjawab yang sama juga. Demikian juga sarana pendidikan, penerangan dan sarana ibadah relatif lebih baik dengan rata-rata responden yang menjawab yaitu 19 responden. Sedangkan sarana yang masih terasa kurang yaitu sarana perhubungan dan sarana jalan dengan jumlah responden yaitu 16 dan 14 responden.

Hasil pengamatan dilokasi bahwa aksesibilitas sarana ini dipengaruhi juga oleh kualitas masing-masing sarana yang relatif perlu

mempertimbangkan aspek lingkungan meskipun saat ini pemerintah sedang mengupayakan program penghijauan, namun cukup terasa bila kita berada di Kecamatan Marisa, suhu panas di wilayah ini relatif lebih tinggi yang mungkin dipengaruhi juga oleh sebagian wilayah ini berada dipesisir pantai Toluk Tomini sehingga membutuhkan ciri kualitas konstruksi bangunan. Disisi lain sebagian wilayah ini di genangi air disaat musim penghujan tiba termasuk di beberapa ruas jalan.

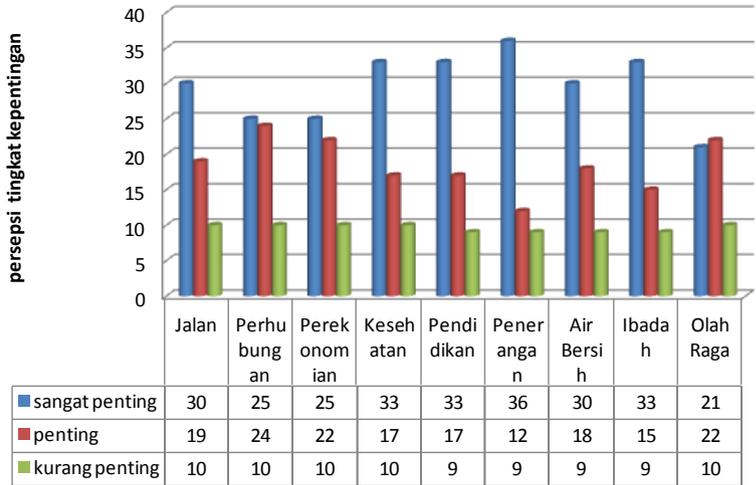


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 92. Persepsi Responden tentang Akses Terhadap Fasilitas di Kecamatan Marisa

Aspek lain yang dianggap penting oleh masyarakat di Kecamatan Marisa yaitu sarana penerangan, karena pada saat tertentu sarana penerangan mengalami pemadaman, hal ini cukup mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat termasuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Demikian pula sarana ibadah menempati urutan kedua dengan jumlah responden yang menganggap hal ini cukup penting yaitu 33 responden demikian pula sarana kesehatan dan pendidikan dengan masing-masing terbagi pada proporsi yang sama dan diikuti oleh responden yang menganggap sarana jalan, perhubungan dan perekonomian juga sarana olahraga dianggap penting dengan proporsi responden yang menjawab relative bervariasi antara 30 sampai 21 responden.

Persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek ini sejatinya menjadi catatan dan pekerjaan rumah bagi para pihak terutama pemerintah. Karena masyarakat memiliki pandangan bahwa indikator kemajuan pembangunan akan tercermin pada sarana-sarana yang dianggap paling penting oleh masyarakat. Disisi lain hal ini menjadi pertimbangan juga bagi dunia usaha yang akan mengembangkan investasinya di Kecamatan Marisa yang notabene faktor sumberdaya alam relative tersedia untuk menjadi peletup ekonomi di wilayah ini.

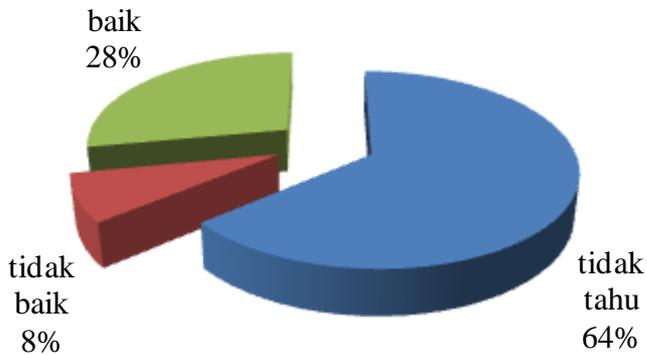


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 93. Persepsi Tentang Tingkat Kepentingan Fasilitas Infrastruktur di Kecamatan Marisa

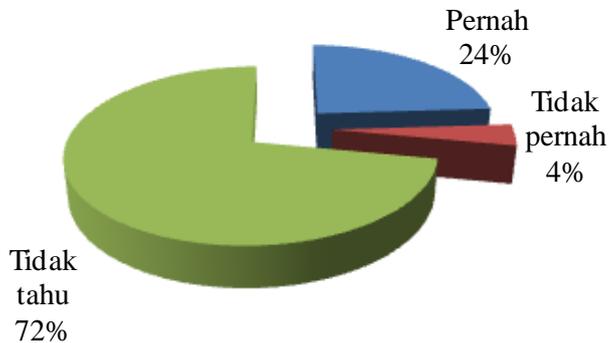
Sejak Tahun 2008 sebagian kawasan Suaka Margasatwa Panua dirubah statusnya menjadi HPT (Hutan Produksi Terbatas) dalam RTRWK (Revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten) Pohuwato, hasil diskusi dengan responden di Kecamatan Marisa mengindikasikan bahwa sebanyak 40% tahu tentang perubahan status tersebut, namun 60% nya mengaku tidak mengetahui. Tidak semua responden mengetahui keberadaan PT GSM, hampri 64% responden mengatakan tidak mengetahui hubungan PT GSM dengan pemerintah. Namun sebanyak 28% responden yang mengetahui, mengatakan bahwa hubungan PT GSM dengan pemerintah cukup baik.

Kemampuan masyarakat dalam menyerap informasi lewat media yang tersedia menjadi komponen penting dalam mensosialisasikan hasil pembangunan serta arah kebijakan pembangunan di Kabupaten pohuwato terutama di kecamatan Marisa. Akan tetapi kemampuan masyarakat sangat dipengaruhi oleh strategi pemerintah dalam mendistribusikan informasi. Sebagai fakta bahwa Perubahan sebagian status Kawasan Suaka Margasatwa Panua yang telah di putuskan oleh Pemerintah Pusat melalui Revisi Tata runag Wialyah Kabuapten pohuwato baru di ketahui oleh masyarakat sekitar 40%. Hal ini membuktikan perlu adanya model sosialisasi yang bertahap dan konsisten terhadap hasil keputusan pemerintah.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012
Gambar 94. Persepsi Responden Tentang Hubungan PT GSM Dengan Pemerintah di Kecamatan Marisa

Kondisi tersebut juga tergambar pada ketidaktahuan hubungan penambang rakyat dengan PT GSM. Hampir 90% responden mengatakan tidak mengetahui hubungan dengan PT GSM. Kegiatan penertiban penambangan rakyat sering dilakukan agar kegiatan tersebut lebih terkoordinir dan mampu di deteksi terkait dengan penggunaan bahan kimia. Menurut responden terkait dengan kegiatan pertambangan rakyat, sebanyak 24% menjawab bahwa kegiatan penertiban pernah dilakukan, dan sebanyak 4% menjawab tidak tahu, sedangkan sisanya 72% menjawab tidak tahu tindakan penertiban penambang rakyat.

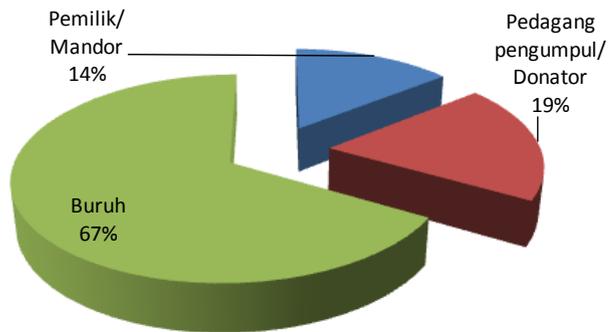


Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 95. Persepsi Tentang Penertiban Penambangan Rakyat di Kecamatan Marisa

Pada kelembagaan penambang tanpa izin sebagian besar masyarakat di Kecamatan Marisa yang berprofesi sebagai penambang yaitu buruh sebanyak 67%. Hal ini mengilustrasikan tentang

keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat Kecamatan Marisa masih relatif rendah bila hal ini dikategorikan dalam struktur perekonomian dalam konteks sektor informal. Demikian juga posisi pemilik atau mandor di kegiatan pertambangan ini yaitu 14%, sedangkan sebagai pedagang pengumpul atau donator yaitu 19%. Pada aspek konflik hal ini cukup berpotensi karena rata-rata pemilik dan pedagang pengumpul bukan penduduk asli atau masyarakat yang berdemisili di Kecamatan Marisa namun lebih banyak berasal dari luar Pohuwato bahkan sebagian berasal dari Gorontalo dan Sulawesi utara serta pedagang pengumpul berasal dari Makassar dan Bugis. Dapatlah dimaknai bahwa konflik kepentingan di kegiatan pertambangan ini lebih dipengaruhi oleh masyarakat pendatang.



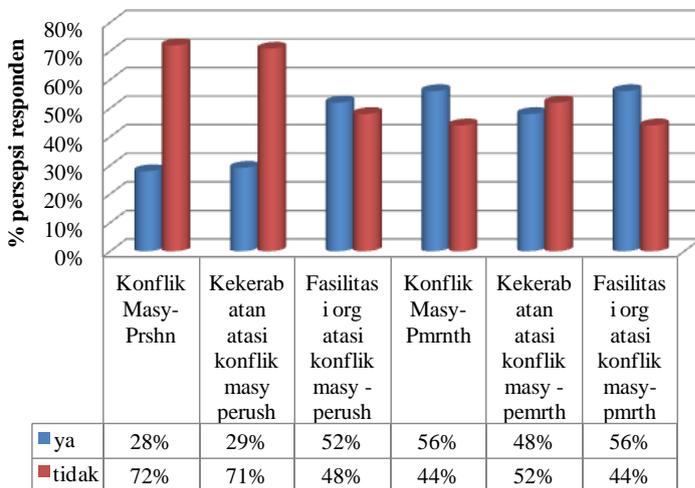
Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 96 Posisi Responden dalam Kegiatan Pertambangan di Kecamatan Marisa

Organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah konsesi PT GSM umumnya memiliki beberapa pandangan tentang aktivitas pertambangan. Gambar berikut menjelaskan bahwa jika dilakukan kegiatan pertambangan, maka responden yang berpendapat akan berpotensi konflik adalah sekitar 28%. Namun demikian jika terjadi konflik, dapat diatasi secara kekeluargaan (kekerabatan), sebanyak 71% responden menyatakan hal tersebut. Selain itu sebanyak 52% responden mengatakan bahwa beberapa organisasi kemasyarakatan yang berpengaruh di masyarakat dapat membantu mengatasi konflik.

Dalam aktivitas pertambangan, selain hubungan masyarakat dengan perusahaan, pemerintah daerah turut berperan, menurut responden, justru yang sering terjadi adalah konflik dengan pemerintah, menurut mereka peluangnya 52%. Hanya 48% responden yang menjawab bahwa aspek kekerabatan atau kekeluargaan (musyawarah) dapat ditempuh jika terjadi konflik. Namun demikian sebanyak 56% responden menyatakan bahwa melalui kelembagaan kemasyarakatan yang ada dapat membantu mengatasi konflik. Peluang ini menjadi indikator kuat bagi pengembangan investasi terutama di sektor pertambangan yang tetap memberikan kesempatan yang luas bagi pengelolaan pertambangan secara professional. Hal ini dapat juga dimaknai bahwa perlu meningkatkan

kapasitas kelembagaan masyarakat untuk menjadi media penyampaian informasi dan sosialisasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya tambang yang ekonomis dan lestari terhadap masyarakat.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012

Gambar 97. Persepsi Responden Tentang Potensi Konflik Dan Resolusi Konflik Pengelolaan Tambang Di Kecamatan Marisa

B. Hirarki Wilayah dan Pemetaan Infrastruktur

Wilayah Pohuwato pada mulanya masih merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Boalemo, namun sejak dikeluarkannya UU RI No. 6 Tahun 2003 maka terbentuklah Kabupaten Pohuwato (bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Bone Bolango) yang mandiri. Menurut

penjelasan UU tersebut luas wilayah Pohuwato sebesar 4.244,31 Km² atau dengan kata lain yang terluas dari seluruh Kabupaten/Kota se-provinsi Gorontalo. Waktu itu Kabupaten Pohuwato hanya terdiri dari lima kecamatan; Popayato, Lemito, Marisa, Randangan, dan Paguat. Semenjak “berpisah” dari Boalemo, Pohuwato berkembang sangat pesat. Saat ini wilayah Pohuwato terdiri dari 13 Kecamatan. Pertumbuhan ekonominya pun dari tahun ke tahun terus meningkat, bahkan beberapa kali melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional. Posisi kabupaten Pohuwato sangat strategis karena merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah paling besar meliputi 4.244,31 km² (36,77%)

Studi Baseline Survei Sosial Ekonomi Dalam Rangka Penyusunan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Gorontalo Sejahtera Mining, selain dilakukan survey kondisi masyarakat sekitar potensi tambang, perlu juga dipetakan kondisi infrastruktur. Tujuannya adalah mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk mengarahkan/membentuk jenjang-jenjang pusat-pusat pelayanan wilayah dan jaringan transportasi serta jaringan sarana dan prasarana lainnya yang mendukung pusat-pusat pelayanan tersebut, sehingga membentuk suatu sistem terpadu yang mampu memanfaatkan potensi kabupaten. Menggunakan analisis skalogram akan dapat diketahui tingkat pelayanan sosial ekonomi, atau

dengan kata lain dapat digunakan untuk mengelompokkan satuan pemukiman berdasarkan tingkat kompleksitas fungsi pelayanan yang dimilikinya.

Analisis skalogram merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan hierarki wilayah terhadap jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Jenis data yang digunakan dalam analisis ini, meliputi data jumlah sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana komunikasi, dan jenis data penunjang lainnya (seperti: data jarak dari masing-masing wilayah terhadap pusat pelayanan, jenis penggunaan lahan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur umum, dan sebagainya). Masing-masing peubah tersebut dilakukan pembobotan dan standarisasi.

Dalam metode skalogram, seluruh fasilitas umum yang dimiliki masing-masing kecamatan didata dan disusun dalam satu tabel. Metode skalogram dilakukan dengan menuliskan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh setiap wilayah, terkait dengan *Social overhead capital* (SOC). Identifikasi fasilitas dasar penunjang pengembangan daerah perlu dilakukan sebagai dukungan kepada ekonomi karena tanpa dukungan tersebut aktivitas primer, sekunder, dan tertier dari kegiatan produktif tidak dapat berfungsi.

Analisis pemetaan infrastruktur dimulai dengan mengidentifikasi jarak masing-masing kecamatan ke ibukota kabupaten Pohuwato dan ibukota Provinsi Gorontalo. Hal ini berdasarkan teori lokasi bahwa jarak merupakan faktor penentu besarnya biaya produksi. Teori tersebut diperkaya oleh Christaller dan Losch mengenai teori dengan “teori lokasi pusat” yang mulai mencoba untuk menjelaskan mengapa dalam suatu wilayah bisa muncul pusat-pusat aktivitas. Atas dasar inilah maka tiap wilayah mempunyai skala ekonomi yang berbeda.

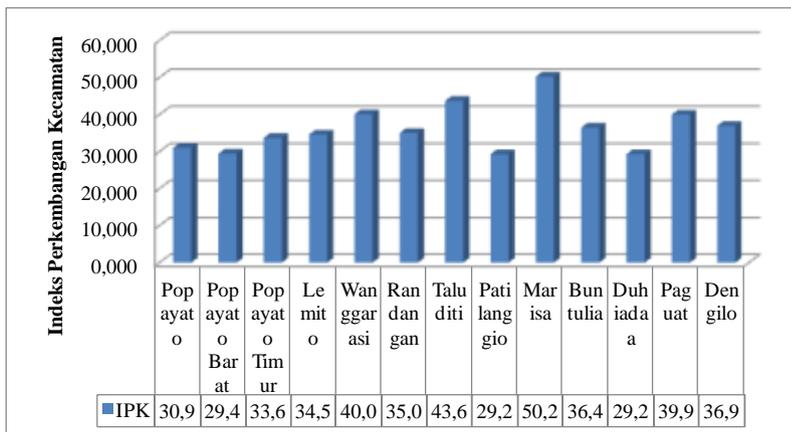
Sistem lokasi pusat-pusat pelayanan dapat diidentifikasi melalui pendekatan *top down* yaitu dari aktivitas produksi dengan *threshold* tinggi ke rendah atau *bottom up* yaitu dari aktivitas produksi dengan *threshold* rendah ke tinggi. Christaller dalam Smith (1976) melakukan identifikasi melalui pendekatan *top down*. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa lokasi pusat utama akan menjadi semakin besar dan menyebar daripada lokasi pusat yang lebih rendah. Lokasi pusat utama ini akan menyediakan barang dan jasa utama (barang dan jasa yang dihasilkan oleh aktivitas produksi yang *threshold*-nya tinggi) dan sekaligus menyediakan barang dan jasa yang lebih rendah (barang dan jasa yang dihasilkan oleh aktivitas produksi yang *threshold*-nya rendah). Keberadaan barang dan jasa yang lebih rendah di lokasi pusat utama disebabkan karena produsen dengan *threshold*

rendah ingin mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari *threshold*-nya itu sendiri. Sementara itu lokasi pusat pelayanan yang lebih rendah hanya akan menyediakan barang dan jasa yang lebih rendah.

Hasil dari analisis skalogram ini dapat ditentukan bahwa wilayah-wilayah yang mempunyai nilai indeks perkembangan wilayah paling besar dapat dikategorikan ke dalam wilayah dengan tingkat perkembangan maju, atau dicirikan oleh jumlah dan jenis sarana, prasarana dan infrastruktur yang tersedia cukup memadai. Sedangkan untuk wilayah-wilayah yang mempunyai indeks perkembangan sedang - lambat atau wilayah terbelakang dan kelompok wilayah ini lebih dicirikan dengan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana sangat terbatas.

Tingkat perkembangan suatu wilayah pada analisis skalogram dicerminkan menggunakan indeks perkembangan kecamatan (IPK). Semakin tinggi nilai IPK maka wilayah tersebut lebih maju atau berkembang dibanding wilayah yang memiliki IPK lebih rendah. Artinya kecamatan dengan indeks perkembangan lebih tinggi akan melayani kecamatan di sekitarnya yang memiliki indeks perkembangan lebih rendah. Analisis skalogram di Kabupaten Pohuwato dilakukan berdasarkan data kondisi infrastruktur pada tahun 2010 . Perkembangan kecamatan di Kabupaten Pohuwato berdasarkan hasil analisis skalogram dibedakan

menjadi 3 hirarki yaitu hirarki 1 (wilayah dengan tingkat perkembangan maju), hirarki 2 (wilayah dengan tingkat perkembangan sedang) dan hirarki 3 (wilayah dengan tingkat perkembangan rendah). Hasil Indeks perkembangan kecamatan di sajikan pada gambar berikut



Gambar 98. Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) di Kabupaten Pohuwato tahun 2011

Berdasarkan hasil perhitungan IPK (Indeks Perkembangan Kecamatan) pada gambar 98 dan Lampiran 26, diketahui bahwa kecamatan yang memiliki $IPK \geq 48,54$ (lebih besar dari nilai rata-rata dan 2 kali standar deviasi) termasuk kecamatan yang berhirarki 1. Kecamatan Marisa digolongkan dalam hirarki 1. Umumnya wilayah yang berhirarki 1 adalah ibukota daerah, baik sebagai ibukota kabupaten, kecamatan maupun desa yang merupakan pusat layanan lokal. Demikian pula

dengan kecamatan Marisa yang merupakan ibukota kabupaten Pohuwato. Kecamatan Marisa sebagai ibukota kabupaten memiliki jumlah ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai, terutama sarana pendidikan (bangunan sekolah TK, SD, SLTP, SLTA , sarana kesehatan (jumlah rumah sakit, puskesmas, apotik dan sebagainya), sarana transportasi, jarak dari masing-masing wilayah terhadap pusat pelayanan relatif dekat sehingga untuk mengakses ke pusat pelayanan tersebut menjadi lebih mudah, serta infrastruktur-infrastruktur yang tersedia di masing-masing wilayah. Fasilitas standar tersebut juga dimiliki oleh kecamatan lain yang termasuk hirarki 2 dan 3, namun yang membedakan adalah fasilitas terkait sarana prasarana informasi dan komunikasi seperti jaringan internet, jaringan radio, jangkauan media massa dan sebagainya.

Kecamatan yang termasuk hirarki 2 meliputi Kecamatan Wanggarasi, Taluditi, Buntulia, Paguat dan Dengilo. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki nilai Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK) lebih kecil dari nilai rata-rata dan 2 kali standar deviasi (48,54) namun lebih besar dari nilai rata-ratanya yaitu 36,13. Kecamatan berhirarki 2 dicirikan dengan keberadaan sarana dan prasarana yang lebih sedikit dan jarak ke pusat ibukota kabupaten dan provinsi yang lebih jauh disbanding kecamatan Marisa yang berhirarki 1. Fasilitas pendidikan dasar seperti taman kanak-kanak, SD,

SMP dan SMA masing-masing telah tersedia di tiap kecamatan, hanya kecamatan Popayato yang tidak memiliki SMA. Demikian pula sarana kesehatan seperti puskesmas, pustu (puskesmas pembantu) dan posyandu umumnya sudah tersebar di masing-masing kecamatan. Sarana kesehatan seperti polindes, pusling dan apotik hanya terdapat di beberapa kecamatan. Demikian pula fasilitas komunikasi seperti sarana internet dan warnet hanya ada di ibukota kabupaten.

Beberapa kecamatan yang dikategorikan memiliki tingkat perkembangan lebih rendah dibanding hirarki 2 adalah kecamatan Popayato, Popayato Timur dan Popayato Barat, Randangan, Patilanggio dan Duhiadaa. Kecamatan tersebut dikategorikan kecamatan berhirarki 3 karena nilai IPK lebih kecil dari rata-rata kecamatan di Kabupaten Pohuwato. Faktor penyebabnya adalah kurang lengkapnya sarana dan prasarana penunjang dan jaraknya yang relatif jauh dari ibukota kabupaten Pohuwato dan ibukota Provinsi Gorontalo.

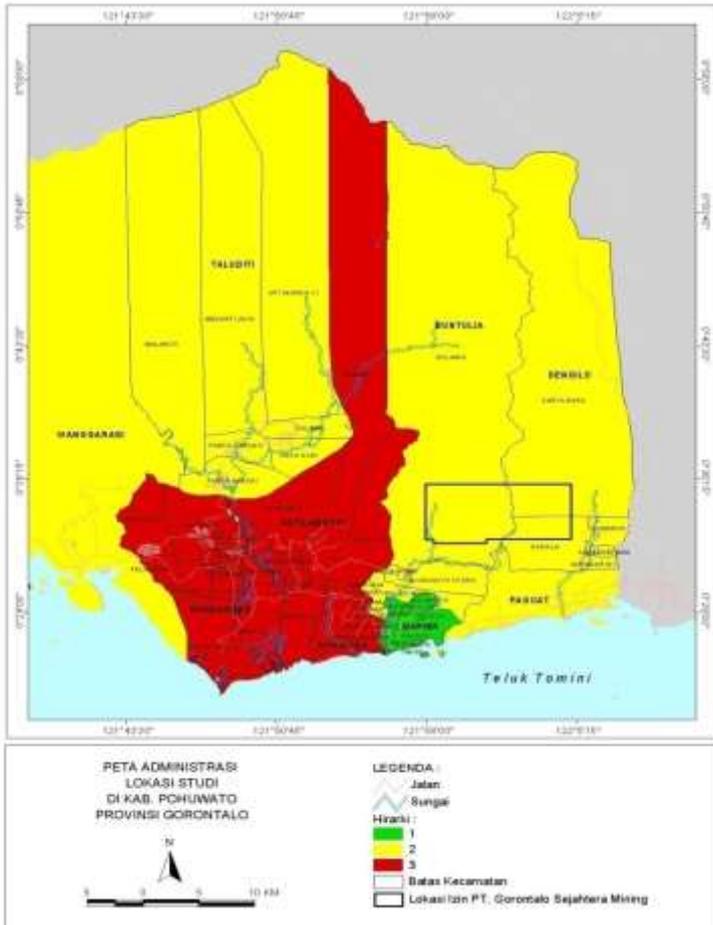
Walaupun infrastruktur pendidikan sudah cukup memadai di Kabupaten Pohuwato, namun harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan yaitu dengan mencanangkan berbagai program seperti program wajib belajar, gerakan

nasional orang tua asuh (GNOTA), Bantuan operasional sekolah (BOS), pendirian sekolah kejuruan dan lain-lain. Dengan program ini diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang siap bersaing dalam era globalisasi mendatang terutama untuk berkontribusi dalam mengelola sumberdaya alam yang melimpah di Kabupaten Pohuwato.

Demikian pula dengan fasilitas kesehatan yang cukup memadai di Kabupaten Pohuwato yang terdiri dari satu buah Rumah Sakit, 16 Puskesmas, 28 Puskesmas Pembantu, 11 Puskesmas Keliling, 176 Posyandu dan 29 Polindes. Dilihat dari penyediaan obat-obatan, di Pohuwato pada tahun 2010 terdapat 3 toko obat, dan 7 apotek. Namun keberadaan Dokter, Bidan dan perawat masih dirasakan kurang dalam penanganan kesehatan masyarakat.

Dikaitkan dengan pengelolaan tambang di wilayah Gunung Pani, maka kecamatan Buntulia dan Dengilo merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan lokasi pertambangan. Keberadaan infrastruktur dasar di sekitar lokasi tambang seperti kecamatan Buntulia dan Dengilo (hirarki 2) perlu diperhatikan terkait fasilitas infrastruktur komunikasi dan sarana perdagangan. Kecamatan Buntulia hanya berjarak 7 km dari ibukota kabupaten yaitu Kecamatan Marisa, hal ini merupakan peluang untuk mampu berinteraksi dengan wilayah sekitarnya untuk dapat

meningkatkan kapasitas pelayanan. Sedangkan kecamatan Dengilo, walaupun berjarak sekitar 27 km dari ibukota kabupaten, namun perlu meningkatkan potensi di sektor perdagangan terkait home industry makanan kecil dan kerajinan.



Gambar 99. Peta Hirarki Fasilitas Kecamatan di Kabupaten Pohnuato

MODEL KELEMBAGAAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA TAMBANG

A. Hirarki Pilihan Format Kelembagaan Tambang

Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu wilayah di Provinsi Gorontalo yang tidak terlepas dari aktivitas penambangan. Pemanfaatan sumberdaya tambang yang termasuk sumberdaya tidak pulih seperti dua sisi mata uang yang memiliki dampak positif dan negatif. Permasalahan penting terkait pengelolaan tambang adalah konflik terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berujung kepada konflik sosial. Pihak-pihak yang melakukan usaha pertambangan baik penambang rakyat maupun investor yang memiliki IUP merasa memiliki hak yang sama untuk memanfaatkan sumberdaya tambang. pada situasi tersebut Pemerintah Daerah Pohuwato berada dalam situasi dilematis, pada satu sisi tetap mempertahankan penambang rakyat karena merupakan mata pencaharian masyarakat, disisi lain lokasi tambang tersebut telah dikuasai investor dengan keluarnya Izin Usaha Pertambangan.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun. Sedangkan IUP operasi produksi yang terdiri meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun (Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara).

Izin Usaha Pertambangan "IUP" untuk wilayah kabupaten diberikan oleh Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. Pihak yang dapat mengajukan IUP adalah (a) Badan usaha, yang dapat berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); (b). Koperasi; dan (c). Perseorangan, yang dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer. Masing-masing pihak memiliki jangka waktu tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diberikan terutama kepada penduduk setempat, baik

perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi oleh bupati/walikota dengan menyampaikan surat permohonan. Dimana kewenangan pelaksanaan pemberian IPR tersebut dapat dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IPR ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, dengan luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada a). Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar; b). Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau c). Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) tahun.

Mengingat lamanya jangka waktu operasional kegiatan penambangan, maka perlu ditempuh langkah-langkah strategis dalam pengelolannya. Sebab salah satu karakter pemanfaatan sumberdaya alam tidak pulih adalah perlunya keseimbangan antara resiko kerusakan dengan pemulihan dan keuntungan yang diterima oleh pemerintah dan masyarakat sekitar. Sebagai industri yang memanfaatkan sumberdaya alam, kegiatan operasionalnya rentan terhadap konflik sosial. Pemanfaatan sumberdaya alam seharusnya berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Pro-kontra pengelolaan tambang emas merupakan peringatan dini bahwa pengelolaan sumberdaya harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sepanjang waktu. Hal ini sesuai dengan postulat ekonomi

sumberdaya, yaitu : efisiensi, *optimality* dan *sustainability*.

Setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan antara lain :

1. Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
3. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkaran tambang;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkaran tambang;
5. Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkaran tambang;
6. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat lingkaran tambang;
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkaran tambang.

Sumberdaya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang terdapat di Kabupaten Pohuwato, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Namun terdapat beberapa dampak negatif dari pembangunan di bidang pertambangan antara lain : (a) kegiatan penambangan kurang memperhatikan kelestarian lingkungan; (b). penebangan hutan untuk kegiatan

pertambangan; (c). limbah kegiatan penambangan yang mencemari lingkungan; (d). Areal bekas penambangan yang dibiarkan tanpa ada upaya reklamasi; (e). dapat membahayakan masyarakat sekitar; (f). Sengketa lahan pertambangan dengan masyarakat sekitar; (g). Kontribusi bagi masyarakat sekitar yang dirasakan masih kurang; dan (h) hubungan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan masih kurang.

Terdapat tiga unsur pembentukan kelembagaan yaitu batas yuridiksi, hak kepemilikan dan aturan representasi. Batas yuridiksi dalam pengelolaan tambang berarti suatu batasan untuk menentukan siapa saja yang berhak ikut terlibat dalam pengelolaan pada satu lokasi. Batas yuridiksi dapat diamati terkait karena sarana dan prasarana yang dibangun sebagai pendukung yang terkait dengan pertambangan. Masalah yuridiksi juga menyangkut aspek legal yaitu pengakuan kelembagaan secara hukum oleh pemerintah yang memberikan kepastian operasional untuk setiap perusahaan pertambangan baik dalam mengelola dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara dan membangun dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat penerima dampak.

Salah satu upaya pemerintah daerah dan perusahaan pertambangan mengadopsi upaya-upaya untuk menjawab tuntutan global, nasional dan lokal dalam meningkatkan dampak positif dan menekan dampak negatif kegiatan yang dilakukan

adalah merancang konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pengaturan mengenai CSR terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara singkat dikatakan bahwa ketentuan tentang CSR wajib dilaksanakan bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Ketentuan mengenai CSR dalam kegiatan usaha pertambangan dapat dilihat dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu tentang kewajiban pemegang usaha pertambangan untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). PPM ini merupakan salah satu bagian dari CSR. Oleh karena itu, implementasi CSR dalam kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat berupa pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat sekitar wilayah tambang, pemberdayaan para guru, pendirian puskesmas, pengarahan tentang cara bertani yang baik, dan sebagainya.

Prinsip CSR yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) berkaitan dengan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan

Khusus (IUPK) yang sejalan dengan konsep *Triple Bottom Line* (3BL) meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu bidang ekonomi 3 (tiga) prinsip (*human capital*, kemitraan, dan *good corporate governance* (GCG)), bidang sosial 3 (tiga) prinsip (*human capital*, pendidikan, dan informasi publik), dan bidang lingkungan 5 (lima) prinsip (standarisasi, keterbukaan, pencegahan perusakan lingkungan, ramah lingkungan, dan taat hukum) (Busyra Azheri. 2010).

Analisis AHP akan membantu menyusun prioritas kelembagaan yang tepat dalam melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi masyarakat sekitar perusahaan. Untuk mendapatkan skenario arahan strategi kebijakan penerapan CSR dan stakeholder yang terlibat maka melibatkan opini berbagai stakeholder terkait pengelolaan tambang (Lampiran 27). Metode yang digunakan ialah *comparative judgment* atau skala banding secara berpasangan, prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Nilai bobot dari bobot 1 sampai dengan 9. Nilai bobot 1 menggambarkan sama penting, ini berarti atribut yang sama skalanya, nilai bobotnya 1, sedangkan nilai bobot 9 menggambarkan kasus atribut yang penting absolut dibandingkan dengan yang lainnya.

Proses penyusunan format CSR membutuhkan perumusan yang jelas, baik materi, strategi, sasaran dan pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait. Perencanaan program yang sesuai dan berkelanjutan dibutuhkan untuk meningkatkan keberdayaan para pemangku kepentingan. Proses hierarki adalah suatu model yang memberikan kesempatan bagi perorangan atau kelompok untuk membangun gagasan-gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi mereka masing-masing dan memperoleh pemecahan yang diinginkan. Ada dua alasan utama untuk menyatakan suatu tindakan akan lebih baik dibanding tindakan lain. Alasan yang pertama adalah pengaruh-pengaruh tindakan tersebut kadang-kadang tidak dapat dibandingkan karena suatu ukuran atau bidang yang berbeda dan kedua, menyatakan bahwa pengaruh tindakan tersebut kadang-kadang saling bentrok, artinya perbaikan pengaruh tindakan tersebut yang satu dapat dicapai dengan pemburukan lainnya. Kedua alasan tersebut akan menyulitkan dalam membuat ekuivalensi antar pengaruh sehingga diperlukan suatu skala fleksibel yang disebut prioritas.

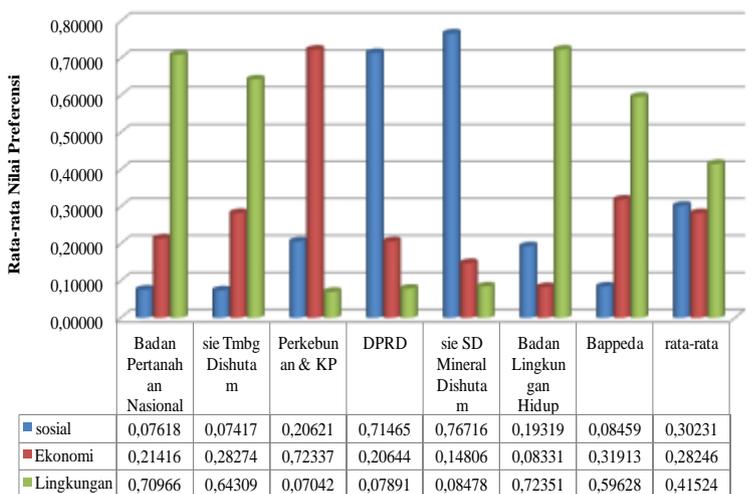
Model pengelolaan CSR perusahaan tambang memerlukan pembobotan peran dan fungsi para *stakeholder* agar mengetahui tingkat kontribusinya. *Stakeholders* yang berperan yaitu pemerintah daerah (pemda), Perusahaan tambang, LSM, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian, tokoh masyarakat dan

pelaku tambang rakyat. Kriteria utama yang dipertimbangkan dalam menentukan format kelembagaan CSR adalah sosial, ekonomi dan lingkungan. Adanya *lingkage* antar stakeholder dimaksudkan untuk menciptakan jejaring (*network*) dan kedekatan dengan stakeholder terkait. Hal ini dirasakan penting untuk bisa memahami persoalan yang dihadapi masyarakat secara kontekstual. *Lingkage* juga bermanfaat untuk mendeteksi berbagai kebutuhan masyarakat dan mengurangi kekuranganeftivatan kebijakan atau program .

Hasil analisis AHP terhadap perwakilan beberapa stakeholder menunjukkan hasil yang berbeda. Kriteria lingkungan menjadi preferensi utama beberapa stakeholder seperti BPN/Badan Pertanahan Nasional (0,70), Sie Pertambangan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi (0,64), BLH/Badan Lingkungan Hidup (0,72) dan Bappeda (0,59). Dinas Perkebunan dan Ketahanan Pangan lebih mengedepankan aspek ekonomi (0,72) sementara stakeholder anggota dewan dan Sie Sumberdaya Mineral Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi masing-masing memilih kriteria sosial yang harus diperhatikan dalam merancang format kelembagaan tambang. Jika di rata-rata nampak bahwa kriteria lingkungan merupakan aspek awal yang harus diperhatikan, walaupun kriteria sosial dan ekonomi juga hal penting. (Gambar 100). Hasil pendapat dari para ekspert tersebut memiliki rasio tingkat CI

(*Consistency Index*) dan standard indeks random (RI) yang kurang dari 0,10 sehingga inkonsistensi keputusan masih bisa ditoleransi.(Lampiran 28)

Preferensi kriteria pilihan narasumber ekspert secara rata-rata menunjukkan bahwa kriteria lingkungan yang berperan penting dengan bobot 0,41, disusul criteria sosial dengan bobot 0,30 dan bobot kriteria ekonomi yaitu 0,28. Kriteria lingkungan menunjang keberlanjutan aspek-aspek lainnya dalam menentukan keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar lokasi tambang. hal ini karena pada banyak wilayah tambang menjadi bertumpang-tindih dengan kawasan tangkapan air, sumber-sumber air, hutan lindung, lahan pertanian, perikanan, dan kawasan-kawasan lain yang menjadi hajat hidup masyarakat lokal.



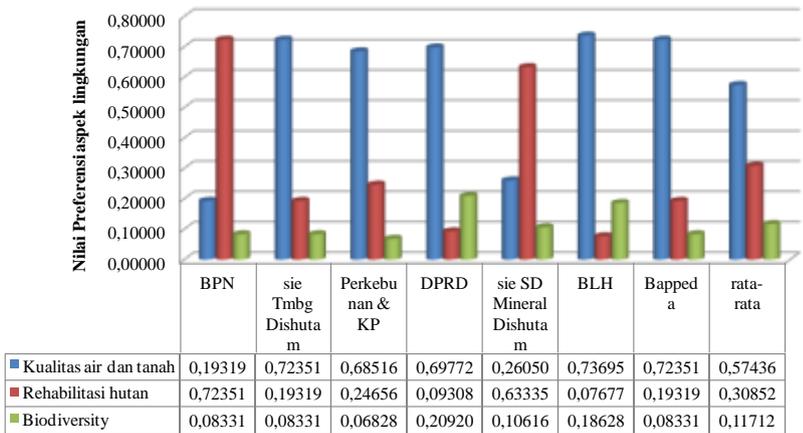
Gambar 100. Nilai Vektor Preferensi Untuk Pilihan Kriteria Pengelolaan Sumberdaya Tambang Di Kabupaten Pohuwato

Berdasarkan pilihan kriteria lingkungan, berbagai aspek seperti kualitas air dan tanah, rehabilitasi hutan dan biodiversity, sebagian besar stakeholder memilih aspek kualitas air dan tanah sebagai indikator yang harus diutamakan dalam kegiatan pertambangan. Terdapat dua stakeholder yaitu BPN dan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi yang mengutamakan rehabilitasi hutan sebagai pilihan utama. Jika melihat dampak penambangan yang dilakukan oleh peti saat ini, nampak bahwa kualitas air yang secara kasat mata mulai terkena dampaknya. Gambar berikut menjelaskan kondisi air hasil limbah dari penambangan rakyat.



Sumber : Hasil Survey Tim Peneliti tahun 2012
Gambar 101 Kondisi Air Sungai Limbah Kegiatan
Penambangan Tradisional

Diagram berikut menjelaskan rata-rata preferensi narasumber untuk kriteria lingkungan, bobot 0,57 untuk fokus pada aspek kualitas air dan tanah, selanjutnya masalah yang terkait adalah rehabilitasi hutan dengan bobot 0,30. Biodiversity juga penting diperhatikan, terkait lokasi tambang yang merupakan bagian dari kawasan Suaka Margasatwa Panua memiliki bobot 0,11.

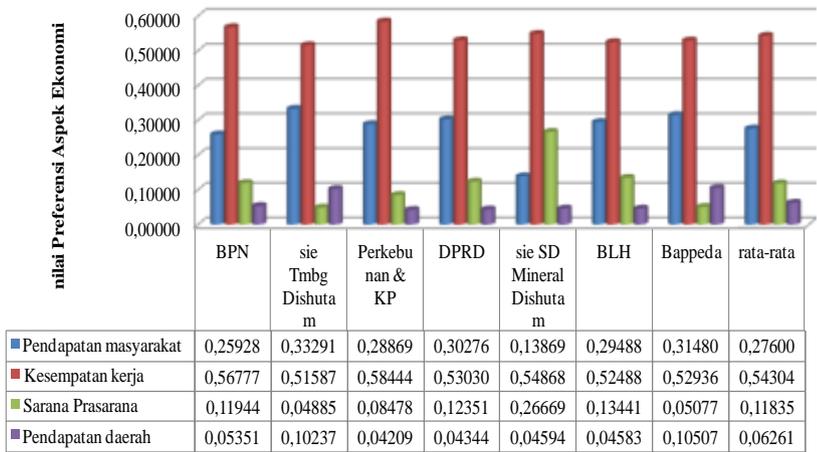


Gambar 102. Nilai Vektor Preferensi untuk pilihan Aspek Lingkungan Pengelolaan Sumberdaya Tambang di Kabupaten Pohuwato

Walaupun kriteria lingkungan penting diperhatikan, namun secara bersama-sama kriteria ekonomi dan sosial juga berkontribusi untuk mendukung aspek lingkungan. Berdasarkan pendapat dari stakeholder, kriteria ekonomi yang penting untuk diperhatikan dalam format kelembagaan tambang adalah kesempatan kerja. Hampir semua stakeholder mengharapkan agar

sektor pertambangan meningkatkan kesempatan kerja. Gambar 103 menjelaskan pilihan preferensi pada kriteria ekonomi untuk pilihan kesempatan kerja memiliki bobot 0,54. Walaupun jumlah pengangguran atau pencari kerja di Kabupaten Pohuwato berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS tahun 2010, hanya 2,60 persen dari jumlah angkatan kerja, namun pilihan kesempatan kerja masih menjadi prioritas kriteria k ekonomi.

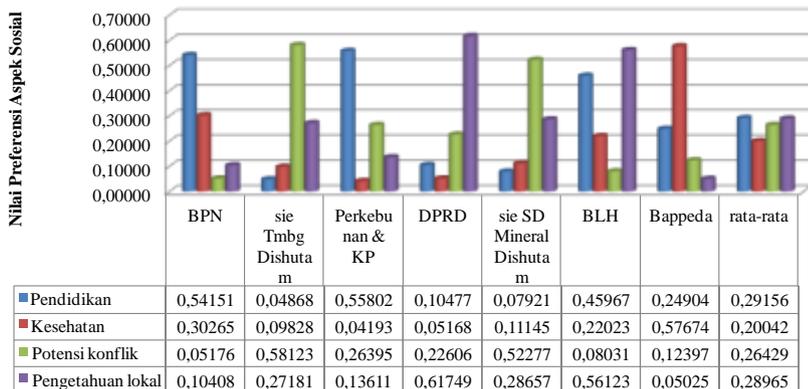
Selanjutnya pilihan kedua dengan bobot 0,27 adalah pendapatan masyarakat. Preferensi pendapatan masyarakat akan berdampak pada pendapatan daerah, sehingga aspek ini sangat diharapkan stakeholder terkait pengelolaan pertambangan. Data Kabupaten Pohuwato Dalam Angka menjelaskan pertumbuhan Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari tahun 2008 sampai 2010 hanya berkisar antara 0,65% dari 9 lapangan usaha. Preferensi ketiga adalah sarana dan prasarana dengan bobot 0,11. Pilihan ini merupakan konsekuensi adanya penanaman modal ke suatu daerah yaitu penyediaan sarana dan prasarana pendukung.



Gambar 103. Nilai Vektor Preferensi Untuk Pilihan Aspek Ekonomi Pengelolaan Sumberdaya Tambang Di Kabupaten Pohuwato

Preferensi berdasarkan kriteria sosial, masing-masing stakeholder memiliki pandangan tersendiri, beberapa stakeholder memilih aspek pendidikan merupakan hal yang utama. Bobot kepentingan aspek pendidikan yang dipilih BPN memiliki bobot 0,54, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (0,55). Sedangkan Bappeda memilih aspek kesehatan (0,57) penting untuk diperhatikan, potensi konflik (0,58) menjadi perhatian Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi. Permasalahan utama dalam aspek sosial penting untuk diperhatikan karena terkait dengan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi tambang. Pengetahuan lokal masyarakat terkait komunitas lokal di sekitar wilayah tambang menjadi perhatian dari kalangan

Dewan. Gambar berikut menjelaskan preferensi sosiak stakeholder terkait format kelembagaan tambang di Kabupaten Pohuwato.



Gambar 104. Nilai Vektor Preferensi Untuk Pilihan Aspek Sosial Pengelolaan Sumberdaya Tambang Di Kabupaten Pohuwato

Gambar 104 menjelaskan bobot pilihan kriteria sosial secara umum merata untuk masing-masing aspek. secara berurutan, bobot tertinggi adalah aspek pendidikan (0,29), pengetahuan lokal (0,28), potensi konflik (0,26) dan terendah adalah aspek kesehatan (0,20). Pilihan aspek pendidikan bagi criteria sosial merupakan pilihan yang bijak terkait rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang mampu mengelola potensi daerah di Kabupaten Pohuwato. Harapannya dengan perbaikan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan akan berdampak pada kualitas sumberdaya manusia. Pengetahuan lokal masyarakat terkait dengan aktivitas penambangan terkait dengan penghargaan

terhadap budaya lokal yang berkembang. Umumnya kegiatan penambangan oleh rakyat sudah dilakukan sejak puluhan tahun, sehingga kehadiran perusahaan swasta diharapkan dapat bersinergi dengan usaha penambangna rakyat.

Potensi konflik sosial juga penting diperhatikan terkait dengan pengelolaan dan penguasaan lahan Sebelum ada perusahaan yang melakukan eksplorasi, masyarakat dapat melakukan aktivitas penambangan tanpa batasan dan dapat dianggap pemegang kuasa penambangan walaupun tanpa ada identitas legal. Hadirnya perusahaan yang memiliki IUP dirasakan mengurangi aksesibilitas penambang rakyat. Hal inilah yang menjadi akar konflik sosial yang timbul jika tidak diakomodasi dengan baik. Aspek kesehatan, walaupun nilainya paling rendah diantara aspek lain, namun perlu diantisipasi sejak awal terkait karakteristik usaha penambangan yang mungkin berdampak pada kesehatan masyarakat di zona terdekat (dampak langsung) maupun pada zona yang terkena dampak tidak langsung kegiatan penambangan.

Dengan mengakomodir kriteria dan aspek yang mendominasi format kelembagaan tambang maka tersusunlah beberapa alternatif model CSR yang sesuai dengan kriteria sosial, ekonomi dan lingkungan. Analisis diarahkan untuk menemukan alternatif yang memuaskan dan terbaik di antara alternatif-alternatif yang tersedia. Format pengelolaan tambang berbasis lingkungan dan

berkelanjutan serta bernilai ekonomis bagi masyarakat setempat dengan memperhatikan aspek sosial menjadi prioritas karena perekonomian masyarakat mengandalkan sumberdaya alam sebagai sumber penyedia bahan mentah untuk kelangsungan hidup.

Kemitraan dengan pihak lain menjadi pilihan dominan beberapa stakeholder seperti BPN (0,42), sie Tambang Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi (0,45), DPRD (0,50), Bappeda (0,41). Sedangkan narasumber dari Dinas Perkebunan dan Tanaman Pangan memberikan bobot tertinggi untuk pilihan keterlibatan langsung perusahaan (0,48). Demikian pula dengan narasumber dari BLH memberikan prioritas tinggi untuk format bergabung dalam suatu konsorsium (0,40).

Masing-masing pilihan format kelembagaan memiliki karakteristik tersendiri. Pilihan kemitraan dengan pihak lain menjadi pilihan format kelembagaan dengan bobot 0,36 dan menjadi pilihan empat narasumber. Format kemitraan dengan pihak lain adalah penyelenggaraan CSR melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Contoh beberapa lembaga sosial/Ornop yang bekerjasama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan

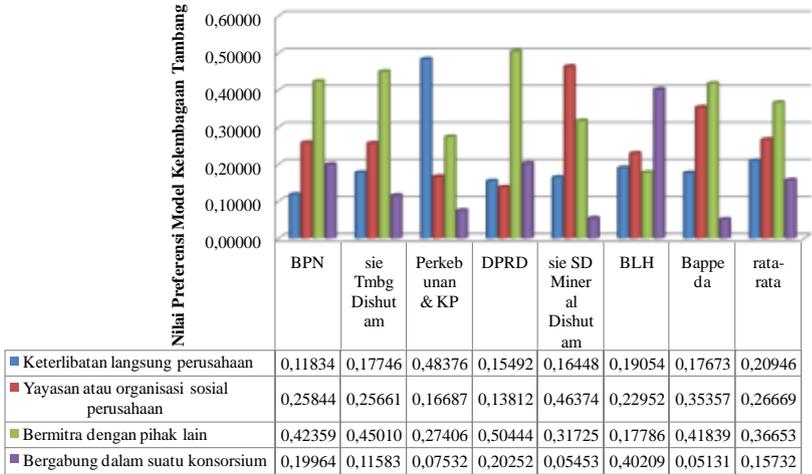
Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompot Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos); universitas (UI, ITB, IPB); media massa (DKK Kompas, Kita Peduli Indosiar).

Preferensi kedua dengan bobot 0,26 adalah perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Preferensi model kedua ini dipilih oleh narasumber dari Sie Sumberdaya Mineral Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Pohuwato. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Pola ini diterapkan beberapa perusahaan misalnya diantaranya adalah Yayasan Coca Cola Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund. Model ini akan bagus diadopsi jika yayasan yang didirikan oleh perusahaan benar-benar menjalankan tugasnya.

Pilihan keterlibatan langsung perusahaan menjalankan program CSR menjadi pilihan ketiga dengan bobot 0,21. Keterlibatan perusahaan melalui menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu

pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*. Format kelembagaan seperti ini akan berhasil jika perusahaan tambang memiliki keperdulian tinggi terhadap berbagai permasalahan yang ada disekitar wilayah tambang. Format 1 ini kurang menguntungkan karena tidak ada kontrol dari pihak ketiga dalam hal transparansi kegiatan.

Preferensi yang kurang populer dan hanya dipilih oleh narasumber dari BLH adalah mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Format kelembagaan seperti ini adalah jika perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama. Format ini akan berjalan dengan baik jika ada kesamaan visi, misi dan tujuan antar perusahaan yang tergabung dalam konsorsium. Gambar 105 berikut menjelaskan besaran bobot masing-masing alternatif pilihan narasumber terkait format kelembagaan tambang.



Gambar 105. Nilai Preferensi Format Kelembagaan Tambang di Kabupaten Pohuwato

Pada prinsipnya pilihan format CSR kelembagaan tambang dalam bentuk kemitraan mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban secara hukum (*legal responsibility*) terhadap undang-undang, pertanggungjawaban secara ekonomi terhadap *shareholder* terkait profit perusahaan dan tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat dan stakeholder tambang (*social responsibility*). Pilihan kemitraan dengan pihak lain menjadi pilihan yang rasional menurut sebagian besar narasumber terkait perlunya linkage antar stakeholder untuk mewujudkan kelembagaan tambang yang berkelanjutan.

Pilihan format kelembagaan tambang di kabupaten Pohuwato yang mengakomodasi kemitraan dengan pihak lain dalam prakteknya

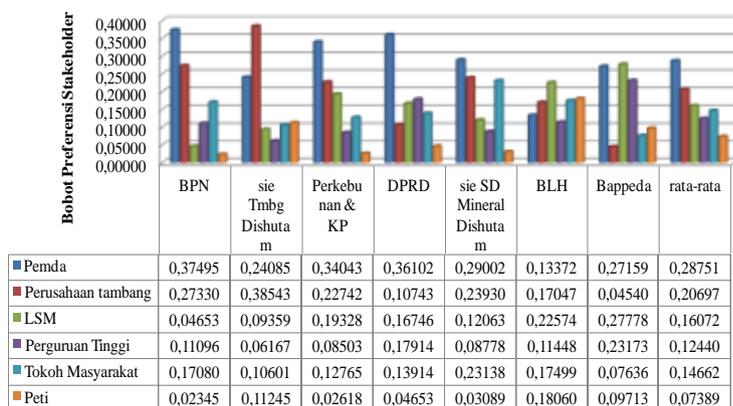
akan melibatkan beragam stakeholder. Langkah selanjutnya analisis AHP mengkaji stakeholder yang berperan dalam kegiatan kelembagaan pertambangan. Beberapa stakeholder yang terkait pengelolaan tambang mulai dari pemerintah daerah (pemda), perguruan tinggi, LSM sampai pelaku tambang rakyat. Nampak pada gambar 105, pilihan lima narasumber dari BPN, Dinas Perkebunan dan Pertanian Tanaman Pangan, anggota DPRD, Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi dan Bappeda memilih peran pemerintah daerah memiliki bobot tertinggi dibanding lembaga lain. Hasil pembobotan peran menunjukkan Pemda (pemerintah daerah) berperan penting dibandingkan *stakeholders* lainnya dengan bobot peran 0,28. Fungsi dan peran pemda adalah sebagai regulator, mediator dan konsultan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan tentang pengelolaan penambangan.

Peran aktif dari perusahaan tambang (0,20) menjadi pilihan selanjutnya untuk format kelembagaan . Peran LSM (0,16) dan tokoh masyarakat (0,14), berperan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan, baik terhadap kualitas lingkungan, pengelolaan lingkungan penambangan maupun terhadap usaha-usaha penegakan hukum lingkungan. Peran Perguruan tinggi memiliki bobot 0,12, diharapkan menjadi penyedia informasi pengetahuan dan teknologi (IPTEKS) serta hasil-hasil penelitian

pengelolaan penambangan. Sedangkan Masyarakat yang diwakili oleh peti memiliki bobot terkecil yaitu 0,07 mempunyai hak untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Dengan melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan secara berkelanjutan.

Pada dasarnya kemitraan dengan pihak ketiga, baik sebagai konsultan, mitra kerja dan atau pelaksana diperlukan agar CSR terlaksana secara efektif dan efisien. Pemerintah perlu melakukan pendekatan secara struktural dan emosional dengan berbagai asosiasi dunia usaha agar terbentuk visi yang sama terhadap CSR dan membentuk komisi tentang CSR atau sejenisnya. Perusahaan yang menerapkan CSR sebaiknya kegiatannya berkaitan dengan usaha yang dijalankannya sehingga bisa memberikan manfaat secara langsung bagi perusahaan, lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat lingkaran tambang dan bukan hanya pemberian sumbangan atau kegiatan sosial saja. Perusahaan sebaiknya membentuk lembaga atau suatu divisi khususnya divisi CSR yang akan melaksanakan program-program CSR pada perusahaan tersebut. Sehingga program pelaksanaan CSR pada perusahaan tersebut dapat terencana, terprogram, dan terealisasi dengan baik. Oleh karenanya pelaksanaan CSR yang dilakukan

bukan sekedar kedermawanan belaka dengan tujuan untuk *brand image* saja.



Gambar 106 Nilai Preferensi Stakeholder Pengelolaan Sumberdaya Tambang di Kabupaten Pohuwato

Sebenarnya bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat Dilakukan dalam Kegiatan Usaha Pertambangan dapat beragam melalui kemitraan dengan berbagai pihak. Misalnya aktivitas filantropis berhubungan dengan pemberian sumbangan dan bantuan kepada orang-orang atau lembaga dengan tujuan sosial. Merupakan salah satu bentuk perhatian yang dapat diberikan perusahaan dalam usaha meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Kegiatan program CSR yang bersifat filantropis cenderung bersifat “*charity*”. Bentuk kegiatan tersebut dampaknya terhadap masyarakat hanyalah “menyelesaikan masalah sesaat” hampir tidak ada dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain lebih mahal, dampak jangka

panjang tidak optimal untuk membentuk citra perusahaan. Dari sisi biaya, promosi kegiatan sama mahalannya dengan biaya publikasi kegiatan. Walaupun masih sangat relevan, tetapi untuk kepentingan perusahaan dan masyarakat dalam jangka panjang lebih dibutuhkan pendekatan CSR yang berorientasi pada peningkatan produktifitas dan mendorong kemandirian masyarakat.

Kegiatan program CSR yang menjawab aspek ekonomi terkait kesempatan kerja adalah membantu usaha kecil secara parsial, memisahkan kegiatan program yang bersifat pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan kesehatan. Kegiatan ini lebih berorientasi pada peningkatan produktifitas dan mendorong kemandirian masyarakat. Namun seringkali program ini jika tidak tepat sasaran akan cenderung menciptakan kebergantungan masyarakat pada perusahaan, sehingga efek pada pembentukan citra ataupun usaha untuk menggalang kerjasama dengan masyarakat tidak didapat secara optimal.

Kegiatan program CSR akan lebih baik jika berorientasi membangun daya saing masyarakat lingkaran tambang. peningkatan produktifitas (sebagai ukuran daya saing) "*competitive advantage*". Kemampuan pada aspek ini akan lebih efektif untuk mengimbangi ketersediaan sumber daya manusia dari luar lingkaran tambang. Target yang diharapkan memiliki efek meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dilingkar tambang

akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya pemanfaatan sumber daya tambang bagi kelangsungan hidup masyarakat di lingkar dalam tambang.

Dampak penting lain yaitu meningkatnya daya beli sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga masyarakat untuk menatap masa depan keluarga melalui perluasan akses pada pendidikan dan kesehatan jangka panjang. Untuk itu perlu diberikan penekanan pada keberlanjutan penguatan ekonomi secara mandiri (berjangka waktu yang jelas/mempunyai *exit policy* yang jelas). Konsep idealnya adalah memberikan ungkitan besar pada pendapatan masyarakat maka kegiatan perkuatan dilakukan pada rumpun usaha spesifik yang saling terkait dalam rantai nilai, misalnya usaha pertanian lahan kering dan perikanan.

Setiap pelaku pada mata rantai nilai pada dasarnya terkait peran kelembagaan ekonomi. Perkuatan dilakukan untuk meningkatkan mata rantai aliran barang, jasa, uang, informasi dan pengetahuan dalam sistem yang pada gilirannya akan meningkatkan performance setiap kelembagaan. Pendekatan CSR yang *smart* adalah dengan mengambil peran sebagai fasilitatif-katalistik sehingga kegiatan CSR lebih efisien memberikan dampak pada rumpun usaha dalam satu rantai nilai. Program pendidikan, kesehatan, dan infrasturktur-infrastruktur dirancang sinergis dengan penguatan ekonomi sehingga mampu

meningkatkan indeks pembangunan manusia pada tingkat lokal.

Implementasi CSR yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan, dan profit, risiko, serta kondisi operasional masing-masing perusahaan. Banyak perusahaan yang telah melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pelanggan, karyawan, komunitas, dan lingkungan sekitar yang merupakan titik awal yang sangat baik menuju pendekatan CSR yang lebih luas. Pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan menurut prioritas yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas CSR perlu diintegrasikan dengan pengambilan keputusan inti, strategi, aktivitas, dan proses manajemen perusahaan.

Dalam menjalankan aktivitas CSR tidak terdapat standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Dan setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan CSR serta seberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan pendekatan CSR (A.B. Susanto). Secara utuh gambaran preferensi format kelembagaan tambang yang memperhatikan

kriteria sosial, ekonomi dan lingkungan serta peran stakeholder dijelaskan pada gambar 107.

Tanggung jawab sosial telah menjadi kewajiban bagi suatu perusahaan dalam membangun filantropi perusahaan yang berbasis bisnis ekonomi. Dimana nampak pada gambar 106 mengilustrasikan bahwa pada hirarki kelembagaan kepentingan ekologi atau lingkungan menempati proporsi yang besar yaitu 0,41 demikian pula untuk sub hirarki yaitu kualitas air dan tanah menempati proporsi yang besar dengan angka 0,57 dan diikuti oleh sub hirarki tenaga kerja 0,54. Sub hirarki yang penting juga yaitu rehabilitasi hutan 0,31 dan sub hirarki meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan yaitu 0,29.

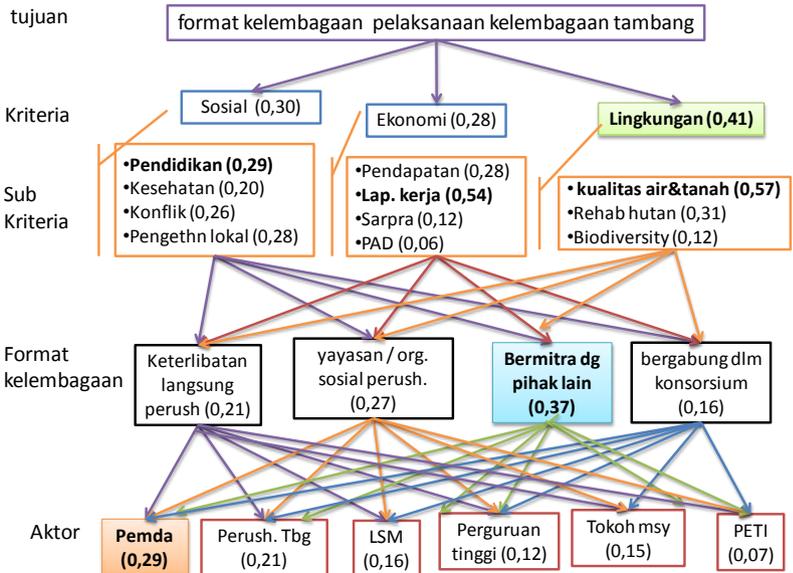
Demikian pula dalam membangun format kelembagaan dimana komponen bermitra dengan pihak lain mendapat proporsi yang besar yaitu 0,37 dan diikuti oleh yayasan/orang atau yayasan perusahaan yaitu 0,27, sedangkan keterlibatan langsung perusahaan dalam format kelembagaan memiliki proporsi 0,21, serta pilihan untuk bergabung dalam suatu konsorsium untuk semua pihak yaitu 0,16. Peran atau posisi aktor pemerintah daerah masih menduduki proporsi yang paling besar sebagai yaitu 0,29 yang diikuti oleh peran perusahaan pertambangan yaitu 0,21.

Hal yang menarik yaitu peran LSM yang cukup signifikan juga dalam membangun format kelembagaan yaitu 0,16, dengan tanpa

mengabaikan peran tokoh masyarakat sebagai actor yaitu 0,15. Komponen perguruan tinggi mendapat proporsi juga yaitu 0,12, hal ini sebagai bukti bahwa peran perguruan tinggi untuk memberikan input dan konsep ilmiah melalui hasil penelitian yang independen tetap memperoleh ruang yang baik dalam membangun format kelembagaan dan komponen yang tidak dapat diabaikan dan telah melakukan kegiatan produksi pertambangan dalam skala pertambangan rakyat tidak terabaikan juga dalam format kelembagaan tambang yaitu penambang tanpa izin (PETI) dengan prorsi 0,07.

Dapat dimaknai bahwa aspek-aspek yang telah dipetakan dan dibangun melalui sub hirarki tersebut memiliki kedudukan strategis dalam membangun model keputusan operasional. mengapa? Terdapat motif yang cukup baik dan menguntungkan semua pihak yang selama ini sering berbeda persepsi atau pandangan pada pemanfaatan sumber daya tambang. Disisi lain motif untuk saling memberi kesempatan dan waktu serta ruang negosiasi melalui media kelembagaan yang disepakati untuk dibangun bersama agar mencapai pengauatan kesepahaman yang bersumber dari perbedaan pandangan, sehingga nilai-nilai konsesnsus akan terus menjadi prioritas. Makna lain yaitu kemauan dan kepercayaan diri masing-masing komponen merupakan potensi yang cukup prospektif untuk dibangun secara bertahap dan konsisten berdasarkan peran dan

proporsi masing-masing, agar nilai dan pilantropi bukan hanya dapat diraih oleh satu pihak saja (Perusahaan pertambangan) namun juga menjadi milik semua komponen agar prinsip ekonomi, ekologi (lingkungan) dan sosiologi (sosial) tetap mendapat kedudukan yang tertinggi.



B. Kawasan Sensitif Sosial Ekonomi

Kawasan yang merupakan wilayah pertambangan berlokasi di dua Kecamatan yaitu kecamatan Buntulia dan Dengilo. Pada aspek topografi maka kedua Kecamatan tersebut berada di dataran tinggi atau daerah pegunungan yang notabene sebagian besar hulu daerah aliran sungai berlokasi di wilayah ini dan mengalir ke daerah hilir atau diwilayah pantai, seperti kecamatan Marisa, Kecamatan Patilanggio dan Kecamatan Randangan.

Bila ditinjau dari aspek sosial ekonomi wilayah ini merupakan wilayah pertanian lahan kering dan lahan basah. Di Lahan kering pada umumnya masyarakat bercocok tanam jenis tanaman tahunan seperti kelapa dalam, pohon mangga, nangka, dan kakao, serta jambu mente juga kemiri. Terdapat pula tanaman musiman seperti jagung, cabai, tomat, sayur mayur, serta bawang.



Gambar 108. Potensi Kelapa di Kecamatan Dengilo
Kabupaten Pohuwato

Selanjutnya untuk lahan basah lebih didominasi oleh tanaman padi. Serangkaian kegiatan sosial ekonomi pertanian ini tidak lepas aspek budaya merupakan rangkaian tradisi masyarakat yang mendukung kegiatan pertanian seperti “*Mehuyula*” (gotong royong), barter padi, serta kegiatan tradisional lainnya seperti “*dana-dana*” (lagu pantun berbalas) yang diiringi dengan alat musik “*Gambusi*” (Kecapi). Tradisi kebudayaan diwilayah ini telah diwarnai oleh tradisi atau budaya Jawa yang dibawa oleh orang-orang yang mengikuti program transmigrasi sejak tahun 1980an yang telah berdomisili dan berasimilasi serta beranak pinak namun tetap menjaga dan memelihara tradisinya antara lain pertunjukan “*Wayang*” untuk memeriahkan panen raya.

Disi lain kemajuan teknologi informasi saat ini yang telah masuk hampir seluruh pelosok wilayah, antara lain di Kecamatan Patilanggio telah berdampak pada sikap dan tingkah laku masyarakat karena nilai-nilai budaya yang menyampaikan norma dan etika kehidupan telah mengalami pergeseran dan bahkan telah terdegradasi oleh sikap-sikap yang kurang terpuji. Hal ini dijumpai diaulah Kecamatan Patilanggio sebagai tempat yang disepakati dengan Pemerintah Kecamatan untuk melakukan diskusi fokus dan pengedaran angket yang sedianya hanya diwakili oleh beberapa responden sebagai sampel namun responden yang datang melampaui kebutuhan

responden dan berdampak pada kesiapan kompensasi (uang transportasi) yang disiapkan oleh peneliti dan berakibat pada salah seorang kepala Desa (Desa Ilohelumo) menyampaikan pernyataan sikap:

“Kitorang mekunci pintu gedung pertemuan ini sebelum torangpe uang transportasi dibayarkan karena kitorang samua ada pegang undangan” (Ujar Kepala Desa Iloheluma dengan suara lantang)

Berikut suasana sosialisasi kegiatan dan pengarahan oleh Tim Peneliti di kecamatan Patilanggio.



Gambar 109. Suasana Pengarahan Pengisian Kuisener di Kecamatan Patilanggio

Selanjutnya masyarakat yang bermukim di Kecamatan Buntulia pada umumnya bercocok tanam pada lahan kering, antara lain kelapa dalam, pohon mangga, pohon nangka, dan pohon kakao dan sebagian juga ditanami jagung yang

berorientasi ekspor seperti jagung hibrida jenis BC2 dan BC3. yang telah menjadi primadona petani jagung saat ini karena harga komoditi jagung terus meningkat Di Kecamatan Dengilo dijumpai sebagian masyarakat melakukan kegiatan pertanian di lahan basah yang pada umumnya ditanami padi dan sebagian adalah lahan kering yang ditanami jenis tanaman tahunan yang sama seperti di kecamatan Buntulia.



Gambar 110. Potensi Tanaman Pangan Jagung dan Padi Di Kabupaten Pohuwato

Akan tetapi dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) maka sebagian petani telah memiliki kegiatan lain yaitu sebagai penambang ataupun buruh tambang dimana kegiatan ini tidak digeluti oleh petani sebelumnya sehingga bukan hanya memberikan dampak terhadap ekonomi rumahtangga namun juga menjadi daya tarik bagi anak-anak usia sekolah untuk memilih dan menggeluti kegiatan pertambangan sehingga sebagian anak-anak

tersebut tidak melanjutkan sekolah. Antara lain dijumpai seorang anak usia sekolah yang sedang menanti ibunya mengumpulkan batu (rap) yang mengandung emas di terowongan bekas galian penambang sebelumnya dilokasi pertambangan tanpa izin di Ilota dengan bentuk percakapan yang sederhana antara peneliti dengan ibu tersebut.



“ Kita memancarkan batu yang depe emas disini sotidak tako dengan longsor ini, soalnya kalau tidak bakarja kita tidak ada uang untuk mobabelanja dihari raya nanti” (Ibu Rasuna).

Gambar 111. Proses Pengumpulan Batu (Rap) Penambangan Tradisional di Kecamatan Buntulia

Dampak sosial lain yang tidak kalah pentingnya yaitu dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin telah membuka peluang terhadap kegiatan ekonomi di sektor informal lainnya antara lain meningkatnya peredaran minuman keras dan perjudian bahkan kegiatan prostitusipun mulai nampak disekitar kegiatan pertambangan tersebut. Hal ini atas pengakuan salah seorang penambang di Desa Ilota yang telah menggeluti perkerjaan menambang selama 14 tahun mengatakan antara lain:

“Laki-Laki yang bawa solar dan bensin di jergen dan bicara dengan torang tadi itu kawen dengan seorang wanita nakal (Wanita tuna susila) pedahal sudah tua parampuan itu” (Pak Andi)

Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa terdapat sekelompok keluarga yang telah berdomisili di puncak Iloa yang berprofesi sebagai penambang tanpa izin dan telah beranak pinak dilokasi tersebut namun dalam praktek perkawinan hanya antar mereka sekeluarga saja seperti dikatakan oleh pak Andi yaitu:

“Dorang di Puncak Iloa itu hanya satu kelurga samua dan dorang kawin hanya antar dorang satu keluarga saja sehingga tidak tahu lagi ,membedakan turunan masing-masing keluarga karena sebagian besar dorang pe turunan setidak sekolah lagi” Selanjutnya kata Pak Andi:



Gambar 112. Kondisi Permukiman dan Anak-anak di Desa Iloa kanan, Kecamatan Buntulia

“Sekitar 150 meter dari pertigaan Ilota telah terjadi tanah longsor yang berakibat 2 orang penambang tanpa izin tertimbun di lokasi tersebut dan meninggal dunia.”



Gambar 113. Bukaian lahan dan Tanah Longsor karena Aktivitas PETI di Kecamatan Buntulia

Kecamatan Marisa sebagai ibukota Kabupaten Pohuwato merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat kegiatan perekonomian juga pusat kegiatan sosial budaya sekaligus sebagai pintu masuk ke wilayah pertambangan, dijumpai memiliki beberapa kawasan sensitive. antara lain di wilayah ini menjadi tempat masyarakat melakukan unjuk rasa (demonstrasi) termasuk masyarakat yang mengklain dirinya sebagai penambang tanpa izin yang menuntut agar mereka diberikan izin melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut melalui model Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Hasil wawancara peneliti dengan Bupati Pohuwato menyampaikan antara lain:

“Saya ini sudah beberapa kali didemo oleh masyarakat penambang yang menuntut agar pemerintah mengeluarkan izin usaha pertambangan rakyat melalui wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Gunung Pani akan tetapi Pemerintah akan melakukan hal itu sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat penambang karena sebagian dari masyarakat tersebut adalah penduduk asli disini.” (Drs Hi Syarif Mbuinga M.M)”



Gambar 114. Wawancara Tim Peneliti dengan Bupati Pohuwato

Demikian pula kecamatan-kecamatan lain disekitar lokasi perijinan PT GSM yang kemungkinan menerima dampak dari aktivitas tambang seperti kecamatan Randangan, Patilanggio, dan Taluditi Berdasarkan peta tutupan lahan, lokasi ijin PT GSM berada pada tutupan lahan untuk hutan dataran rendah dan hutan dataran tinggi.

Secara ringkas, berbasai aspek sosial, ekonomi dan budaya dirangkum dalam tabel 30 berikut -

Tabel 30. Identifikasi Kawasan Sensitif Sosial Ekonomi Budaya Pengelolaan Tambang

No	aspek	fungsi	Aspek sensitif	kawasan
1.	Sosial	pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Banyak terdapat fasilitas kesehatan ✓ Fasilitas sarana prasarana lebih banyak dibanding kecamatan lain ✓ Tingkat pendidikan menengah belum terjangkau ✓ Sarana kesehatan belum memadai ✓ Pencemaran air oleh kegiatan tambang mempengaruhi kualitas air baku untuk PDAM ✓ Potensi konflik pengelolaan tambang cukup tinggi ✓ Fasilitas kesehatan sangat kurang ✓ Potensi konflik pengelolaan tambang relatif tinggi ✓ Partisipasi pendidikan ke pendidikan menengah rendah ✓ Sarana prasarana kesehatan terbatas ✓ 5 buah LSM yang membantu program peningkatan ketrampilan warga ✓ Sarana olahraga lengkap ✓ Tingkat partisipasi rendah untuk pendidikan menengah ✓ Kebutuhan air bersih ✓ Potensi konflik sedang 	<p>Kecamatan Marisa</p> <p>Kecamatan Buntulia</p> <p>Kecamatan Dengilo</p> <p>Kecamatan Randangan</p> <p>Kecamatan Patilanggio</p>

No.	aspek	fungsi	Aspek sensitif	kawasan
2.	ekonomi	pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pusat perdagangan dan pemasaran produk dari wilayah sekitar 	Kecamatan Marisa
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan agroindustri masih rendah, terkait potensi komoditas jagung dan pisang 	Kecamatan Buntulia
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Potensi jagung di lahan kering ✓ Sarana perdagangan seperti pasar masih terbatas ✓ Sarana transportasi terbatas sehingga biaya transportasi tinggi 	Kecamatan Dengilo
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hampir semua wilayah desa dilalui jalan trans Sulawesi ✓ Potensi tanaman jagung dan kelapa cukup dominan ✓ Tindak criminal sebab isu kesenjangan sosial terkait kesejahteraan masyarakat rendah 	Kecamatan Randangan
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Potensi lahan sawah dan kelapa ✓ Terbatas sarana pengolahan hasil pertanian ✓ Keterbatasan fasilitas pemasaran 	Kecamatan Patilanggio

No.	aspek	fungsi	Aspek sensitif	kawasan
	Budaya	untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Keragaman umat beragama bervariasi dan kerukunan terjaga ✓ Memelihara adat istiadat dan tradisi ✓ Tradisi masih dipelihara dan dilakukan misalnya Langga dana, dana berpantun, barsanji, zikir burunda, huyula/gotong royong ✓ aktivitas sosial tetap dilestarikan misal: rukun duka, kegiatan keagamaan seperti perayaan mauludan, isra mi'raj, tradisi tarunani, mohuyulu, tumbilatohe ✓ Tradisi keagamaan masih tetap dipelihara seperti maululd, ibadah kolom BPK, serta kegiatan di majelis taklim ✓ memelihara aktivitas sosial seperti gotong royong, saling memberi bantuan atau <i>huyula</i>, barter beras, tradisi sosial : dana-dana tradisional, Maulid Nabi, Isra Miraj, Tumbilo Tohe, 	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Taluditi Kecamatan Taluditi Kecamatan Dengilo Kecamatan Randangan Kecamatan Patilanggio Kecamatan Marisa

Daftar Pustaka

- Azheri B 2011 *Corporate Sosial Responsibility*, Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Budimanta, Arif, 2011, *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Prinsip Good Corporate Governance*, <http://www.migas-indonesia.com/index.php?module=article&sub=article&act=view&id=5441>, Di download pada tanggal 10 April 2011
- Carrol, A. B. 1999. *Corporate Social Responsibility, Evolution of a Definitional Construct. Business and Society*; Sep 1999. 38.3: ABI/INFORM Global. P 268.
- Ekawan R, 2009, *Laporan Akhir Pekerjaan Kajian Daerah Aliran Sungai, Rona Awal dan Lingkungan di Daerah Sekitar Taman Nasional Bogani nani wartabone*, PT. LAPI ITB. Bandung
- Friedman, M. 1970. *The Responsibility of Business is To Increase its Profits. The Newyork Times Magazine*. September 13, 1970. USA.
- Fauzi, 2006 *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Hadi Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Hasim, Remiswai, 2009 *Community Development Berbasis Ekosistem*, Diadit Media Jakarta
- Jenkins, R. 2005. *Globalization, Corporate Social Responsibility and Poverty*. *International Affair* 81, 3 (2005)
- Lesmana, Timotheus, 2011, *Program Corporate Social Responsibility yang Berkelanjutan*, <http://businessenvironment.wordpress.com/2007/03/01/program-corporate-social-responsibility-yang-berkelanjutan/> di download pada tanggal 10 April 2011
- L.Saaty T, 2005, *Theory and Applications of the Analytic Network Process*, RWS Publications 4922 Elsworth Avenue Pittsburg.
- Mitchell B, & Friends, 2007, *Pengelolaan Sumberdaya dan lingkungan*, Gadjah Mada University Press.
- Mohr, L. A et all. 2001. *Do Consumer Expect Companies to be Socially Responsible ? The Impact of Corporate Social Responsibility on Buying Behavior*. *The Journal of Consumer Affairs*. Vol 35. No 1. 2001.

Prayogo, Dody, 2008, *Corporate Social Responsibility, Social Justice dan Distributive Welfare dalam Industri tambang dan Migas di Indonesia*, Jurnal galang, Vol 3, No. 3 Desember.

Pribadi, Priyo, 2007, *Pemahaman Dan Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Usaha Pengelolaan Sumberdaya Alam*, makalah Disampaikan Pada CSR Learning Forum - 4th Round Workshop Indonesia Business Links Makassar , 7 September 2007.

Sudradjat, Adjat, 2010, *Pentingnya CSR Pertambangan*,
<http://bataviase.co.id/node/258949> di
download pada tanggal 10 April 2011

Sutarso W, 2010 *Membina Buruh Menjadi Entrepreneur Melalui program CSR* , Mutiara Benua Tanggerang Indonesia

Smith, A. Carol. 1976. *Regional Analysis, Volume I Economic System*. Department of Anthropology Duke University Durham. North Carolina.

Tanudjaya, B. B. 2006. *Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia*. Nirmana Vol 8. No 2. Universitas Kristen Petra, Surabaya

<http://www.petra.ac.id/~puslit/journals/dir.php?DepartmentID=DKV>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *Republik Indonesia Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*